

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Volume VIII, Nomor 29, Januari-Maret 2009

Akreditasi LIPI Nomor : 90/AKRED-LIPI/P2MBI/5/2007

PEMBINA :

Kepala Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI

PENGARAH:

Sekretaris Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB:

Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan

PEMIMPIN REDAKSI:

H.M. Yusuf Asry

SEKRETARIS REDAKSI:

Akmal Salim Ruhana

DEWAN REDAKSI:

M Atho Mudzhar (Badan Litbang & Diklat Dep. Agama)

Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Muhaimin AG (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Muhammad Nahar Nahrawi (Badan Litbang & Diklat Dep. Agama)

Ahmad Syafi'i Mufid (Badan Litbang & Diklat Dep. Agama)

Nuhrison M Nuh (Badan Litbang & Diklat Dep. Agama)

Syuhada Abduh (Badan Litbang & Diklat Dep. Agama)

Mursyid Ali (Badan Litbang & Diklat Dep. Agama)

Bashori A Hakim (Badan Litbang & Diklat Dep. Agama)

Mazmur Sya'roni (Badan Litbang & Diklat Dep. Agama)

SIRKULASI & KEUANGAN:

Fathan Kamal

Fauziah

SEKRETARIAT:

Reslawati

Achmad Rosidi

Zabidi

REDAKSI & TATA USAHA:

Gedung Bayt Al-Quran, Museum Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah

Jakarta Telp. 021-87790189 / Fax. 021-87793540

E-mail : harmoni2007@gmail.com

PENERBIT:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI

bekerjasama dengan

Penerbit CV. Maloho Jaya Abadi

Anggota IKAPI No. 387/DKI/09

Jurnal Harmoni terbit tiga bulan sekali. Redaksi menerima tulisan mengenai wawasan multikultural & multireligius baik artikel, ringkasan hasil penelitian, studi tokoh, maupun telaah pustaka. Panjang tulisan antara 10-15 halaman A4 1,5 spasi, diserahkan dalam bentuk *print out* dan *file*. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi maksud tulisan. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Pimpinan Redaksi ____5

GAGASAN UTAMA

Pembinaan Keagamaan bagi Lanjut Usia

Abd. Rahman Mas'ud ____9

Pendekatan Kelembagaan dalam Pembinaan Keagamaan bagi Lanjut Usia

Hadi Carito ____15

Peran KOMNAS Lanjut Usia dalam Penguatan Pembinaan Keagamaan

M. Ridwan Lubis ____21

PENELITIAN

Pembinaan Keagamaan Lanjut Usia di PSTW Bhakti Yuswa, Lampung: Partisipasi dan Koordinasi

M. Yusuf Asry ____39

Kehidupan Beragama Lanjut Usia di PSTW Syekh Burhanuddin, Padang Pariaman

Suhanah ____61

Kehidupan Beragama Lanjut Usia di Balai PSTW Khusnul Khotimah, Pekanbaru

Ahsanul Khalikin ____ 83

Kehidupan Beragama Lanjut Usia di PSTW Budhi Dharma, Bekasi

Ibnu Hasan Muchtar ____ 107

Kehidupan Beragama Lanjut Usia di PSTW Budi Mulia 1 Cipayung, Jakarta

Bashori A. Hakim & Haidlor Ali Ahmad ____ 127

Kehidupan Beragama Lanjut Usia PSTW Budi Mulia Jelambar, Jakarta

Titik Suwariyati ____ 147

Pembinaan Kehidupan Beragama Lanjut Usia di Panti Penyantunan Budi Agung, Kupang

Umar R. Soeroer ____ 161

TOKOH

Inten Suweno: Sosok Pejuang Kaum Lanjut Usia

Reslawati ____ 185

ANALISIS BUKU

Setelah Pensiun

Wakhid Sugiyarto ____ 189

Pengantar Redaksi

Pemimpin Redaksi

Salah satu tantangan besar dari semua bangsa di masa yang akan datang, dan sejak sekarang mulai dirasakan ialah tentang masalah kesejahteraan lanjut usia (lansia). Populasinya kian tahun makin bertambah besar, termasuk di Indonesia. Banyak penyebab meningkatnya jumlah Lansia. Di antaranya dampak keberhasilan dalam pembangunan fisik yang membuat kehidupan rakyat makin sejahtera, sehingga Usia Harapan Hidup makin bertambah, dengan konsekuensi jumlah Lansia meningkat dari tahun ke tahun. Menurut prediksi BPS pada tahun 2010 mencapai jumlah 24 juta Lansia atau 9.77 % dari seluruh penduduk Indonesia.

Esensi permasalahan lansia ialah menurunnya tingkat kesejahteraan fisik dan sosial, serta kebutuhan mental-spiritual yang kurang terpenuhi. Seyogyanya, makin bertambah umur, makin dekat dengan agama. Karena tidak ada yang pasti, kecuali memasuki masa tua dan berakhir dengan meninggal dunia, kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Pencipta. Dalam hal ini, jika lemah *political will* dari Pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengupayakan kesejahteraan lansia, maka akan menjadi beban

bagi semua. Untuk itulah sangat diperlukan peningkatan kesejahteraan Lansia, tak terkecuali dalam aspek keagamaannya.

Jurnal Harmoni No. 29 ini menampilkan beberapa tulisan dengan tema pembinaan keagamaan Lansia di panti-panti sosial. Di lingkungan Departemen Sosial yang dinamakan Panti Tresna Werdha (PSTW). Tulisan hasil penelitian yang dimuat dalam Jurnal ini merupakan karya para peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. Selain itu juga tulisan berisi gagasan dari para pakar dan mereka yang selama ini mengkaji dan merancang kebijakan pemerintah dalam masalah Lansia, serta yang sangat peduli dengan Lansia, termasuk bagaimana kiat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki dan yang sudah pensiun.

Sesungguhnya, dari berbagai tulisan dalam Jurnal ini diinformasikan, bahwa pembinaan kehidupan keagamaan telah berjalan di panti-panti sosial dengan intensitas dan jenis aktivitas yang berbeda, sesuai kemampuan panti, tuntutan lingkungan dan kebijakan pemerintah dan pemerintah di daerah. Di antara subtansi yang dinilai strategis perlu penanganan lebih lanjut ialah masalah kewenangan pembinaan agama di panti, koordinasi antara Panti, Dinas Sosial, Departemen Sosial dengan Departemen Agama beserta jajarannya di daerah. Di sejumlah panti diinformasikan pula, partisipasi Lansia masih rendah dalam pembinaan agama dan ibadah bersama (berjamaah), terkecuali acara seremonial justru lebih menarik bagi Lansia, seperti kesenian dan “joget” bersama. Muncul pertanyaan, apakah pembinaan yang dilakukan sudah mengacu pada kebutuhan Lansia yang spesifik sesuai karakteristiknya?

Banyak gagasan dan rekomendasi dalam tulisan di jurnal ini, bagaimana meningkatkan kesejahteraan Lansia dalam aspek keagamaan. Perlukah dibuat “payung” kerjasama antar institusi dalam pembinaan agama, untuk membangun koordinasi, dan atau meningkatkan kerjasama yang sudah diawali selama ini? Yang jelas panduan khusus tampak sangat dibutuhkan, untuk optimalisasi pembinaan. Sejauhmana kebutuhan Lansia akan sarana komunikasi baik secara *online*, *email*, dialog interaktif guna menampung keluhannya yang menginginkan adanya solusi yang bersifat pendekatan religius dari tokoh-tokoh agama, dan membangun

jaringan hubungan dengan majelis-majelis agama? Bagaimana tentang kontinuitas pembinaan keagamaan dan pendekatan kelembagaan yang seyogyanya dilakukan?

Pertanyaan strategis di atas dan lainnya disajikan oleh penulis dalam Jurnal ini. Diharapkan dapat mengisi kelangkaan referensi tentang tema ini, dan sekaligus akan memperkaya khazanah pemikiran tentang bagaimana berbakti kepada lansia serta memberikan perlindungan dan kasih sayang. Tidak seperti kata peribahasa, “bagaikan kacang lupa kulitnya”. Apalagi kita semua nantinya juga akan menjadi lansia.

Akhirnya, Pimpinan Redaksi menginformasikan, bahwa Jurnal Harmoni terbitan ke-29 ini terdapat perubahan Susunan Keredaksian. Pemimpin Redaksi dijabat M. Yusuf Asry; Sekretaris Redaksi Akmal Salim Ruhana; Mitra Bestari Rusdi Muchtar, Muhammad Hisyam, dan Muhaimin AG; sedangkan staf Fauziah, Reslawati, Ahmad Rosidi, Fathan Kamal dan Zabidi. Berbeda dengan sebelumnya, dalam terbitan kali ini telah hadir abstraksi tulisan dalam bahasa Inggris. Semoga perubahan membawa angin segar dalam meningkatkan kualitas jurnal, sebagai media yang mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan gagasan-gagasan di bidang kehidupan keagamaan.

Redaksi (YA)

Pembinaan Keagamaan Lanjut Usia

Abd. Rahman Mas'ud

Lahir di Kudus pada 16 April 1960. Menempuh pendidikan S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1990 menyelesaikan S2 di University of California Los Angeles (UCLA), program doktor (S3) tahun 1996 di Universitas yang sama, dan berhasil dengan disertasinya berjudul: Pesantren Architects and Their Socio-Religious Teaching. Saat ini menjabat sebagai Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI

Abstract :

The baby booming and aged population phenomenon is occurring around the world, and now attracting world attention. Not only the rapid increase of new residents, but also an even more crucial problem is the large number of old residents that increase daily, requiring further special treatments, due to the constraints in which they experience. The Elders are historical necessity, so we need certain actions to deal with it wisely. Religious guidance, as one of the elders needs, is obligatory within the treatment. Ideally, the older a person , the more they demand religious assistance- as a preparation for the day to come (akhirat). Along with a variety of the newest data, the paper discusses the importance of religious life guidance for the elderly.

Keyword: Religious guidance, social protection, the elder

Pendahuluan

Salah satu fenomena yang cukup menarik dalam pembangunan bangsa ialah persoalan para lanjut usia (lansia). Populasi lansia di Indonesia cenderung meningkat terus yaitu 6,9% (1990), 7,18% (2000), prediksi 9,77% (2010), dan 11,34% (2020) (BPS: 1998).

Diperkirakan akan mengalami *aged population boom* pada dua dekade permulaan abad ke-21. Jumlah yang makin besar tersebut pada akhirnya bukan hanya menjadi beban keluarga, tetapi bangsa dan negara, jika tidak dilakukan penanganan yang terencana dan berkesinambungan.

Secara umum usia lansia Indonesia saat ini lebih besar dibandingkan di negara lain seperti: Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Hongkong (Depsos 2003). Bahkan jumlahnya pada tahun 1999 berada diperingkat empat setelah RRC, India dan Amerika Serikat (KPBI, 1999). Makin meningkatnya jumlah lansia memberikan konsekuensi yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Sejalan dengan proses menua, kondisi fisik maupun non-fisik lansia mengalami penurunan. Konsekuensi logisnya, diperlukan peningkatan pelayanan kesejahteraan bagi usia lansia di berbagai bidang seperti sosial, kesehatan, pendidikan dan pembinaan keagamaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan lansia Pasal 1, bahwa yang disebut lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Sedangkan pembagian kategori lansia menurut *Second World Assembly on Ageing (SWAA)* atau Sidang dunia ke dua lansia di Madrid tanggal 8-12 April 2002 yang menghasilkan Rencana Aksi Internasional Lanjut Usia (*Madrid International Plan of Action on Ageing*) seseorang disebut sebagai lansia jika berumur 60 tahun ke atas (di negara berkembang) atau 65 tahun ke atas di negara maju.

Di antara lansia yang berusia 60 tahun ke atas dikelompokkan lagi menjadi *young old* (60-69 tahun), *old* (70-79 tahun) dan *old-old* (80 tahun ke atas). Dari aspek kesehatan, seseorang disebut lansia (*older person*) jika berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan penduduk yang berusia antara 49-59 tahun disebut sebagai pra-lansia. Lansia yang berusia 70 tahun ke atas disebut sebagai lansia beresiko. Dari aspek lansia 60 tahun ke atas dikelompokkan menjadi lansia yang produktif dan tidak produktif. Lansia yang produktif yaitu lansia yang sehat baik fisik, mental maupun sosial. Sedangkan lansia yang tidak produktif yaitu lansia yang sehat secara fisik tetapi tidak sehat secara mental dan sosial atau sehat secara mental tetapi tidak sehat fisik dan sosial atau lansia yang tidak sehat baik dari sisi fisik, mental maupun sosial.

Lansia dalam Keluarga dan Masyarakat

Keberadaan lansia seringkali dipersepsikan secara negatif dan keliru, dimana lansia dianggap sebagai beban keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Hal ini muncul karena melihat dari kasuistik terhadap lansia (jompo) yang hidupnya sangat tergantung kepada orang. Persepsi negatif seperti ini sesungguhnya tidak sepenuhnya benar, karena masih banyak lansia yang dapat berperan aktif, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Temuan studi yang dilakukan UNESCAP dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1977/1998) di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada umumnya lansia masih memegang peranan yang amat penting dalam kegiatan rumah tangga.

Dari temuan tersebut menunjukkan bahwa lansia masih dianggap penting dalam menentukan arah kehidupan sebagian besar rumah tangga tempat mereka berada. Di beberapa negara maju, para lansia justru diberi kesempatan berkarya di berbagai bidang kehidupan, seperti penjaga loket, restoran, *waiter* di hotel-hotel, penjaga POM bensin dan sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya. Namun, di berbagai negara berkembang, para lansia dianggap beban keluarga sehingga ditiptikan di panti-panti jompo, bahkan terlantar.

Ajaran Islam memberikan perhatian khusus pada lansia. Kewajiban anak terhadap orang tuanya (*birr al-walidain*) menempati urutan kedua setelah larangan mensekutukan Allah SWT. Dalam Al Qur'an dinyatakan: *Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. Salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai umur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil.* (Q.S. al-Isra' 17 : 23-24).

Kewajiban anaklah melindungi kedua orang tuanya ketika mereka telah lanjut usia. Oleh karena itu, para lansia harus diberikan perlindungan, baik itu kebutuhan secara fisik, kesehatan, sosial, ekonomi, hukum,

informasi, pendidikan, transportasi maupun kebutuhan rohani, seperti rekreasi dan spiritual keagamaan. Sedangkan kewajiban pemerintah, yakni memberikan perlindungan dan fasilitas kepada para lansia melalui berbagai kebijakan dan program yang dapat berhasil dan berdaya guna, efektif dan efisien terhadap kehidupan yang layak. Begitu juga masyarakat agar mampu melindungi dan memberikan tanggungjawab sosial dan agama kepada para lansia secara umum.

Perlindungan Negara bagi Lansia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” (Pasal 34, ayat 2). Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, disebutkan bahwa “lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” (Pasal 5). Kebijakan pelaksanaan peningkatan kehidupan sosial lansia ditetapkan secara terkoordinasi antara instansi terkait baik pemerintah maupun masyarakat (Pasal 25, ayat 1). Pada tahun 2005, Pemerintah membentuk Komnas Lansia dengan tugas meningkatkan kesejahteraan sosial lansia (Keppres No. 52/2004, pasal 3).

Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Salah satunya adalah bidang pelayanan keagamaan/mental spiritual (Kep. Mensos RI No. 15/HUK/2007). Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mensos tersebut, disusunlah Pedoman Pelayanan Sosial Lansia di Panti (No. 4/PRS-3/KPTS/2007) yang berisi tentang pola-pola pembinaan/pembimbingan bagi lansia di panti sosial. Adapun pola pembinaan/pembimbingan yang dimaksud dalam pedoman tersebut berupa bimbingan mental-spiritual dan kerohanian dengan menggunakan metode ceramah, peragaan dan diskusi, bimbingan ibadah sehari-hari, pengajian, baca al-Quran (Pedoman Pelayanan Lanjut Usia, 2007: hal. 23-24). Pedoman dimaksud dalam rangka meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan ibadah, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran iman, tanggung jawab moral dan pengembangan kepribadian serta mempertebal ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Faktor jumlah usia lansia yang makin meningkat dan segala permasalahannya, terutama penurunan kemampuan jasmani, rohani dan sosial, maka keberadaan Panti Sosial menjadi suatu kebutuhan yang mendesak saat ini dan ke depan. Dalam rangka memberikan perhatian terhadap kehidupan dan pembinaan keagamaan bagi para lansia, kiranya perlu penangan secara khusus bagi lansia oleh pemerintah/negara guna meningkatkan taraf kehidupan para lansia lebih baik lagi.

Pembinaan Keagamaan

Perhatian pemerintah dengan kebijakannya terhadap para lansia, maka penting untuk dilakukan pembinaan yang intensif dan efisien di berbagai aspek, termasuk di dalamnya aspek keagamaan. Aspek keagamaan melalui jalur pembinaan keagamaan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan amal ibadah dengan cara praktek/latihan mempertebal keyakinan akan kebenaran ajaran agama yang dianutnya. Mereka (lansia) hanya menyadari akan pentingnya beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar di hari tuanya mendapatkan ketenangan hidup, kebahagiaan (*happiness*), kedamaian (*peace*), kearifan (*wisdom*) dan ketentraman jiwa. Dengan perhatian yang serius tersebut, diharapkan kesehatan para lansia baik jasmani maupun rohani tetap terjaga. Dengan demikian, pembinaan rohani keagamaan sangat dibutuhkan bagi mereka.

Dr. Kartini Kartono menjelaskan bahwa untuk mencapai taraf kesehatan mental, orang harus dapat memenuhi tuntutan-tuntutan moral, intelektual, sosial dan religius. Mental yang sehat ditandai dengan adanya integrasi diri, regulasi diri, dan pengontrolan diri terhadap pikiran, angan-angan, keinginan, dorongan, emosi, sentimen, dan segenap tingkah laku. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan para lansia harus diarahkan pada perubahan sikap mental keagamaannya. Keadaan yang tadinya belum rajin beribadah, menjadi mau beribadah, yang semula menutup diri menjadi supel dan mudah berinteraksi dengan teman-temannya. Yang tadinya tidak peduli dengan lingkungannya, berubah menjadi tumbuh jiwa sosialnya. Karena itu, sangatlah penting dilakukan pembinaan keagamaan bagi para lansia secara sistematis dan terarah secara kelembagaan yang mencakup tenaga pembina dan fasilitas pendukung bagi para lansia.

Banyak usia lansia yang tinggal bersama keluarga, anak-anak, dan cucunya. Ada juga lansia yang hidup di rumah seorang diri. Namun diantaranya juga ada yang ditampung di panti-panti sosial. Banyak faktor yang menyebabkan para lansia berada di dalam panti sosial tersebut. Ada yang sengaja dititipkan oleh keluarganya, ada yang datang atas kemauan sendiri, ada yang terlantar di jalanan dan terjaring razia aparat yang kemudian ditempatkan di panti sosial. Para lansia ini sangat penting untuk diperhatikan, karena mereka sudah sangat tua sehingga kemampuan mereka dalam banyak aktifitas sudah sangat menurun. Bagi yang tinggal bersama keluarganya, maka keluarganya yang wajib memberikan perlindungan, kasih sayang, dan lain-lain. Bagi yang berada di panti, adalah kewajiban pengurus panti, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan, perhatian, harapan, kasih sayang dan pembinaan keagamaan.

Pembinaan keagamaan diharapkan dapat diberikan secara kontinyu, sistematis, tertib dan terarah dalam materi pembinaan sesuai dengan agama yang mereka anut. Pola pembinaan, guru pembimbing keagamaannya dan fasilitas tempat ibadah serta semua sarana yang mendukung aktivitas mereka harus terpenuhi. Dengan begitu, niscaya para lansia akan memperoleh siraman rohani di masa tuanya dengan baik dan makin mempertebal kemauan dalam beribadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Pedoman Rencana Aksi Nasional Untuk Kesejahteraan lansia. Depsos RI-YEL-UNFPA-HelpAge Internasional. 2003
- Majalah Lansia. *Aktif Produktif di Usia Lanjut*. Edisi 02 Tahun 01 Desember 2007.
- Penyusunan Pedoman Pembinaan Mental Spiritual. Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi DKI Jakarta, kerjasama Indonesia Institute for Society Empowerment (INSEP).

Pendekatan Kelembagaan dalam Pembinaan Keagamaan bagi Lanjut Usia

Hadi Carito

Staf Ahli Menteri Sosial RI dan mantan Kepala Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI

Abstract:

A variety of constraints confronted naturally by the elders necessitate special treatment in dealing with it. The existence of elder care, whether it is owned by the government or private sector, is expected to give the best service, including religious guidance for the elders. A possible solution in religious guidance for elders is by an institutional approach. Apparently, it is needed, a policy relating to the development of elder care, such as, restructuring organization and operation procedure including rehabilitating elder care facilities, opening the opportunity to optimize actualizing social welfare service duties more professionally, effectively, and efficiently.

Keyword: *Institutional approach, guidance alternative, elders*

Pendahuluan

Cita-cita bagi setiap orang adalah hidup selamat di dunia dan akhirat. Oleh karena itu pembinaan keagamaan sesungguhnya sangat diperlukan agar dapat menuntun manusia untuk mencapai cita-cita tersebut. Pembinaan keagamaan tidak hanya ketika masa lanjut usia, tetapi seyogyanya sejak lahir.

Beberapa konsep tentang lanjut usia dapat dijelaskan. Secara individu, seseorang

disebut lanjut usia jika telah berumur 60 tahun ke atas (di negara berkembang) atau 65 tahun ke atas (di negara maju). Di antara lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas dikelompokkan lagi menjadi *young old* (60-69 tahun), *old* (70-79 tahun) dan *old-old* (80 tahun ke atas).

Dari aspek kesehatan, seseorang disebut sebagai lanjut usia (*older person*) jika berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan penduduk yang berusia antara 49-59 tahun disebut sebagai pra-lanjut usia. Lanjut usia yang berusia 70 tahun ke atas disebut sebagai lanjut usia berisiko.

Dari aspek ekonomi, lanjut usia (60 tahun ke atas) dikelompokkan menjadi: (a) lanjut usia yang produktif yaitu lanjut usia yang sehat baik dari aspek fisik, mental maupun sosial; dan (b) lanjut usia yang tidak produktif yaitu lanjut usia yang sehat secara fisik tetapi tidak sehat dari aspek mental dan sosial; atau sehat secara mental tetapi tidak sehat dari aspek fisik dan sosial; atau lanjut usia yang tidak sehat baik dari aspek fisik, mental maupun sosial.

Menurut hasil Susenas tahun 2004 menunjukkan bahwa jumlah lansia di Indonesia mencapai 16.172.835 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.426.191 lansia yang telantar dan sebanyak 4,6 juta lansia yang rawan terlantar. Angka ini kemudian meningkat jumlahnya di tahun 2006 mencapai kurang lebih ± 19 juta.

Secara umum kondisi fisik seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perubahan: (1) perubahan penampilan pada bagian wajah, tangan, dan kulit, (2) perubahan bagian dalam tubuh seperti sistem saraf : otak, isi perut : limpa, hati, (3) perubahan panca indra: penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan (4) perubahan motorik antara lain berkurangnya kekuatan, kecepatan dan belajar keterampilan baru.

Perubahan-perubahan tersebut di atas berdampak pada beberapa hal, sebagai berikut: *pertama*, gangguan intelektual. Gangguan ini merupakan kumpulan gejala klinis yang meliputi gangguan fungsi intelektual dan ingatan yang cukup berat sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas kehidupan sehari-hari. Kejadian ini meningkat dengan cepat mulai usia 60 sampai 85 tahun atau lebih, yaitu kurang dari 5 % lansia yang berusia 60-74 tahun mengalami *dementia* (kepikunan berat). Pada usia 85 tahun ke atas, kejadian ini meningkat mendekati 50%. Salah

satu penyebab adanya gangguan intelektual adalah depresi, sehingga perlu dibedakan dengan gangguan intelektual lainnya.

Kedua, gangguan infeksi, adalah gangguan yang sering didapati pada lansia. Faktor penyebab lansia mudah terkena penyakit infeksi adalah karena kekurangan gizi, kekebalan tubuh yang menurun, berkurangnya fungsi organ tubuh, terdapatnya beberapa penyakit sekaligus (komorbiditas) yang menyebabkan daya tahan tubuh berkurang. Selain itu, faktor lingkungan, jumlah dan keganasan kuman akan mempermudah tubuh mengalami infeksi.

Ketiga, gangguan pancaindra, komunikasi, dan kulit. Akibat proses menua, semua pancaindra berkurang fungsinya. Demikian juga gangguan pada otak, saraf dan otot-otot yang digunakan untuk berbicara dapat menyebabkan terganggunya komunikasi. Organ kulit menjadi lebih kering, rapuh dan mudah rusak dengan trauma yang minimal. *Keempat*, gangguan sulit buang air besar (*konstipasi*). Faktor yang mempermudah terjadinya konstipasi disebabkan kurangnya gerakan fisik, makanan yang kurang mengandung serat, kurang minum, akibat pemberian obat-obat tertentu dan lain-lain. Akibatnya, pengosongan isi usus menjadi sulit atau isi usus menjadi tertahan. Pada konstipasi, kotoran di dalam usus menjadi keras dan kering. Pada kondisi kronis terjadi karena penyumbatan pada usus yang disertai rasa sakit pada daerah perut.

Kelima, gangguan depresi akibat perubahan status sosial, bertambahnya penyakit dan berkurangnya kemandirian sosial, serta perubahan-perubahan akibat proses menua menjadi salah satu pemicu munculnya depresi pada lansia. Gejala-gejala depresi dapat berupa perasaan sedih, tidak bahagia, sering menangis, merasa kesepian, tidur terganggu, pikiran dan gerakan tubuh lamban, cepat lelah dan menurunnya aktivitas. Tidak ada selera makan, berat badan berkurang, daya ingat berangsur menurun, sulit memusatkan pikiran dan perhatian, minat berkurang, kesenangan yang biasanya dinikmati menjadi hilang, menyusahkan orang lain, merasa rendah diri, harga diri dan kepercayaan diri berkurang. Pada kelompok ini juga muncul perasaan bersalah dan tidak berguna, tidak ingin hidup lagi bahkan mau bunuh diri.

Kondisi gangguan sebagaimana disebutkan di atas, tentunya para lanjut usia mengalami hambatan untuk menunaikan aktivitas

keagamaannya, sehingga perlu pembahasan kembali agar cita-cita sebagai umat manusia sebagaimana diutarakan sebelumnya dapat terwujud. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahannya adalah, bagaimana pembinaan keagamaan bagi lanjut usia yang mengalami hambatan dan ketergantungan dalam melakukan aktivitas keagamaan.

Pembahasan

Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi lanjut usia telah mengalami beberapa penurunan berbagai fungsi organ yang mereka miliki. Oleh karena itu, agar pembahasan tidak terlalu luas, maka lanjut usia dipandang dari dua kelompok besar yaitu; (1) lanjut usia produktif dan (2) tidak produktif. Lanjut usia produktif adalah golongan lanjut usia yang masih memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melakukan berbagai aktivitas. Sedangkan yang tidak produktif adalah lanjut usia yang memiliki keterbatasan baik fisik, mental dan ekonomi untuk melakukan aktifitas dan biasanya memerlukan bantuan orang lain.

Bagi lanjut usia kategori produktif tentunya tidak banyak kendala dalam melakukan pembinaan keagamaan karena mereka masih memiliki kemampuan fisik, mental untuk melakukan ibadah. Namun kesulitan yang dihadapi dalam pembinaan lanjut usia kategori ini adalah mereka tersebar. Metode yang cocok digunakan adalah pendekatan individual (*mikro*) yang tentunya membutuhkan petugas-petugas yang mencukupi jumlahnya agar dapat menjangkau para lanjut usia yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian pendekatan secara kelompok (*mezzo*). Pendekatan ini terlebih dahulu membentuk kelompok-kelompok (paguyuban) bagi para lanjut usia dan menetapkan jadwal waktu di sela-sela kesibukan mereka untuk mendapatkan penyegaran pengetahuan keagamaan.

Pada kategori lanjut usia yang tidak produktif biasanya mereka ditempatkan pada panti-panti lanjut usia. Panti lanjut usia telah memiliki standar pelayanan termasuk di dalamnya pelayanan pembinaan keagamaan. Namun karena para lanjut usia yang berada di panti memiliki kemampuan yang sangat terbatas seperti fisik dan mental, khususnya daya ingat yang sangat lemah sehingga membutuhkan waktu dalam pembinaannya. Dukungan pendamping lanjut usia yang profesional sangat diperlukan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai gangguan

yang dialami oleh lanjut usia seperti gangguan fungsi intelektual dan ingatan yang cukup berat sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas keagamaan. Demikian juga gangguan pancaindera akibat proses menua semua pancaindera dan fungsinya berkurang yang mengakibatkan terganggunya komunikasi.

Gangguan sebagaimana disebutkan di atas tentunya semakin berat apabila yang mengalami adalah lanjut usia non-produktif dan tidak memiliki kemampuan untuk menanganinya. Pada kondisi demikian peran panti sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan. Jumlah panti tentunya tidak sebanding dengan jumlah lanjut usia yang memerlukan pelayanan panti. Oleh karena itu Panti sosial milik pemerintah diarahkan menjadi pusat pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima dan memberikan contoh yang telah distandardisasi bagi masyarakat/swasta yang akan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang sejenis yang mampu memberikan berbagai jenis pelayanan pencegahan, pemulihan, reintegrasi, perlindungan dan pengembangan serta menjadi sistem pendukung pelayanan sosial lainnya. Panti Sosial harus mampu menjadi pusat informasi pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu, juga dapat menjadi pusat rujukan bagi panti sosial milik masyarakat/swasta, terutama bagi klien yang membutuhkan pelayanan terpadu atau pengembangan kemampuan secara optimal.

Panti swasta yang mulai berkembang dan tumbuh dimana-mana menuntut panti pemerintah dapat memberikan bantuan teknis (*technical assistance*) dalam pengembangan program pelayanannya kepada panti sosial milik masyarakat/swasta dan sebagai pusat konsultasi bagi pengembangan kapasitas (*capacity building*) pelayanan panti sosial milik swasta.

Kesimpulan

Keberadaan panti lanjut usia saat ini seiring dengan makin meningkatnya jumlah lanjut usia sangat penting. Oleh karena itu kebijakan terkait pengembangan panti sosial diperlukan seperti melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja serta rehabilitasi

sarana prasarana panti sosial. Kemudian menyediakan peluang untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kesejahteraan sosial secara lebih profesional, efektif, efisien. ***

Peran KOMNAS Lanjut Usia dalam Penguatan Pembinaan Keagamaan

M. Ridwan Lubis

Mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama dan menjadi wakil Departemen Agama di Komnas Lansia dan berhubung karena sudah mengakhiri tugas di Badan Litbang Departemen Agama maka tugas mewakili di Komnas Lansia telah dialihkan kepada pejabat yang lain. Sekarang penulis menjadi dosen pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga salah seorang Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Abstract:

The issue of managing elders has become the attention of society at large. One of them, of course, is Komnas Lansia (Elders National Commission). Based on the participatory experience in Komnas Lansia, some advices upon the role of Komnas Lansia in elders religious guidance are recommended, such as: the need of communication facilities to accommodate complaints from the elders; the necessity to establish networks between Komnas Lansia and religious institution and also Bimas Agama Islam Directorates in the ministry of religious affairs; so that Komnas Lansia can raise the awareness within the elders family not to avoid their responsibility in elders treatment simply because they have sent their elders to elder care. Komnas Lansia should cooperate with; and book publishers should be motivated to provide useful books for the elders.

Keyword: *Komnas Lansia, Institutional enhancement*

Pendahuluan

Pada awal abad 21 terjadi perkembangan penting dalam penanganan kelompok masyarakat lanjut usia.¹ Hal ini merupakan

¹Pada lansia terjadi kehilangan ganda (*triple loss*) yaitu kehilangan peran (*loss of role*); hambatan kontak sosial (*restriction of contacts and relationships*); dan berkurangnya komitmen (*reduced commitment to social mores and values*), lihat R. Siti Maryam, dkk., *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, Penerbit Salemba Medika, 2008, hal. 50.

akibat dari terjadinya perkembangan konfigurasi kependudukan di Indonesia. Pada masa lalu, khususnya pada awal orde baru fokus perhatian pemerintah adalah penurunan laju pertumbuhan penduduk (*total fertility rate*) sekaligus juga penurunan angka kematian anak (*total mortality rate*) menuju kepada peningkatan kualitas kependudukan. Penduduk yang berkualitas adalah apabila telah tercapai taraf kehidupan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Sejalan dengan telah diterbitkannya Undang Undang No. 13 Tahun 1999 tentang penanganan penduduk lanjut usia yang selanjutnya disebut lansia, maka pemerintah membentuk Komisi Nasional Lanjut Usia disingkat Komnas lansia yang secara struktural berada di bawah koordinasi Departemen Sosial. Keanggotaan organisasi ini terdiri dari berbagai unsur yaitu pemerintah dan masyarakat. Untuk pertama kalinya penulis ditugaskan mewakili Departemen Agama pada lembaga ini tentu dengan tujuan untuk memberikan sentuhan kegiatan yang bersifat religius guna mendukung kegiatan Komnas lansia. Apabila ditelaah terdapat perbedaan cara pandang antara dunia barat dengan timur terhadap penanganan kelompok usia lansia. Dalam pandangan dunia barat, kebutuhan dasar lansia lebih dititikberatkan kepada aspek pemenuhan kebutuhan yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan pengobatan. Sementara kebutuhan yang bersifat peningkatan ketahanan spritualitas berupa kualitas keberagamaan kurang memperoleh perhatian. Hal ini tentunya berbeda dengan format budaya masyarakat Indonesia yang merasakan sentuhan agama dan budaya menjadi hal yang mendasar. Oleh karena itu, sewaktu penulis berada pada lembaga tersebut telah membangun suasana kesepahaman di kalangan rekan sejawat untuk membagi perhatian terhadap penanganan aspek keberagamaan ini. Adanya komitmen keberagamaan yang kuat menjadi salah satu hal yang fundamental untuk mengantarkan kelompok lansia menikmati kehidupannya yang penuh ibadat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lansia: Pendekatan Sosiologis

Lanjut usia adalah salah satu dari tiga kelompok masyarakat minoritas dan dua lainnya adalah kaum perempuan dan orang cacat. Namun kelompok lansia sekalipun tergolong minoritas pada masa lalu akan tetapi berangsur akan menjadi kelompok masyarakat dominan. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan komposisi demografis pada negara-negara maju sebagaimana digambarkan di bawah ini. Menurut

sensus tujuh negara yang didata pada setiap 10 tahun yaitu dari tahun 1990, 2010 dan 2030 maka diperkirakan komposisi penduduk yang tergolong lansia mengalami peningkatan sebagai berikut:

Nama Negara	Tahun 1990	Tahun 2010	Tahun 2030
Canada	11 juta	14 juta	23 juta
Prancis	14 juta	15,5 juta	24 juta
Jerman	15 juta	20 juta	28 juta
Italia	15 juta	20,5 juta	28 juta
Jepang	12 juta	21 juta	26 juta
Inggris	15 juta	16 juta	22 juta
Amerika Serikat	12 juta	13 juta	21 juta

Di Amerika Serikat pada tahun 1994 terdapat 3,7 juta penduduk yang berusia di atas 85 tahun. Sementara itu menurut Biro Sensus Amerika Serikat, diperkirakan penduduk yang berusia di atas 85 tahun 2050 berada pada kisaran 9,6 juta (dikategorikan serius rendah), 18,2 juta (serius tengah) dan bisa menjadi 31,1 juta (serius tinggi). Tingkatan-tingkatan konfigurasi perkembangan demografis pada lansia ini tergantung kepada rekayasa intervensi yang dilakukan pemerintah bersama organisasi masyarakat lainnya. Sementara di Indonesia, pada tahun 2000 jumlah lansia diproyeksikan 7,28 % dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 11,34 % bahkan data Biro Sensus Amerika Serikat memperkirakan Indonesia akan mengalami pertambahan warga lansia terbesar di seluruh dunia pada rentang 1990-2025 yaitu sebesar 414 %.² Adapun asas pelayanan terhadap lansia, menurut WHO (1991) prinsipnya adalah *to add life to the years that have been added to life* dengan prinsip kemerdekaan (*independence*), partisipasi (*participation*), perawatan (*care*), pemenuhan diri (*self fulfillment*), dan kehormatan (*dignity*). Sementara itu, prinsip yang dikembangkan Departemen Kesehatan RI adalah *add life to the years, add health to life, and add years to life* yaitu meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan dan memperpanjang usia.³

Dari uraian di atas, terjadinya kemajuan terhadap penanganan kesehatan di banyak negara terutama negara-negara industri maju, berdampak terhadap terjadi pula peningkatan angka harapan hidup. Dari gambaran di atas, pertambahan angka harapan hidup menjadi trend baru

²*Ibid.*, hal. 9.

³*Ibid.*, hal. 11.

di banyak negara termasuk Indonesia. Hal ini menjadi bukti kesuksesan abad 20 yaitu terjadinya peningkatan kesehatan di kalangan penduduk lanjut usia. Atas dasar itulah di negara-negara maju sudah dirumuskan paradigma baru tentang kehidupan lansia yang selama ini dipandang sebagai kelompok masyarakat yang memiliki ketergantungan kepada orang lain baik secara institusi seperti negara maupun keluarga. Bentuk paradigma baru itu adalah penekanan kepada lansia yang aktif (*active aging*) secara sosial ekonomi menjadi manusia yang produktif. Sebagai upaya perumusan langkah mendorong terwujudnya lansia produktif itu maka programnya adalah sebagai berikut: (1) peningkatan angka harapan hidup yang aktif (2) peluang memperoleh pekerjaan pada masyarakat lansia (3) penguatan sistem pensiun (4) perencanaan terhadap usia yang berkaitan dengan kesehatan dan kebutuhan perawatan jangka panjang (5) peranan dari pemberian perawatan dan kesukarelaan, dan (6) investasi biaya yang efektif menanggulangi penyakit-penyakit kronis.

Denver Summit yang diselenggarakan di Denver Colorado Amerika Serikat telah merumuskan suatu kesepakatan yang memusatkan beberapa upaya insentif untuk menuju kepada pemberdayaan lansia (*active aging*) serta untuk mengenali wilayah-wilayah potensial dalam kolaborasi internasional untuk penelitian masa depan dan berbagai informasi. *Denver summit* juga menegaskan berbagai peluang melakukan diskusi strategis untuk memastikan bahwa sistem perawatan kesehatan dan pensiun dapat terus berlanjut. Untuk realisasi *Denver Summit*, *The Organisation of Economic and Cooperation Development (OECD)* dan *World Health Organisation (WHO)* yaitu dua badan dunia yang bergerak di bidang pembangunan kerjasama ekonomi dan organisasi kesehatan telah merumuskan lima program yaitu: (1) peningkatan kemampuan untuk memperkirakan status kesehatan dan ketidakkampuan para lansia dalam rangka membuat perkiraan yang lebih akurat dari masa depan pembiayaan kesehatan dan perawatan jangka panjang (2) memahami tidak adanya bantuan terhadap tingkatan partisipasi dari penanaman modal yang tinggi di kalangan lansia dan keefektifan insentif untuk peningkatan kegiatan produktivitas sosial (3) peningkatan keberlanjutan rencana pemberian pensiun dari pemerintah (4) perencanaan kesehatan dan kebutuhan perawatan jangka panjang (5) pemahaman terhadap adanya hubungan pengeluaran biaya terhadap pengobatan dan perawatan jangka panjang dan perolehan keuntungan terhadap pribadi penyandang penyakit-penyakit kronis.

Melihat cepatnya penambahan angka harapan hidup di dalam konfigurasi demografis di berbagai negara, inilah yang mendorong Colin Milner, pendiri sekaligus *Chief Executive Officer The International Council on Active Aging (ICAA)* melakukan berbagai langkah sebagai upaya menghadapi laju peningkatan angka harapan hidup dalam 100 tahun belakangan ini. Pertanyaan utamanya menurut Colin Milner adalah: apa pilihan yang kita kerjakan dengan adanya penambahan tahun-tahun kehidupan ini? Dan kemudian, apakah yang dimaksud dengan kualitas kehidupan selama dalam perjalanan waktu ini?

Pendekatan dunia barat dalam memahami kebutuhan kelompok sosial lanjut usia adalah intinya terletak pada pemeliharaan kesehatan dan jaminan hidup yang disebut pensiun. Tegasnya pendekatannya lebih utama pada pendekatan yang bersifat kebutuhan fisik. Kebutuhan yang bersifat materi tentunya adalah hal yang dipandang penting karena hal inilah realitas kehidupan yang dialami oleh setiap manusia apalagi kelompok minoritas yang disebut lansia. Akan tetapi, bagi kelompok lansia yang kurang beruntung di belahan dunia sebelah timur tidak cukup hanya berhenti pada aspek kebutuhan materi. Di balik itu, ada persoalan lain lagi yang lebih substantif yaitu kebutuhan pemberian santunan yang bersifat bimbingan kejiwaan. Bimbingan ini diperlukan untuk menjadi landasan terhadap persoalan universal kemanusiaan yaitu: dari mana manusia datang? Apa tujuan hidup di dunia serta apa yang harus dikerjakan oleh manusia? Dan akan kemana akhir kehidupan manusia?

Kebutuhan Manusia terhadap Agama

Kehidupan manusia selalu memerlukan pegangan agar manusia mengetahui arah dan tujuan kehidupan serta mengetahui cara-cara dalam menjalani kehidupan. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan sehari-hari kehidupan manusia selalu diliputi berbagai misteri yang menyelimuti seluruh perjalanan hidup yang ditandai dengan berbagai perasaan kecemasan yang tidak jelas dan hal ini terjadi sebagai reaksi terhadap sesuatu yang dialami orang lain. Adapun bentuk kecemasan lansia itu dikelompokkan sebagai berikut:

Pertama, kecemasan ringan dalam bentuk peningkatan kesadaran, terangsang melakukan tindakan, termotivasi secara positif, sedikit mengalami peningkatan tanda-tanda vital.

Kedua, kecemasan sedang yaitu lebih tegang, menurunnya konsentrasi dan persepsi, sadar tetapi fokusnya sempit, gejala-gejala fisik berkembang seperti sakit kepala, sering berkemih, mual, palpitasi dan letih.

Ketiga, kecemasan berat dalam bentuk persepsi menjadi terganggu, perasaan terancam atau takut meningkat, komunikasi menjadi terganggu, mengalami peningkatan tanda-tanda vital lebih dramatis, diare, diaporesis, palpitasi, nyeri dada dan muntah.

Keempat, panik dengan adanya perasaan terancam, gangguan realitas, tidak mudah untuk berkomunikasi, dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, kombinasi gejala-gejala di atas dapat lebih buruk bila intervensi yang dilakukan gagal.⁴ Dari semua gejala kejiwaan tersebut pada dasarnya adalah kehilangan pegangan sebagai tempat berlindung dan menyerahkan diri. Pada posisi seperti inilah betapa peranan kehidupan beragama menjadi penting yang membimbing manusia untuk tidak larut dalam posisi sebagai usia yang hina (*ardzal al'umur*).

Berbagai fakta kehidupan mereka jalani yang sering berhadapan dengan berbagai kekuatan supra natural sehingga membuat manusia mengalami kebingungan di dalam menempatkan keberadaan dirinya sehingga terjadilah kondisi relativitas antara subyek dengan obyek. Dalam kaitan itu, kehidupan manusia diliputi oleh dunia magis yang membuat dirinya menjadi ajang permainan landasan kehidupan yang tidak ada kepastian itu yang disebut dunia religi. Memang, kemudian di antara manusia ada yang mengalami peningkatan suasana psikologis ke taraf yang lebih kongkrit yaitu manusia didorong untuk memasukkan dirinya ke dalam institusi keagamaan yang disebut religi baik Islam, Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha, Khonghucu maupun agama-agama lokal lainnya. Akan tetapi oleh karena komitmen pemilikan lembaga agama ini lebih karena terdorong sebagai pencarian identitas diri agar menjadi bagian dari sebuah komunitas, maka komitmen terhadap lembaga agama ini selalu berputar-putar pada pencarian makna simbolis belaka. Dalam

⁴Lihat R Siti Maryam, dkk., *op. cit.*, hal. 100-101

kaitan ini, maka makna simbolik itu tidak membawa dampak perolehan suasana keberagamaan yang bermakna kecuali hanya sekedar penonjolan lambang. Kondisi manusia termasuk lansia yang hanya berhenti pada penegasan jati diri sebagai bagian tertentu dari simbol keagamaan pada akhirnya akan menjerumuskan manusia kepada suasana putus asa karena kehidupan dihadapkan kepada sejumlah tantangan. Berpikir yang selalu mengidolakan masa lalu dan bersikap pesimis terhadap masa depan adalah akibat dari format keberagamaan yang hanya mengandalkan kepada peneguhan sikap terhadap wawasan simbolik di atas. Akibatnya lansia hanya tinggal menanggapi ketidakacuhan masyarakat termasuk anak-anaknya sendiri terhadap penderitaan batiniah yang mereka hadapi. Apabila mereka dibiarkan berhadapan dengan suasana ketidakpastian dan pegangan psikologis ini maka tentunya lansia dapat saja mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya karena pertambahan usia yang panjang dipahami sebagai penderitaan. Padahal di dalam pandangan agama, tidak ada sesuatupun yang diciptakan Allah dengan sia-sia, semuanya mempunyai makna namun terkadang oleh karena sempitnya pandang akibat dari dangkalnya wawasan pemahaman keberagamaan maka nilai agama tidak mengalami peningkatan menjadi landasan etos kerja. Atas dasar itu, diperlukan promosi keberagamaan dari religi kepada *religion* dan kulminasinya kepada *religiosity* yaitu nilai keberagamaan yang tidak lagi sekedar sebagai simbol kehidupan akan tetapi telah membntin menjadi suatu nilai dan pegangan kehidupan yang dapat menerangi seluruh perjalanan kehidupan dengan terang benderang, penuh optimisme kepada Allah Yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih serta Penyayang. Lalu sekarang, bagaimana upaya untuk menuju kesana?

Format Keberagamaan Lansia

Lansia adalah kelompok masyarakat yang sedang berada di pendulum menuju senja kehidupan. Mereka sedang menghadapi pertanyaan besar yaitu apa yang harus dilakukannya dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Dalam pengalaman hidup sehari-hari, lansia menemukan berbagai perubahan yang radikal tentang kehidupan. Pola kehidupan masyarakat yang dulunya berada pada tataran kultur agraris kemudian berhadapan dengan kultur baru yaitu masyarakat moderen-industri. Kala berada pada kultur agraris masyarakat hidup dengan damai

dan harmoni karena adanya ikatan berbagai kearifan lokal yang menjadi perpaduan nilai-nilai agama dan budaya. Wujud dari kearifan lokal itu adalah masyarakat saling berkomitmen terhadap nilai-nilai moral yang sarat dengan sanksi-sanksi manakala ada yang melakukan pelanggaran. Masyarakat yang berada pada kultur agraris sering dihadapkan dengan berbagai situasi yang sulit untuk menemukan solusinya kecuali dengan kepasrahan terhadap kekuatan yang absolut yaitu Tuhan. Di satu sisi memang terjadi harmoni akan tetapi di sisi lain lambannya dinamika kehidupan oleh karena trauma terhadap sanksi moral itu. Akibatnya umat yang katanya beragama kemudian mengalami sikap yang konservatif menghadapi kehidupan akibat kurangnya dinamika, kreatifitas dan inovasi kehidupan. Oleh karena itu, tidak aneh ketika agama menjadi tertuduh akibat dari terjadinya kelambanan manusiaantisipasi dinamika perubahan yang dipahami manusia moderen sebagai biang keladi terjadinya sikap-sikap konservatif.

Sikap fatalistik menghadapi kehidupan pada akhirnya membuat para lansia merasa tidak lagi mampu memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap kehidupan sehingga pola hidupnya menjadi amat tergantung kepada orang lain sekalipun hal itu bermakna tempat ketergantungan itu adalah anak dan saudara. Hal ini disebabkan karena keluarga juga sedang dihadapkan kepada tantangan kekinian yaitu mengejar profesionalitas agar mereka tetap dapat eksis di dalam pergaulan masyarakat. Akibatnya adalah keluarga kurang memberi perhatian terhadap para orangtua yang sudah berusia senja. Dari sudut pandangan agama, setiap anak dituntut untuk selalu berbakti kepada orangtua (*birr al walidain*) sebagai kewajiban yang tidak ada habisnya kendatipun orangtua sudah berada di alam barzakh. Demikian juga orangtua yang sudah lansia tetap dituntut untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT sekalipun tidak lagi sesempurna ketika dahulu masih berusia muda. Anak yang tidak mampu melakukan *birr al walidain* akan tetap menjadi hutang seumur hidup dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadirat Yang Maha Kuasa. Persoalan utamanya adalah adanya ketergantungan lansia terhadap keluarga, masyarakat dan pemerintah sementara hal itu tidak sejalan dengan tujuan pembangunan yaitu agar setiap orang berdasar pada potensi masing-masing dapat menghidupi dirinya sendiri (*self sufficient*) sehingga lansia tidak menjadi beban teologis.

Persoalan berikutnya adalah menurunnya sikap optimis yang kuat di kalangan lansia bahwa mereka tetap menjadi manusia yang berguna. Namun sekalipun demikian bukan tidak mungkin terjadi, kalangan lansia mengalami kebangkitan kesadaran keberagamaan ketika usia telah memasuki fase lansia. Kemungkinan pada masa lalu akibat dari bergelimpangnya fasilitas kehidupan yang dianugerahkan Allah kepadanya sehingga mereka lupa kepada pentingnya agama dan malah sebaliknya terdorong melakukan perbuatan maksiat sekalipun hati kecilnya mengatakan tidak. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari pola hidup yang hedonistik dan pragmatis sehingga melihat bahwa realita alam inderawi adalah batas akhir kehidupan dan itulah yang menjadi tujuan utama kehidupan. Akan tetapi yang terjadi justru munculnya kenyataan baru bahwa suatu kenyataan-kenyataan inderawi yang dipandang absolut pada masa lalu ternyata tidak lebih dari fatamorgana kehidupan. Fakta ini apabila disikapi dengan kembali kepada kesadaran beragama atau yang disebut dalam psikologi agama dengan konversi agama maka kehidupan manusia menjadi hina karena akan terdorong untuk mengambil jalan pintas (*taqshir*) yaitu mengakhiri hidup melalui tindakan bunuh diri.

Kepasrahan hidup ini lebih memuncak lagi ketika seorang lansia mendapatkan pengalaman baru yaitu hilangnya satu persatu berbagai kenikmatan hidup yang dimiliki ketika berada pada usia yang muda. Hal ini tentunya bisa disebabkan oleh karena ketidakmampuan anggota fisik mengolah pangkal kenikmatan itu atau juga bisa karena sebab-sebab lain seperti penyakit. Ketidaksiapan menerima perubahan ini pada jangka panjang akan mendorong lagi lansia mengambil sikap keputusasaan. Pertanyaannya adalah lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang lansia dalam menolak ketergantungan kepada orang lain dan kepasrahan menghadapi berbagai perubahan hidup.

Nilai Agama dalam Kehidupan

Akidah

Nilai utama dalam kehidupan adalah akidah yaitu keyakinan kepada Allah SWT Maha Pencipta, Maha Pengasih dan Penyayang. Sebagai Maha Pencipta, Allah menciptakan manusia sebagai karya puncaknya. Manusia diberi potensi akal dan kalbu untuk dapat melakukan pilihan

terhadap yang benar dan baik. Kemampuan untuk memilih terhadap dua hal ini menunjukkan bahwa makhluk manusia adalah makhluk yang bisa terjerembab ke lembah yang hina (*asfala safilin*) manakala mereka tidak meyakini Allah Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta, kepadanya semua makhluk menggantungkan hatinya. Allah tidak selayaknya diberi sekutu (*syirk*). Allah telah melukiskan diriNya pertemuan dalam dua kontradiksi yaitu memberikan kegembiraan (*tabsyir*) yang memiliki sifat lemah lembut, bijaksana, pengampun, penyayang dan lainnya, namun pada sisi lain dijelaskan bahwa Allah Maha keras, gagah (*tandzir*). Berdasar pada dua sifat kontradiktif ini mendorong manusia untuk selalu berbuat yang baik karena Allah telah menyediakan balasan syorga kepada mereka yang membaktikan hidupnya untuk selalu berbuat kebaikan dan kebajikan namun di samping itu juga manusia diancam untuk dimasukkan ke neraka bagi mereka dengan sengaja membudayakan pada dirinya berbuat buruk.

Allah sebagai Maha Kuasa, memberi pengertian bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagiNya karena Allah adalah Wujud yang Pasti (*wajib al wujud*) sementara makhluk adalah wujud yang tidak pasti (*mumkin al wujud*). Allah senantiasa membuka pintu kemaafan kepada hamba-hambaaNya yang mengakui telah berbuat kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi orang baik (*fitrah*) sebagaimana ikrar kesaksian yang dinyatakan oleh setiap calon manusia sewaktu masih berada di alam azali. Pengakuan itu disebut dengan *iman nubuwwah* yang menjadi potensi untuk menjadi orang baik. Keyakinan seseorang terhadap adanya Allah SWT menjadi syarat terhindarnya seseorang dari sikap putus asa atau bersikap prasangka buruk (*suuzhan*) terhadap Allah maupun orang lain sekalipun terhadap anak sendiri.

Adanya keyakinan bahwa setiap manusia memiliki potensi berbuat baik menjadikan manusia lansia sebagai orang yang selalu optimis dan sama sekali tidak mempunyai musuh karena setiap orang hanya mendapatkan rezki dari haknya yang ditentukan oleh Allah dan tidak mungkin rezkinya diambil oleh orang lain. Oleh karenanya setiap orang harus melakukan usaha maksimal sesuai dengan batas kemampuannya (*al kasb* dan *al ikhtiyar*) tanpa menyisakan sedikitpun kemampuannya. Setelah usaha maksimal itu dilakukan kemudian diteruskan dengan

menyerahkan kepada Allah hasil dari pekerjaannya (*tawakkal*). Dalam kaitan ini setiap lansia hendaklah mengambil jalan tengah dari dua kecenderungan pemahaman teologis. Dua pandangan itu adalah sebagian meyakini bahwa Allah sebagai pemilik absolut terhadap kehendak (*masyiah*) dan daya kemampuan (*istitha'ah*) sementara kemampuan daya yang dimiliki manusia tidak lebih dari sekedar makna metaforis (*majazi*) sementara sebagian lagi berpendapat bahwa Allah telah memberikan potensi akal bagi manusia oleh karena itu manusia memiliki hak menentukan hasil perbuatannya.

Aliran pemikiran pertama disebut *jabariyah* atau *fatalism-determinisme* sementara yang kedua *qadariyah* atau *free will* dan *free act-indeterminisme*. Dua pandangan ini bersifat ekstrim karena itu tidak sesuai dengan hakikat ilmu 'akidah. Memang Allah telah membekali setiap manusia dengan kehendak dan kemampuan akan tetapi semuanya tetap tergantung kepada Allah SWT. Oleh karena itu setiap orang harus mendayagunakan potensi akal dan tenaganya secara maksimal akan tetapi ketentuan akhir tetap menunggu dari Allah SWT. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa keadilan dan kebijaksanaan Allah selalu untuk kepentingan manusia dan layak untuk manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua doa yang dipohonkan oleh setiap orang akan diperkenankan Allah paling tidak dengan tiga pola: dipenuhi langsung sesuai dengan permohonan hamba, dipenuhi sesuai dengan permohonan hamba akan tetapi wujudnya mengalami penundaan; dan dipenuhi namun diganti oleh Allah sesuai dengan bentuk kebutuhan seorang hamba. Hal ini semua mengacu kepada firman Allah: *Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan sesuatu itu sia-sia* (Q.S. *Ali Imran* [3]: 91).

Selanjutnya, Allah Maha Adil atas segala ketetapanannya. Oleh karena itu, setiap orang selalu tidak memiliki nasib yang sama sekalipun mereka orang kembar datang dari orangtua yang sama. Salah satu perbedaan ketetapan Allah yang diterima manusia adalah perbedaan usia ada yang meninggal pada usia muda, remaja, orangtua dan ada yang berusia lansia. Memang berusia lansia memiliki persoalan tersendiri oleh karena itu disebut Al Qur'an dengan hidup yang mudah, rendah (*ardzal al 'umur*). Seseorang yang mencapai usia lansia hendaknya tidak menyesali nasibnya oleh karena setiap orang memiliki nasib sendiri-sendiri dan tidak selayaknya dibanding-bandingkan dengan orang lain.

Format keimanan itu hendaklah memenuhi enam aspek yang kemudian disimpulkan menjadi tiga yaitu pengetahuan dasar (*ma'rifat al mabda'*) mencakup pengetahuan terhadap Allah; kedua pengetahuan terhadap perantara (*ma'rifat al wasithah* atau *nubuwwah*) mencakup percaya kepada malaikat pembawa risalah, kitab suci sebagai kumpulan wahyu dan rasul penerima dan penyampai wahyu kepada umat manusia; dan, ketiga pengetahuan terhadap hari kemudian yang diperoleh melalui informasi yang disampaikan oleh wahyu (*ma'rifat al ma'ad* atau *ma'rifat al sam'iyat*) yaitu percaya akan adanya hari kemudian sebagai hari berbangkit dan adanya ketentuan hukum Allah yang tidak boleh diingkari manusia yaitu *qadla* dan *qadar*.

Ibadah

Sebagai seorang makhluk hendaklah mensyukuri nikmat Allah yang dianugerahkannya kepada hamba-hambanya. Nikmat Allah yang diperoleh manusia tidak terkira banyaknya baik yang sudah diterima, sedang diterima maupun yang akan diterimanya. Oleh karena itu manusia selayaknya menyampaikan ucapan puji dan syukur kepadaNya. Allah berjanji: *Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahukan apabila kamu mensyukuri nikmatnya maka niscaya akan ditambah lagi akan tetapi apabila kamu mengingkarinya sesungguhnya azab-Ku sangat keras.* (Q.S. Ibrahim [14]: 7).

Dalam rangka pelaksanaan mengucapkan syukur kepada Tuhan bermacam cara telah ditempuh oleh manusia. Pada masyarakat bersahaja telah mengenal cara bersyukur kepada Zat Yang Maha Kuasa melalui sejumlah upacara yang disebut ritus. Akan tetapi oleh karena mereka belum menerima wahyu, maka bentuk pernyataan syukur itu dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari kekuatan gaib itu. Hal ini bermula dari pandangan bahwa semua isi alam semesta ini memiliki kekuatan dan di antara kekuatan-kekuatan itu ada yang mengendalikan kehidupan manusia. Bermacam cara dan istilah untuk melukiskan kekuatan gaib itu antara lain hantu, gendruo, begu dan lain sebagainya. Hal ini merupakan pertanda manusia tidak dapat melukiskan kekuatan gaib itu. Oleh karena yang gaib itu digambarkan sebagai perusak, penghancur maka citra yang terbentuk adalah sebagai kekuatan angkara murka yang harus dilakukan berbagai upaya menjauhinya dengan menggunakan berbagai mantera, jimat, jampi-jampi dan lain sebagainya.

Islam mengajarkan bahwa hubungan seorang hamba kepada Allah seharusnya dilandasi oleh rindu, sayang dan cinta kepadaNya karena Allah juga sangat menyayangi hambaNya. Sebagai contoh kasih sayang Allah adalah Allah melipatgandakan amal perbuatan baik dengan sepuluh pahala sementara amal yang buruk ditunda pencatatannya sambil menanti seorang hamba tersebut menyesali perbuatannya serta memohon ampun kepadaNya. Jadi gambaran Allah kejam terhadap hambaNya sangat tidak berdasar. Oleh karena itu sikap yang terbaik bagi seorang hamba kepada Tuhannya adalah mendekatkan diri sedekat-dekatnya melalui tata cara yang sudah diatur yang disebut dengan ibadah. Dengan demikian makna ibadah adalah pendekatan diri kepada Allah (*al taqarrub ila Allah*). Terdapat dua prinsip perilaku manusia di alam semesta ini. Apabila ada sesuatu yang belum ada hukumnya maka hal itu hukumnya boleh (*al ashl fi al asya' al ibadah*) sedang hukum asal pada penyembahan adalah haram kecuali yang sudah diajarkan (*al ashl fil 'ibadat al tahrin*). Prinsip pertama menunjukkan keluasan ajaran agama yang memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengembangkan potensi dirinya dalam membangun sikap budaya. Dengan cara seperti itu maka manusia dapat melakukan sintesa antara agama dengan kehidupan betapapun terjadinya dinamika kehidupan sebagai akibat perubahan ruang dan waktu. Hal ini tentunya dipahami sebagai bagian dari respon manusia terhadap hubungan secara horizontal.

Sebaliknya tata cara hubungan vertikal harus memenuhi prinsip tauhid yaitu pengesaan Allah SWT. Manusia tidak mungkin mengetahui tata cara pendekatan diri kepada Allah kecuali ada aturan yang bersifat metafisis yaitu wahyu dari Allah. Oleh karena itu manusia tidak boleh merekayasa ibadah sesuai dengan seleranya karena Allah telah memberikan bimbingan aturan beribadah sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW: *solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat*. Bentuk ibadah yang diajarkan Rasul kepada umatnya disebut ibadah yang terbagi ke dalam dua hal: *ibadah mahdlah* yaitu ibadah yang dapat dilihat dari format luarnya seperti salat, puasa, zakat, haji, sedekah, membaca Al Quran, dan *ibadah ghairu mahdlah* yaitu jenis ibadah yang hanya bisa dikelompokkan sebagai ibadah setelah mengetahui niat yang melandasi motivasi mengerjakan sesuatu. Oleh karena ibadah pola kedua ini tidak memiliki format yang baku maka seluruh pekerjaan maupun

sikap manusia dapat dikategorikan sebagai *'ibadah ghairu mahdlah* setelah mengetahui motivasinya berbuat.

Idealnya seluruh rangkaian kehidupan manusia termasuk kategori ibadah. Untuk memenuhi hal tersebut tidak memadai apabila yang disebut ibadah apabila hanya mengerjakan rukun Islam yang lima yaitu syahadat, salat, puasa, zakat dan haji karena tidak semua Rukun Islam itu dilaksanakan secara berkelanjutan kecuali salat. Oleh karena itu, untuk memenuhi misi kemanusiaan sebagai hamba Allah maka selayaknya setiap hamba menjadikan seluruh gerak langkah kehidupannya dijadikan sebagai ibadah. Untuk itu, tentunya setiap orang termasuk lansia hendaklah mengisi seluruh kehidupannya selalu bertujuan untuk mencari keridaan Allah. Islam tidak memisahkan urusan dunia dengan akhirat. Wilayah yang menjadi kawasan ibadah dalam Islam adalah seluas kehidupan manusia mulai dari soal amat sederhana mengangkat duri yang dapat mengganggu perjalanan orang sampai kepada perjuangan yang tertinggi yaitu menegakkan kebenaran dan berjuang di jalan Allah. Hal itulah yang menyebabkan tidak ada sedikit pun bagian dari proses perjalanan kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam.

Orang miskin yang tidak memiliki apa-apa kecuali tekad untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah berpeluang menjadi orang yang bertakwa. Sama dengan itu, orang kaya yang membelanjakan hartanya di jalan Allah juga berpeluang menjadi orang yang bertakwa pula. Apabila orang kaya dapat menunaikan ibadah haji dengan bermodalkan hartanya maka orang fakir dan miskin dapat juga menikmati pelaksanaan ibadah haji dan berhari raya dengan menjalan ibadah salat jumat. Demikianlah prinsip kesetaraan diberikan Allah kepada semua umat manusia yang meyakinkan dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada seluruh manusia agar selalu bertindak efektif dan efisien terhadap nikmat usia yang diberikan Allah agar selalu dipergunakan pada jalan kebaikan. Demikianlah beberapa bagian kecil dari tuntutan agama khususnya Islam dalam mengisi perjalanan hidupnya.

Hal ini merupakan kebalikan cara pandang barat tentang kehidupan terutama pemenuhan kebutuhan lansia. Barat hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik belaka seperti kesehatan serta jaminan hidup berupa pensiun. Hal itu bukan tidak penting akan tetapi idealnya

pola hidup yang baik itu adalah terpenuhinya kebutuhan duniawi yang dipadu dengan pemenuhan kebutuhan ukhrawi. Oleh karena itu, para lansia dapat didorong untuk dapat mengisi seluruh sisa kehidupannya dengan melaksanakan ibadah. Baik ibadah yang tergolong wajib seperti Rukun Islam di atas maupun ibadah yang bersifat anjuran (*sunat*) sehingga kesibukan beribadah ini akan membuat mereka semakin positif dalam memandang seluruh perjalanan kehidupan.

Akhlak

Akidah adalah pernyataan seseorang dalam hatinya bahwa ia meyakini Allah SWT dan selanjutnya ibadah adalah upaya pendekatan diri kepadaNya. Dua hal ini lebih tepat dikatakan titik beratnya masih dalam kaitan hubungan manusia terhadap Tuhannya. Akan tetapi apabila dua hal ini tidak lagi sekedar berada wujud simbolik akan tetapi telah memasuki wilayah yang terdalam dari jiwa manusia yaitu membangun hubungan sebaik-baiknya dengan semua makhluk, maka hal itulah buah dari keimanan dan keislaman. Dalam pengertian lain hal ini disebut akhlak. Pengertian akhlak adalah seseorang kembali kepada asal kejadiannya sebagaimana yang telah disebut dimuka yaitu sebagai karya puncak Tuhan. Memang dalam kenyataannya akhlak juga disebut perangai yang terbagi dua: *akhlaq al mahmudah* dan *akhlaq al mazmumah*. Yang disebut pertama adalah perangai seseorang yang sungguh baik dan terpuji karena dalam dirinya selalu dikendalikan oleh kesadaran kehati-hatian (*muraqabah*) karena sangat khawatir apabila terlanjur berbuat salah baik terhadap Allah maupun kepada manusia. Sikap seorang yang terlanjur berbuat salah (*akhlaq al mazmumah*) tidak ada jalan lain kecuali segera menyesali perbuatannya (*taubat*) dan memohon ampunan kepada Allah atas tinadaknya yang menyimpang dari kehendak syari'at.

Dasar akhlak adalah bersumber pada nas Al Quran dan Al Hadits hal ini disebabkan karena tidak selamanya akal manusia mampu menjangkau wujud dari akhlak yang baik itu kecuali melalui tuntutan wahyu. Berbeda dari norma dan tradisi yang hanya mendasarkan pada kebiasaan serta ketentuan yang berlaku di masyarakat. Akhlak dasarnya adalah ketentuan wahyu. Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya: orang yang menjadi pilihan di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di antara akhlak yang terpuji itu adalah selalu merasa rindu dan ingin mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam rangka menuju kesana maka seorang yang berakhlak senantiasa memelihara silaturahmi dengan semua orang tanpa membeda-bedakan seseorang berdasar agama dan sukunya. Oleh karena itu dalam prinsip persaudaraan ini, Islam mengajarkan tiga hal: saudara sesama muslim (*ukhuwah islamiyah*), saudara sebagai sesama warga masyarakat maupun bangsa (*ukhuwah wathoniyah*) dan saudara dalam pergaulan yang universal tanpa membedakan ideologi dan geografisnya (*ukhuwah basyariyah*).

Tugas Komnas Lansia

Dalam rangka meneguhkan sikap pemerintah dan bangsa terhadap pelayanan kepada kelompok lansia, maka pemerintah bersama DPR RI telah melahirkan Undang Undang No. 13 Tahun 1999 yang isinya antara lain berisi ketentuan untuk membentuk Komisi Nasional Lanjut Usia. Sebagai kelanjutan UU itu, maka Menteri Sosial mengeluarkan Surat Keputusan yang berisi pengangkatan anggota Komnas lansia yang terdiri dari unsur pemerintah termasuk wakil dari Departemen Agama dan masyarakat. Adapun langkah pembinaan yang perlu dilakukan oleh Komnas lansia khususnya dalam pembinaan kehidupan beragama para lansia adalah sebagai berikut.

Pertama, menyediakan sarana komunikasi baik secara online, email, dialog interaktif guna menampung keluhan para lansia yang menginginkan adanya solusi yang bersifat pendekatan religius dari tokoh-tokoh agama sesuai dengan agama yang dianut oleh lansia. Ketika penulis masih tercatat sebagai anggota lansia, hal ini sudah disepakati bersama oleh seluruh pengurus untuk segera ditindaklanjuti. Para lansia yang menjadi partisipan dialog interaktif ini tidak hanya mereka yang berada di panti jompo (*home care*) tetapi juga yang masih segar bugar dan berada di rumah masing-masing namun ingin memperoleh santunan berupa bimbingan spritual tentang berbagai persoalan di seputar kehidupan lansia.

Kedua, Komnas lansia membangun jaringan hubungan dengan majelis-majelis agama di Indonesia antara lain MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi, MATAKIN agar majelis agama dapat menyumbangkan wakil majelisnya untuk melakukan kunjungan secara terjadwal kepada panti-

panti jompo untuk menyerap berbagai aspirasi serta keluhan batin yang dialami oleh lansia. Sehingga dengan demikian, para lansia tidak merasa sebagai orang yang terasing dari lingkungan maupun keluarganya.

Ketiga, Komnas lansia dapat mendorong kesadaran di kalangan keluarga lansia agar tidak melepaskan tanggung jawab perawatan lansia karena sudah diserahkan kepada panti penampungan lansia. Dalam beberapa kasus yang terjadi ditemukan adanya keluarga bahkan anak dari lansia yang sama sekali tidak memberikan perhatian kepada orangtuanya. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak dari lansia tidak menjadi anak yang lupa berterima kasih dan berbakti kepada orangtuanya yang sudah memasuki usia tua.

Keempat, Komnas lansia hendaknya dapat bekerjasama dengan Direktorat Bimas Agama-Agama di Departemen Agama demikian juga digugah perhatian dari kalangan penerbit agar dapat menyediakan buku-buku yang berisi uraian ringan tentang tuntutan keberagamaan untuk mendorong agar lansia tetap menjadi kelompok masyarakat yang mensyukuri nikmat panjang umur yang dianugerahkan Allah kepadanya.

Semoga bermanfaat terutama bagi peningkatan peran Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama ikut memperhatikan kehidupan para lansia di Indonesia yang jumlahnya semakin bertambah dari waktu ke waktu.***

Pembinaan Keagamaan Lanjut Usia di PSTW Bhakti Yuswa, Lampung: Partisipasi dan Koordinasi

M. Yusuf Asry

*Peneliti Utama pada
Puslitbang Kehidupan
Keagamaan, Badan Litbang
dan Diklat Departemen
Agama.*

Abstract:

Aging process occurs naturally, resulting in the elders that experience physical and welfare degradation. One of the welfare aspects that needs to be improved based on the constitution is the religious sector, spiritual, and mental. Ideally, the elders should be closer to religion. But in reality there are numerous problems indicated by the lack of awareness from the elders to participate in teaching/pengajian guidance and congressional jamaah prayer. Based on this research there are several issues within the guidance process. The religious guidance doesn't reflect the elders direct needs according to their specific characteristic, lack of participation from the elderly, and the absence of legal basis for coordination between institutes that are involved in the practical level. Therefore, it is interesting to reveal how religious life of the elderly in elder care through a case study, entitled: "Religious life Guidance of the elders in Tresna Werdha elder care", a case study in Bhakti Yuswa Lampung Province.

Keyword: *Religious assistance, the elder, participation, coordination, Tresna Werdha Social care*

Pendahuluan

Pada tahun 2010 yang akan datang, penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia diperkirakan mencapai 24 juta jiwa atau 9,77% (BPS yang dikutip Departemen Sosial RI, 2007 : 1). Pada waktu bersamaan Usia Harapan Hidup (UHH) juga rata-rata 67,4 tahun (BPS dalam Siska Rati, 2007 : 3). Jumlah tersebut menunjukkan di satu sisi sebagai wujud keberhasilan bangsa dalam mensejahterakan rakyat, tetapi di sisi lain menimbulkan permasalahan yang makin kompleks dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bidang sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan nasional.

Upaya menghadapi permasalahan lansia dalam undang-undang ialah dengan meningkatkan kesejahteraannya (UU No. 13 Tahun 1998, Pasal 8). Salah satu aspek kesejahteraan tersebut adalah di bidang agama dan mental spiritual (UU No. 13 tahun 1998 pasal 11.a dan 12.a; PP No. 43 tahun 2004 pasal 3.1.a dan 2.a, pasal 6 dan 7; dan Kepmensos No.4/PRS-3/KPTS/2007) poin D.5 dan C.2.e). Paling tidak terdapat dua indikator utama dalam tulisan ini untuk melihat keberhasilan pembinaan keagamaan lansia di Panti, yakni partisipasi lansia dalam kegiatan pembinaan keagamaan dan partisipasinya dalam shalat wajib berjamaah.

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, tampak tingkat partisipasi lansia pada kedua bidang dimaksud masih sangat rendah. Oleh karena itu, menarik diungkapkan, kehidupan keagamaan lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) dengan pendekatan studi kasus.

Pertanyaan penelitian dalam studi kasus sesuai kelaziman digunakan kata kunci “bagaimana” dan “mengapa” (Robert K. Yin, 1987, Terjemahan M. Djauzi Mudzakir, 1996 : 29), maka permasalahannya dirumuskan, yaitu: (1) Bagaimana pembinaan kehidupan keagamaan lansia di Panti saat ini, dan yang diharapkan? (2) Bagaimana koordinasi kerjasama dalam pembinaan kehidupan beragama bagi lansia di Panti, dan peningkatan yang diinginkan?

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjawab dua permasalahan atau pertanyaan penelitian tersebut. Hasilnya, merupakan masukan

bagi pengambil kebijakan (*decision making*) dan pengguna (*users*) dalam meningkatkan kehidupan keagamaan lansia yang spesifik sesuai karakteristik kebutuhan lansia.

Konsep, Metodologi dan Kerangka Pemikiran

Telaah Konsep

Sebelum dikemukakan konsep penelitian terlebih dahulu dipaparkan telaah kepustakaan dan hasil penelitian. Paling tidak ditemukan dua referensi. Pertama, hasil penelitian *Pembinaan Kehidupan Beragama Lanjut Usia* oleh Departemen Agama, yang dalam hal ini oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Beragama pada tahun 2000. Kedua, hasil penelitian Siska Rati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (UNILA), dengan judul *Faktor-faktor Penyebab Lanjut Usia Dilembagakan* (2007) di Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa, Lampung. Dari hasil penelusuran diketahui adanya sisi lain yang belum terungkap, yaitu pembinaan keagamaan yang spesifik sesuai karakteristik kebutuhan lansia, dan format koordinasi kerjasama dalam pembinaan. Penelitian mengenai kedua aspek tersebut tentu akan melengkapi hasil penelitian sebelumnya.

Konsep-konsep yang digunakan dalam tulisan ini meliputi: pembinaan, pembinaan keagamaan, lanjut usia, lanjut usia terlantar, partisipasi, koordinasi, Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW).

Pembinaan berasal dari kata "*binaa*" (bahasa Arab), yang berarti antara lain membangun (Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, 1996: 355). Membangun ialah mendirikan atau pembaharuan menuju perbaikan (WJS Peorwadarminta (1976: 87-88 dan 141). Pembinaan di sini ialah membangun dalam upaya perbaikan.

Pembinaan keagamaan ialah membangun suatu tatanan kehidupan menuju keadaan yang lebih baik sesuai ajaran agama. Lanjut Usia ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Lanjut usia terlantar ialah lansia yang tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan, bahkan tidak mempunyai sanak saudara/keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak (Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2007: 16).

Partisipasi ialah peran aktif dalam suatu kegiatan. Partisipasi lansia dalam penelitian ini ialah peran aktif lansia di Panti dalam aktivitas pembinaan agama/pengajian dan pelaksanaan peribadatan berjamaah. Koordinasi ialah kegiatan memantau, mendorong dan melaporkan pelaksanaan suatu program.

Panti Sosial Tresna Werdha atau Panti Sosial Lanjut Usia yang disingkat PSTW ialah lembaga sosial lanjut usia berbasis panti yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, dan yang mempunyai berbagai sumber daya guna untuk mengantisipasi dan merespon kebutuhan lansia.

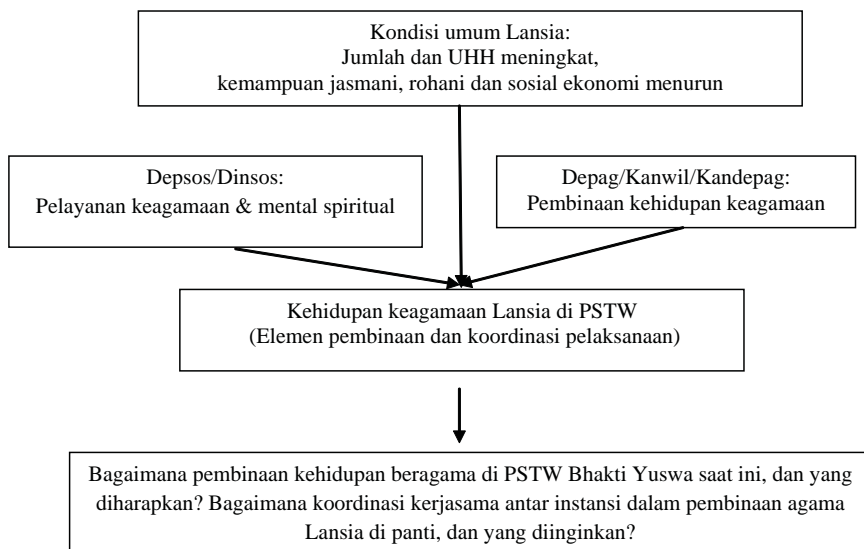
Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam tulisan ini, elemen pembinaan agama mengacu kepada teori unsur dakwah menurut M. Munir dan Wahyu Ilaihi dalam bukunya *Manajemen Dakwah* (2006: 21-34). Elemen pembinaan agama yang dimaksud: (1) Pembina agama (*da'i*/pelaku pembinaan), (2) Penerima binaan agama (*mad'u*/sasaran binaan), (3) Mareri pembinaan agama (*maddah*/pesan binaan), (4) Media pembinaan agama (*wasilah*/media pembinaan), (5) Metode pembinaan agama (*thariqah* pembinaan/ teknik pembinaan), dan (6) Efek pembinaan agama (*atsar*/pengaruh pembinaan). Untuk melengkapi penjelasan disajikan secara khusus tentang pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan (*taujih*/aktualisasi).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, maka dirumuskan hipotesis kerja, bahwa pembinaan kehidupan keagamaan lansia di Panti yang dilakukan secara spesifik sesuai karakteristik kebutuhannya pada elemen pembinaan secara terkoordinasi, maka hasilnya dapat meningkatkan partisipasi lansia dalam aktivitas pembinaan dan shalat wajib berjamaah. Alur pikir yang digunakan, sebagai berikut:

Gambar 1

Alur Pikir Penelitian



Metodologi Penelitian

Fokus kajian ialah lansia di Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Bhakti Yuswa Provinsi Lampung. Panti ini menampung lansia yang terlantar. Unit analisis dalam penelitian ini ialah pembinaan kehidupan keagamaan.

Kegiatan ini sebagai studi kasus meneliti kejadian khusus dalam berbagai aspek individu, kelompok, program, organisasi atau peristiwa secara sistematis, menyeluruh dan mendalam tentang kehidupan keagamaan lansia di Panti, dan koordinasi instansi terkait dalam pembinaan saat ini, dan yang diharapkan ke depan.

Sumber Bukti Studi kasus dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr Robert K. Yin, peneliti kualitatif dari Massachusetts Institute of Technology, USA dalam bukunya *Case Study Research: Design and Methods* (1987), yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh M. Djauzi Mudzakir *Studi Kasus: Disain dan Metode* (1996

: 103-118), yaitu: 1. Dokumentasi, 2. Rekaman arsip, 3. Wawancara, 4. Observasi, dan 5. Perangkat fisik. Wawancara dilakukan dengan pembina keagamaan dan pengelola Panti, para lansia, pejabat terkait di Dinas Sosial dan Kanwil Departemen Agama, pimpinan organisasi Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan Komnas lansia

Data dianalisis dengan mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Robert K. Yin yang terdiri dari tiga teknik. Pertama, penjadwalan pola; kedua, pembuatan penjelasan dan ketiga, deret waktu (Robert K. Yin, 1997: 133-167). Tahap analisis mengacu pada pendapat Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap. *Pertama*, reduksi data (seleksi dan penyederhanaan). *Kedua*, penyajian data (*display*) disusun narasi. *Ketiga*, penarikan kesimpulan/verifikasi (Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, 1992: 15-18). Bagian terakhir dirumuskan implikasi dan rekomendasi penelitian.

Pembinaan Kehidupan Keagamaan Lanjut Usia

Profil PSTW Bhakti Yuswa

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Bhakti Yuswa memulai kegiatan 1 April 1980. Semula, bernama Panti Jompo Dinas Sosial Tingkat I Lampung, beralamat di Gunung Sulah, Kecamatan Kedaton, Lampung. Melalui Proyek Bantuan dan Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) Kantor Wilayah Departemen Sosial (saat ini Dinas Sosial) dibangun PSTW Bhakti Yuswa pada tahun anggaran 1979/1980. Hal yang melatarbelakangi didirikan Panti Jompo, yang berganti nama PSTW Bhakti Yuswa ini ialah karena jumlah dan permasalahan lanjut usia makin kompleks, selain perlindungan dibutuhkan perawatan (Leaflet, Dinkesos Prov. Lampung, t.th :1).

PSTW Bhakti Yuswa telah memiliki visi dan misi. Visinya ialah "Terwujudnya lanjut usia bahagia dan sejahtera di hari tua". Dari visi tersebut dirumuskan misi: (1) Meningkatkan mutu pelayanan sosial lanjut usia, (2) Meningkatkan jaminan sosial dan perlindungan kepada lanjut usia, (3) Meningkatkan hubungan yang harmonis antara sesama lanjut usia, petugas dan masyarakat.

Tugas pokok PSTW Bhakti Yuswa ialah "memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia berupa: penampungan dan

jaminan hidup". Sedangkan fungsinya ialah: (1) Pengganti keluarga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, (2) Pusat informasi usaha kesejahteraan sosial Lanjut Usia, dan (3) Pemberian konsultasi baik kepada perorangan, kelompok masyarakat maupun lembaga dalam hal penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia. Tujuan pelayanan sosial di PSTW Bhakti Yuswa ialah "terpenuhinya kebutuhan hidup lanjut usia terlantar, baik jasmani maupun rohani dan sosial dengan baik".

Dari segi fisik, PSTW Bhakti Yuswa ini berkembang pesat. Pada tahun anggaran 1979/1980, melalui Proyek Bantuan dan Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) Kantor Wilayah Departemen Sosial dimulai pembangunan fisik sebanyak 3 (tiga) wisma, masing-masing berkapasitas 10 orang. Semua lansia tersebut pindahan dari Panti Jompo di Gunung Suluh. Pada tahun anggaran 1980/1981 dibangun 2 (dua) wisma lagi, tahun 1982 dibangun 3 (tiga) wisma, dan pada tahun 1983 dibangun 2 (dua) wisma. Seluruhnya 10 wisma, dengan daya tampung tiap wisma sepuluh lansia. Ketika penelitian ini dilakukan, lansia yang ditampung sebanyak 105 orang.

Sarana fisik PSTW Bhakti Yuswa ini meliputi: luas tanah 10.950 M², bangunan yang telah ada: Kantor (360 M²), wisma 10 unit (1.200 M²), ruang kerja (70 M²), aula (250 M²), rumah dinas tipe D (50 M²), rumah dinas tipe E 2 unit (36 M²), dapur umum (113 M²), Mushalla Al Kautsar (113 M²), ruang isolasi I (100 M²) dan II (36 M²), gazebo 3 unit, ruang jenset (12,6 M²), Gardu Satpam (30 M²), permandian jenazah (30 M²), gudang (50 M²), tanah makam khusus (2.400 M²), jalan ke makam 585 M², dan alat transportasi, yaitu kendaraan roda 4 (mobil ambulance) dan roda 2, masing-masing 1 unit. Denah bangunan pada lampiran 1. Panti ini cukup memadai, dengan daya tampung 150 lansia.

Dalam pola program pelayanan, menurut Kepala PSTW ini, semula hanya terdapat pola reguler. Namun, dibawah kepemimpinan Merah Hasan Ilyas, SH dikembangkan pola pelayanan *day care*, *home care* dan program khusus.

Pola reguler ialah lansia ditampung dan dilayani di Panti sepanjang hari. Lansia dalam pola ini berjumlah 105 orang. Kegiatannya meliputi: pelayanan sosial melalui konsultasi sosial, hiburan dan rekreasi; pelayanan

fisik melalui penyediaan menu makanan sesuai dengan kalori yang dibutuhkan, pelayanan kesehatan, pakaian, sarana dan prasarana hidup sehari-hari dan kegiatan olah raga. Pelayanan mental keagamaan adalah memperkuat mental/spiritual dan rohani lansia dalam melaksanakan peribadatan, serta penyediaan sarana dan prasarana ibadah; pelayanan keterampilan mengisi waktu luang dan juga untuk mempertahankan keterampilan, seperti membuat tasbih, telur asin, menganyam, menanam bunga, dan berkebun; dan pelayanan melalui pendampingan.

Pola *day care* merupakan pelayanan harian diluar panti lansia tinggal bersama masing-masing keluarganya. Jumlah pesertanya 30 orang. Lansia ini dihadirkan di Panti dua kali dalam sebulan, baik datang sendiri atau dijemput. Kegiatan di Panti sekitar delapan jam, dari pukul 07.00 hingga 14.00 wib. Pelayanan yang diberikan sama seperti terhadap lansia reguler. yaitu pemeriksaan kesehatan dan permainan/hiburan seperti keroncong, dan pembinaan mental dan agama. Layanan konsumsi diberi makanan ringan (*sneack*) dan makan siang bersama. Tiap pertemuan diperlukan dana diluar APBN dan APBD sekitar Rp 400.000,-

Pola *home care*, yaitu pelayanan terhadap lansia yang tinggal bersama keluarga atau non Panti. Petugas dari PSTW mengunjungi lansia di tempat atau keluarga masing-masing, sekali dalam sebulan. Kegiatan konsultasi meliputi: kesehatan, bimbingan sosial keagamaan, bantuan sosial biasanya dalam bentuk beras 2 kg, supermie 10 bungkus, dan khusus pakaian muslim dibagi sekali tiap tahun, yaitu bagi lansia laki-laki dan perempuan.

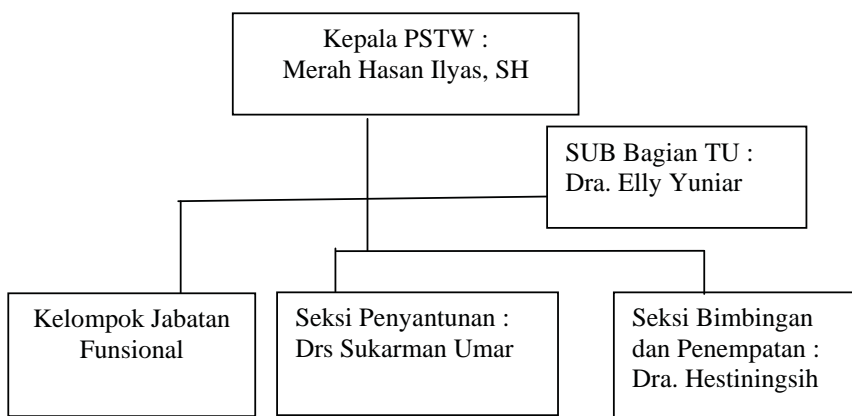
Pola khusus yaitu lansia dititipkan di Panti, dengan biaya ditanggung oleh keluarga perbulan Rp. 750,000,- Kegiatan untuk pola ini sama dengan pola reguler hanya makan dan keperluan lainnya dilayani oleh petugas khusus "pramuwerdha" yang juga tinggal bersama lansia di Panti. Peserta pola ini baru 2 (dua) orang. Pada pola khusus ini berlaku pelayanan sosial dan keagamaan seperti dalam pola reguler.

Dari segi Organisasi, PSTW Bhakti Yuswa, semula merupakan unit Pusat (Departemen Sosial) melalui Kanwil Departemen Sosial Provinsi Lampung. Namun dengan Peraturan Daerah No.17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, dan Keputusan Gubernur No. 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja UPDT pada Dinas-Dinas Provinsi Lampung, maka status Panti Kanwil Depsos menjadi PSTW Bhakti Yuswa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPDT) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.

Gambar 2

Struktur Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa, Provinsi Lampung



Sumber: Keputusan Gubernur Lampung No. 3 tanggal 09 Februari 2001.

Sumber daya manusia Panti ini sebanyak 29 karyawan (20 orang PNS dan 9 orang pegawai tenaga teknis harian lepas (PTHL). Dari pendidikan terdiri dari : 5 Sarjana (S1), 2 Sarjana Muda, 13 lulusan SLTA, dan seorang lulusan Sekolah Dasar (SD). Selain itu terdapat tenaga penunjang, yaitu dokter dari Puskesmas Kecamatan Natar, juru masak, Satpam, dan tukang kebun. Staf pelaksana khusus pada Seksi Bimbingan dan Penempatan ditugasi untuk pembinaan mental agama ialah Ahmad Chudori, lulusan SMA, Pengatur Tingkat I (II/d).

Pembina Agama

Pembina agama (*da'i*) di PSTW Bhakti Yuswa 2 (dua) orang, yaitu ustadz Ahmad Chudori dan Beni. Chudori Lahir di Purworejo, Jawa Tengah, usia 53 tahun, pendidikan lulus SMA, pekerjaan sebagai pegawai

negeri sipil (PNS) di PSTW Bhakti Yuswa sejak tahun 1982, dan pernah “nyantri” di Pondok Pesantren Watucongol, Magelang, Jawa Tengah. Beni lahir di Kalianda, Lampung Selatan, usia 29 tahun, pendidikan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tebuireng. Bekerja sebagai guru agama di sekolah swasta Lampung Selatan. Di samping itu, pernah juga menjadi pembina agama di Panti ini ialah Abidin, warga masyarakat sekitar, lahir di Kedondong, Lampung Selatan, usia 48 tahun, pendidikan lulusan Sekolah Dasar (SD), dan mantan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

Salah satu persyaratan tenaga rohaniawan di Panti ialah “Latar belakang pendidikan minimal S1” (Keputusan Menteri Sosial RI No. 4 tahun 2007 tentang *Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam Panti* Bagian C “Ketenagaan”, poin 2 tentang Tenaga Teknis poin e Tenaga Rohaniawan, Depsos RI, 2007: 36). Sedangkan kedua tenaga pembina agama di Panti ini hanya memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) dan Madrasah Aliyah. Namun, dari segi pengetahuan dan pengalaman keagamaan, keduanya pernah belajar agama “nyantri” di pondok pesantren.

Penerima Binaan Agama

Penerima binaan agama (*mad'u*) di sini ialah lansia penghuni atau yang ditampung di PSTW Bhakti Yuswa. Lansia masuk Panti karena terlantar, yang umumnya diantar oleh seseorang. Kebanyakan diserahkan oleh pihak Kepolisian, Pamong atau Kepala Kampung. Namun juga terdapat beberapa lansia diantar seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya. Ada yang diantar hingga jalan masuk pintu gerbang Panti, bahkan ada juga yang datang sendiri.

Dalam catatan staf Panti sekaligus tenaga Pembina Agama, para lansia dari segi etnis umumnya berasal dari suku Jawa dan Bali, serta beberapa orang dari suku atau daerah lain seperti Palembang, dan ada pula dari penduduk asli Lampung sebanyak tujuh orang. Dari segi agama, semuanya tercatat penganut Islam, kecuali empat orang yang beragama Kristen/Katolik.

Lansia di dalam Panti hanya mengikuti dua program, yaitu reguler dan khusus. Dalam pola reguler, terdapat 105 orang, terdiri dari Laki-laki

40 orang dan perempuan 65 orang (daftar nama terlampir). Lansia ini dipanggil “mbah”, yaitu mbah lanang untuk lansia laki-laki, dan mbah putri untuk lansia perempuan. Kata mbah berasal dari bahasa Jawa yang dimungkinkan penggunaannya karena hampir seluruh lansia di Panti ini berasal dari pulau Jawa, yaitu: etnis Jawa, Sunda dan Bali. Dari etnis asli Lampung sebanyak tujuh orang. Dalam pola khusus, lansia yang dititipkan oleh keluarganya di Panti. Hingga saat ini hanya berjumlah dua orang yang dilayani dan dirawat oleh seorang *Pramu Wedha*, termasuk makanan sehari-hari. Sedangkan fasilitas lainnya memperoleh pelayanan yang sama bersama lansia pola reguler lainnya. Biaya hidup lansia ini perbulan Rp. 750.000,-. Dalam hal ini, termasuk jasa *pramu wedha* perbulan Rp. 300.000,-

Alasan para lansia masuk Panti ini berbeda-beda. Hj. Siti Aisyah (HSA) karena tidak punya anak, suami nikah lagi, kemudian meninggal dunia, tidak mampu lagi bekerja. Umiyati (UMT), tidak punya anak dan Saudara, dan anak angkat hidupnya susah, janda suaminya meninggal. Asmirillah (ASM) tidak dipedulikan oleh anak, mantu dan Saudara karena sibuk mencari nafkah sendiri-sendiri. Usaha tidak lancar, dan akhirnya menerima anjuran untuk masuk Panti. Fardi M (FM) ingin tidak merepotkan anak dan mantu karena hidupnya susah. (Sudri Suhadi bin Sunyat (SSS) tidak mampu lagi mencari nafkah hidup sendiri. Punya anak yang hidupnya juga susah. SMJ, tidak punya anak dan Saudara, duda cerai. Ismail (ISM) Duda cerai, punya anak tidak peduli orang tua, karena sibuk mencari nafkah sendiri. Sarini (SRN) janda, hidup sebatang kara, tidak punya anak, karena tidak nikah. Tidak punya Saudara. Siti Latifah (SLF) punya anak tidak peduli orang tua, hidupnya “susah”. Janda, karena suami meninggal dunia. Ruminah (RMN) punya anak meninggal semua (4 orang). Janda kerena suami meninggal dunia, keluarga dan keponakan tidak peduli.

Berdasarkan hal-hal di atas dan alasan yang diungkapkan dalam penelitian Riska Rati (2007), maka pada prinsipnya alasan lansia masuk Panti, yaitu karena hidup terlantar, disebabkan: (1) tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah hidup sehari-hari, (2) tidak mempunyai anak dan saudara, (3) mempunyai anak dan saudara, tetapi sibuk bekerja mencari nafkah hidup masing-masing, sehingga orang tua merasa tidak mendapat perhatian yang diharapkan. (4) status janda

atau duda karena salah satunya meninggal dunia, dan (5) perubahan nilai-nilai budaya dan pemahaman keagamaan membolehkan lansia terlantar masuk Panti.

Pada dasarnya, alasan para lansia masuk Panti karena terlantar dan atau tergolong dapat terlantar. Dari segi pendidikan tergolong rendah, karena rata-rata pernah hingga tamat Sekolah Rakyat (tingkat SD saat ini), pengetahuan agama rendah dan sejak dini umumnya belum terbiasa beribadah. Motivasi mengikuti pembinaan agama rendah hanya sekitar 6-10 orang, dengan alasan yang menonjol ialah “enggan”, “uzur” dan sakit-sakitan.

Materi Pembinaan Agama

Materi pembinaan agama (*maddah*) pada lansia meliputi: akidah, ibadah dan akhlak, serta belajar baca Al Qur’an, tahlilan/yasinan dan sholawatan. Dari segi porsi, terbanyak materi peribadatan, terutama ibadah shalat, wudhu’ dan penyelenggaraan jenazah. Materi akhlak berkisar seputar kisah para Nabi dan Sahabat, serta tokoh teladan, dan itu pun tidak sebanyak porsi materi peribadatan. Porsi materi akidah paling sedikit, karena diperlukan pengertian, penalaran, dan perenungan yang lebih mendalam, sehingga dirasa berat oleh lansia. Para lansia enggan materi pembinaan terkait dosa, ancaman siksa dan neraka, karena terkait hidup masa lalu yang jauh dari agama, bahkan ada yang mengaku “hidup selama ini tergolong melalaikan agama”.

Metode Pembinaan Agama

Metode pembinaan agama (*thariqoh*) yang biasa disebut dengan teknik atau cara berlaku seperti umumnya dalam pengajian, yaitu ceramah, tanya jawab, peragaan, praktik ibadah dan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Teknik yang paling dominan ialah ceramah. Teknik tanya jawab sebagaimana dikatakan ustadz Beni sangat jarang digunakan karena lansia “enggan” bertanya dan cenderung menerima apa adanya. Praktik ibadah berkisar seputar cara berwudhu’, tata tertib shalat, dan penyelenggaraan jenazah. Dalam praktik ini, kadangkala digunakan alat peragaan.

Media Pembinaan Agama

Media pembinaan agama (*wasilah*) ialah dalam bentuk sarana dan tempat pembinaan. Sarana dan prasarana cukup tersedia, dengan mengambil tempat di Mushalla Al Kautsar dengan daya tampung sekitar 60 (enam puluh) orang shalat berjamaah dan atau kegiatan pembinaan. Sarana pembinaan agama di Panti ini memenuhi standar minimal seperti tersebut dalam *Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam Panti*, yaitu peralatan ruang ibadah meliputi: sound system, karpet/tikar, lemari tempat Al Qur'an dan lemari tempat mukena. Hanya Kitab suci Al Qur'an tersedia beberapa buah saja, termasuk buku tahlilan/yasinan, dan buku pelajaran baca tulis Al Qur'an (*Iqra'*).

Efek Pembinaan Agama

Efek pembinaan agama (*atsar*) dapat dilihat dari pelaksanaan agenda dan jadwal pembinaan, pengetahuan yang mampu dicerna oleh yang dibina dan pengamalannya. Dalam efek pembinaan terdapat tolak ukur dalam format laporan kemajuan kelayan, yaitu dari segi tingkat disiplin kerajinan shalat wajib lima waktu berjamaah di Mushalla Al Kautsar, dan keikut-sertaan dalam pembinaan agama tiap hari Senin, Selasa dan Kamis belum mencapai harapan. Jamaah shalat hanya sekitar empat hingga 10 orang, dan yang ikut pembinaan sekitar 8 hingga 12 orang dari 101 orang yang beragama Islam. Rendahnya partisipasi lansia mengikuti kegiatan tersebut, sebagai faktor utama yang diungkapkan ialah "enggan", "sakit-sakitan", "bosanan", dan "malu tidak tau agama dan takut dipermalukan didepan jamaah lainnya".

Pelaksanaan Pembinaan Agama

Tujuan dan kegiatan pembinaan agama mengacu pada Pedoman Pelayanan lansia di Panti yang ditetapkan oleh Menteri Sosial (Depsos, 2007: 23-24). Pengurus Panti menjabarkannya dalam program disertai jadwal pembinaan rutin. Dalam Pedoman disebutkan, bahwa bimbingan mental spiritual dan kerohanian merupakan upaya yang dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi mental-spiritual dan kerohanian klien.

Tujuannya bimbingan keagamaan ialah (1) memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi mental-spiritual, (2) meningkatkan kesadaran dan motivasi melaksanakan ibadah, (3) menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran iman, tanggung jawab moral, dan pengembangan kepribadian klien.

Kegiatan pembinaan agama berintikan: bimbingan ibadah sehari-hari, pengajian, dan membaca Al Qur'an, yasinan dan tahlilan. Jadwal rutin, termasuk kegiatan agama tiap hari Senin, Rabu dan Kamis telah dibakukan, sebagai berikut:

Tabel 1

**Jadwal Kegiatan Pokok Rutin Klien Mingguan Lanjut Usia
di Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa
Provinsi Lampung**

No	Hari	Waktu	Kegiatan
1	Senin	09.00-10.00	<i>Pengajian</i>
2	Selasa	08.00-09.00	Pemeriksaan kesehatan
3	Rabu	09.00-10.00	<i>Pengajian</i>
4	Kamis	09.00-12.00	Keterampilan
		18.30-19.30	<i>Yasinan</i>
5	Jumat	07.00-08.00	Senam jantung sehat Gotong royong
6	Sabtu	08.00-09.00	Berkebun
7	Minggu	07.00-08.00	Berkebun

Sumber: Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa, 1 Mai 2008.

Adapun kegiatan harian klien Lanjut Usia, sebagai acuan disusun dalam jadwal yang lengkap, sebagai berikut:

Tabel 2

**Jadwal Kegiatan Rutin Harian Klien Lanjut Usia
di Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa
Provinsi Lampung**

Hari	Waktu	Kegiatan
Senin s/d Minggu	04.00 – 05.30 WIB	Bangun pagi, mandi, shalat Subuh
	05.30 – 06.30 WIB	Membersihkan wisma masing-masing
	06.30 – 07.30 WIB	s.d.a
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan pagi
	08.30 – 11.00 WIB	Istirahat, mengisi waktu luang (penga- jian/pertanian/keterampilan, dll)
	11.00 – 14.00 WIB	Makan siang, shalat Dzuhur, dan istirahat
	14.00 – 16.00 WIB	Istirahat, tidur siang
	16.00 – 17.30 WIB	Mandi, shalat Ashar
	17.30 – 18.30 WIB	persiapan shalat Maghrib
	18.30 – 22.30 WIB	Makan malam, shalat Isya nonton TV
22.30 – 04.00 WIB	Istirahat, tidur malam	

Sumber: Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa, 1 Mei 2008.

Kebijakan Pemerintah

Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Agama. Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1998 Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 17 dan 18 dinyatakan agar lansia tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan *ibadah*, *ziarah* atau wisata, serta agar tata cara *pemakaman jenazah* sesuai dengan agama yang dianut oleh lanjut usia. Untuk hal ini belum disusun pedoman khusus, seperti kemudahan akses jalan dan pintu bagi lansia yang menggunakan kereta dorong ke tempat ibadah, pernikahan lansia (dalam biaya dan prosedur administrasi), dan ketenagaan “Latar belakang pendidikan minimal S1.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung di sini ialah Kebijakan Gubernur bidang sosial yang diberikan pada bidang sosial untuk merumuskan dan melaksanakan urusan sosial (Perda Provinsi Lampung

No.11 tahun 2007 pasal 12, ayat 2, poin e). Kebijakan di sini dibedakan kepada dua: umum dan khusus. Kebijakan umum tentang peningkatan kesejahteraan lanjut usia ialah pemberian hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai amanat Undang-Undang No.13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, dengan pelayanan usia lansia secara proposional, terencana dan terarah.

Sedangkan kebijakan khusus, yaitu:

1. Pengembangan pelayanan sosial lansia dengan model *Day care* dalam bentuk konsultasi lansia non panti di Panti, dan pelayanan model *home care* dalam bentuk kunjungan ke rumah-rumah (lansia non panti).
2. Pengembangan usaha melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan mengikutsertakan lansia yang memenuhi persyaratan dikembangkan pendapatan atau penghasilannya yang layak dengan pemberian bantuan peralatan dan bahan seperti, peternakan, perikanan, warungan dan home industri.
3. Pembekalan bagi pensiunan pegawai Provinsi Lampung yang akan memasuki purna bhakti tentang dunia usaha disertai bantuan modal perorang Rp. 5 juta.
4. Pengembangan kelembagaan Komisi lansia Provinsi dan pembentukan Komisi lansia di seluruh kabupaten/kota, Karang lansia/Karang Werdha di Kantor Kelurahan/Desa, dan lembaga lansia lainnya.
5. Pendampingan sosial lansia dengan melibatkan lembaga/organisasi sosial/ yayasan/ dunia usaha, pemerintah, perorangan dan keluarga.

Keberhasilan dan Hambatan

Keberhasilan dalam pembinaan kehidupan keagamaan lansia di Panti yang menonjol ialah pada elemen perencanaan, dan pelaksanaan. Rencana dan jadwal pembinaan disusun rapi dan telah dibakukan untuk mingguan tiga kali dalam seminggu. Pelaksanaannya berlangsung rutin sesuai jadwal.

Hambatan non alami dalam pembinaan agama yang menonjol terdapat pada tiga elemen pembinaan, yaitu penerima binaan, metode dan materi pembinaan sikap. Sikap lansia lugu dan pemalu. Lugu mengaku lemah agama sejak dini. Malu, "enggan bertanya karena banyak yang tidak tahu dan takut dipermalukan". Hambatan alami ialah lansia mengalami penurunan kemampuan fisik, rohani dan sosial. Daya pendengaran menurun dan daya ingatan mulai pelupa, sehingga "risih" mengikuti pelajaran/pembinaan agama.

Kesan dan Harapan

Dalam rangka pembinaan kehidupan beragama perlu dibuat program khusus untuk PSTW Bhakti Yuswa, bahkan untuk seluruh PSTW oleh Departemen Agama (Ahmad Chudori, 14 Maret 2008). Memang diakui oleh Kepala Bidang Penamas Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung dan Kepala Panti, bahwa hingga saat ini belum terjalin kerjasama dengan Dinas Sosial dan Panti dalam pembinaan kehidupan keagamaan lansia di Panti (Mansyuri Ismail, 28 April 2009 dan Merah Hasan Ilyas, 24 April 2008).

Kerjasama pembinaan agama bagi lansia, dan khususnya di Panti perlu dibuat "payung hukum". Sebaiknya, diupayakan terlebih dahulu di tingkat pusat antara Departemen Agama RI, Departemen Sosial dan Departemen Dalam Negeri. Adanya Payung Hukum dapat dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan secara formal yang didukung alokasi dana, serta sarana dan prasarana.

Perlu disusun "Pedoman Pembinaan Agama lansia" sesuai karakteristik kebutuhannya. Di antara isinya ialah imbauan agar para lansia aktif dalam pembinaan, jika perlu diharuskan disertai hukuman mendidik, sekaligus dipertegas statusnya sebagai paket program Panti, kecuali bagi yang uzur dan sakit-sakitan.

Materi pembinaan agama yang diharapkan oleh lansia agar dilihat pengelompokan sesuai kemampuan. Materi yang bersifat umum dapat diikuti oleh seluruh lansia, dan ada pula pengelompokan atas dasar tingkat pengetahuan dan pengamalan agama. Hal ini penting sebagaimana diungkapkan Fardi "malu ngaji karena tidak tahu agama,

dan takut dipermalukan karena ketidaktahuan". Belajar membaca Al Qur'an hendaklah diarahkan pada hafalan ayat-ayat pendek.

Metode pembinaan (*thariqoh*) agama diharapkan lebih kepada praktik peribadatan khusus bagi lansia, seperti cara berwudhu' yang alergi terkena air dingin dan yang buang angin terus-terusan (*uzur*), dan bagi yang sering lupa bacaan atau do'a shalat. Di samping itu, dalam media pembinaan (wasilah) diharapkan ketersediaan kitab suci Al Qur'an, Juz 'amma, buku tahlilan/yasinan, dan buku-buku keagamaan. Kesan dan harapan lansia terhadap pembinaan agama di Panti, sebagai masukan ke arah kekhususan dalam pembinaan terdapat pada semua elemen. Dalam elemen pembina agama (da'i), para lansia mengakui, ilmu agama para pembina luas dan mendalam, rajin dan sabar. Lansia perempuan mengharapkan agar pembina menghindari persentuhan lansia dengan lain jenisnya (bukan muhrim).

Dalam elemen penerima binaan agama (mad'u), seorang lansia mengungkapkan dan diamini oleh lansia lainnya dalam sebuah diskusi, yaitu "sayang sedikit ikut pembinaan agama, tetapi jika "jojetan" semua ikutan, kecuali yang uzur". Lansia yang aktif ikut pembinaan agama hanya berkisar sekitar 8 hingga 12 orang, dan yang rajin shalat berjamaah. antara 4 hingga 10 orang. Alasan yang mengemuka : "enggan", "sakit-sakitan, dan "mudah bosanan", tidak tahan lama duduk dan berdiri, belum hapal semua do'a sholat, dan suka buang air seni sewaktu-waktu.

Dalam elemen materi pembinaan (*maddah*) lebih banyak pada aspek peribadatan, terutama cara berwudhu', tata tertib shalat hingga penyelenggaraan jenazah, belajar baca Al-Qur'an dan tahlilan/yasinan. Materi akhlak kadangkala, berupa kisah para Nabi, para sahabat Nabi dan tokoh teladan. Materi keimanan jarang sekali. Lansia enggan jika diajarkan masalah keimanan menyangkut syurga dan neraka, karena selama ini banyak dosa.

Materi pengajian agar lebih diarahkan pada keimanan yang menggugah untuk melaksanakan ibadah sehari-hari. Khusus materi ibadah sebaiknya diarahkan pada cara ibadah yang sesuai karatistik kebutuhan lansia. Pada elemen metode (*thoriqah*) agar dikurangi tanya jawab. Dalam elemen media pembinaan agama (wasilah) dinilai cukup tersedia. Hanya buku-buku keagamaan agar disediakan.

Efek pembinaan agama (*atsar*) dapat dilihat dari keaktifan mengikuti pembinaan maupun shalat wajib berjamaah di Mushalla. Dalam hal ini dinilai belum memenuhi harapan, karena masih dibawah 10%. Diharapkan agar dibentuk kelompok-kelompok kecil yang disesuaikan pengetahuan agama dan pengamalan masing-masing lansia, terkecuali pengajian umum. Dalam elemen pelaksanaan (*taujih*) terlaksana sesuai agenda dan agar disiplin dipertahankan, mulai acara sholawatan oleh lansia, ceramah oleh pembina, tanya-jawab, dan terakhir do'a.

Penutup

Kesimpulan

1. Pembinaan kehidupan keagamaan lansia di Panti Sosial Tresna Werdha "Bhakti Yuswa" secara umum terlaksana dan telah mengarah kepada kekhususan atau spesifikasi pada elemen materi (tata peribadatan bagi lansia yang *uzur* sakit-sakitan, serta penyelenggaraan jenazah dan tahlilan), dan pada elemen metode (pelatihan dan peragaan)
2. Partisipasi lansia di Panti untuk mengikuti pembinaan keagamaan rendah, dengan alasan kondisi fisik lemah, pelupa dan pendengaran menurun, sikap "enggan" dan "malu", metode pembinaan kurang spesifik, dan materi yang dominan peribadatan. Partisipasi dalam peribadatan shalat wajib berjamaah rendah dengan alasan "uzur" dan sakit-sakitan yang secara alami terjadi penurunan kemampuan fisik dan rohani.
3. Koordinasi dalam pembinaan keagamaan lansia di Panti secara kelembagaan belum terjalin antara Pemerintah Provinsi dan khususnya Dinas Sosial dan Panti Sosial Tresna Werdha dengan Kanwil Departemen Agama Provinsi dan jajarannya. Pemerintah Daerah (Provinsi Lampung) sudah pro lansia, hanya dalam operasional pembinaan keagamaan lansia belum tersedia "payung hukum" sebagai acuan koordinasi kerjasama.
4. Fasilitas umum bidang agama yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang kesejahteraan lansia (UU No. 13 Tahun 2004 Pasal 17 dan 18) belum dijabarkan dalam kebijakan operasional seperti akses jalan berikut pintu masuk tempat iba-

dah, dan ketentuan kemudahan pernikahan lansia, serta belum terpenuhi latar belakang pendidikan tenaga rohaniawan minimal S1 (Kepmensos No. 4 Tahun 2007).

Implikasi

1. Kerjasama dalam pembinaan kehidupan keagamaan lansia suatu kebutuhan prioritas (*urgen*). Namun, tanpa “payung hukum” sebagai dasar kerjasama akan terkendala dari segi kewenangan dan dukungan alokasi dana dan sarana.
2. Pedoman khusus atau spesifik dalam pembinaan kehidupan keagamaan lansia merupakan suatu kebutuhan sebagai acuan kegiatan. Jika tanpa spesifikasi akan kurang menyentuh kebutuhan sesuai karakteristik lansia yang menimbulkan rasa enggan dan kurang menarik.
3. Nilai-nilai budaya dan pemahaman ajaran agama tentang bakti anak kepada orang tua mengalami kelonggaran. Jika materi dakwah dan pendidikan di Sekolah sejak dini ditanamkan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang menumbuhkan rasa tanggung-jawab anak dan keluarga terhadap lansia (orang tua).

Rekomendasi

1. Untuk membangun koordinasi dan kerjasama formal kelembagaan dalam pembinaan keagamaan lansia di Panti diperlukan “payung hukum” antara Pemerintah Daerah dan khususnya Dinas Social dan Panti Sosial dengan Kantor Wilayah Departemen Agama beserta jajarannya. Sebaiknya diawali kerjasama di tingkat pusat antara Departemen Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Dalam Negeri yang dapat digunakan sebagai acuan kerjasama di instansi daerah.
2. Dalam memenuhi kebutuhan spesifik sesuai karakteristik lansia dalam pembinaan keagamaan hendaklah disusun “pedoman atau pembinaan kehidupan keagamaan lansia”, dengan materi yang seimbang dan profesional dalam aspek pokok ajaran Islam.
3. Untuk penyusunan pedoman atau panduan dimaksud hendaklah dipertimbangkan masukan strategis sesuai harapan lansia,

Pembina dan narasumber antara lain: pembentukan kelompok binaan didasarkan pada pendidikan atau pengetahuan agama, penegakan disiplin melalui daftar hadir disertai teguran, dan bila perlu dikenakan sanksi bersifat mendidik, membatasi teknik tanya jawab, mengindahkan adab pergaulan antara pria dan wanita, penyediaan buku-buku keagamaan dan alat praktik peragaan ibadah, pernikahan, dan akses ke tempat ibadah, materi pembinaan tentang persiapan kematian dan kehidupan di akhirat serta materi yang proporsional dalam seluruh aspek ajaran Islam.

4. Kualifikasi tenaga rohaniawan lansia di Panti, sebaiknya disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan keagamaan para lansia. Para lansia yang rata-rata lulusan Sekolah Dasar dipandang cukup dibina oleh lulusan Madrasah Aliyah dan atau sederajat, dengan dibekali pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis seperti sistem belajar orang tua (*andragogi*) dan fikih lansia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Indikator Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2006*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Lampung dalam Angka 2007*.
- Departemen Sosial RI, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, Jakarta, 2006.
- Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tahun Anggaran 2008*.
- Dinas Sosial Provinsi Lampung, *Buku Saku Data dan Informasi Dinas Sosial, Provinsi Lampung 2007*.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Marsono, *UID 1945 dengan Perubahan-Perubahannya 1999-2002*, CV. Eko Jaya, Jakarta 2002.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Munir, M dan Wahyun Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Rahmat Semesta, Jakarta 2006.
- Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa, "Perkembangan Panti Sosial Tresna Werdha "Bakti Yuswa" (Leaflet), Kalianda, 2007.
- , "Job Description Pengurus Panti Sosial Trisna Werdha Bhakti Yuswa" Lampung, 2007.
- , "Program Kerja Panti Sosial Tresna Werdha "Bakti Yuswa" Natar 2008.
- Rati, Riska, *Faktor-Faktor Penyebab Lanjut Usia Dilembagakan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2007.
- Surakhmad, Winarno, *Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda, Teknik*, Tarsito, Bandung, 1998.
- Wilardjo, L., *Studi Kasus: Sebuah Panduan Penelitian* oleh J. Nisbet dan J. Watt, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.
- Yin, Robert K., *Case Study Research: Design and Methods* (1987), Terjemahan M. Djauzi Mudzakir, *Studi Kasus : Desain dan Metode*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 1997.

Dokumen:

- Keputusan Gubernur Lampung No. G/002/B.VII/2007 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Lampung Tahun 2007–2010 Tanggal 2 Januari 2007.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 4/PRSS-3/KPTS/2007 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam Panti, Maret 2007.
- Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia Tanggal 22 Juni 2004.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Tanggal 12 Desember 2007.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tanggal 18 Oktober 2004.

Pembinaan Kehidupan Beragama Lanjut Usia Di Panti Sosial Syekh Burhanuddin Kabupaten Padang Pariaman

Suhanah

*Peneliti pada Puslitbang
Kehidupan Keagamaan,
Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama*

Abstract:

This research attempts to answer certain questions: how is the implementation of constitution and governmental policies regarding religious life guidance for the elders? Then how is the guidance pattern? This research shows: (1) Constitution regarding the elders welfare has been implemented by the Regent of Padang Pariaman Regency; (2) There hasn't been any form of coordination between Kandepag/KUA, Syekh Burhanuddin Social Care, and Dinas Sosial of Padang Pariaman regent; (3) Guidance has been well carried out, although its practice is materialized through activities within Yayasan Pondok Pesantren Luhur Syekh Burhanuddin; and (4) Special religious guidance pattern for the elders is not available, but the current implementation uses the pattern which is programmed by Yayasan Pondok Pesantren.

Keywords: *Religious Life Guidance, the elders, Syekh Burhanuddin social care.*

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan (pasal 34 ayat 2). Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pada Bab III pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan bahwa lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan Pemerintah juga membentuk Komnas lansia pada tahun 2005, dengan tugas meningkatkan kesejahteraan lansia (Keppres No. 52 / 2004, Pasal 3).

Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para lanjut usia, mereka diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi : a) pelayanan keagamaan (mental spiritual), b) pelayanan kesehatan, c) kesempatan kerja, d) pendidikan dan pelatihan, e) kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, f) kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, g) perlindungan sosial, dan h) bantuan sosial.¹

Adapun masalah umum yang dirasakan oleh para lanjut usia meliputi masalah penurunan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial. Masalah-masalah tersebut tampak antara lain berupa: kondisi kesehatan yang makin menurun, sakit-sakitan, berkurangnya intensitas relasi sosial dengan teman sebayanya (sesama lanjut usia), kesepian, merasa kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, merasa tidak diakui keberadaannya, merasa kurang kuat imannya, sulitnya melakukan pembagian harta warisan dan sering menjadi korban tindak kekerasan.²

Adanya berbagai permasalahan yang dialami lanjut usia, yakni bertambahnya beban pelayanan dihadapkan dengan terbatasnya kemampuan penanganannya, kerap kali membuat sebagian anak menitipkan orang tuanya yang sudah lanjut usia ke panti-panti sosial. Untuk itu, diperlukan pengembangan pelayanan bagi lanjut usia agar berbagai pelayanan yang dilaksanakan dapat lebih mampu memenuhi kebutuhan dalam mengatasi permasalahan lanjut usia.

Dengan melihat realitas kondisi masyarakat lansia yang sangat beragam baik dari segi fisik, latar belakang pendidikan maupun sosial ekonominya, maka diperlukan upaya peningkatan pelayanan sosialnya termasuk dalam hal pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya.

¹Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 15/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Subsidi Silang di Panti Sosial Tresna Wreda (PSTW), Jakarta, 2007, Hlm. 6.

²*Ibid.*

Penelitian tentang Pembinaan Kehidupan Beragama bagi lansia masih sangat jarang dilakukan. Pada tahun 2000 Puslitbang Kehidupan Keagamaan telah melakukan penelitian tentang pembinaan keagamaan bagi masyarakat lanjut usia, dengan sasaran masyarakat lansia yang tinggal di panti-panti jompo dan yang berada di lingkungan masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut antara lain mengemukakan bahwa pembinaan keagamaan terhadap para lanjut usia baik yang bertempat tinggal di panti-panti maupun di masyarakat masih sangat beragam karena belum adanya pedoman khusus tentang pembinaan keagamaan bagi lanjut usia.³ Hasil penelitian itu juga mengatakan bahwa secara umum pembinaan keagamaan lanjut usia yang dilaksanakan selama ini meliputi: keimanan, ibadah dan do'a. Materi tersebut disampaikan melalui ceramah dan tanya jawab. Para petugas pembina keagamaannya berasal dari lembaga/organisasi keagamaan, termasuk dari Departemen Agama. Biaya pembinaan keagamaan bagi lansia yang berada di panti-panti pemerintah berasal dari negara, sedang bagi panti-panti swasta diperoleh dari donatur-donatur. Adapun bagi lanjut usia yang berada di masyarakat, biaya pembinaan keagamaannya berasal dari dana pribadi dan ada juga dari donatur.⁴

Sebagai tindak lanjut penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka pada tahun anggaran 2008 ini Puslitbang Kehidupan Keagamaan memandang perlu melakukan penelitian lanjutan dengan judul Pembinaan Kehidupan Beragama Lanjut Usia di Panti-Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) baik yang dikelola oleh pihak Pemerintah maupun swasta.

Penelitian lanjutan ini penting karena melihat jumlahnya lanjut usia dari tahun ke tahun terus meningkat dan membutuhkan penanganan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, perlu juga mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah khususnya dalam hal pembinaan keagamaan yang merupakan bagian dari kesejahteraan sosial dan spiritual. Di samping itu, perlu juga diketahui hal-hal berkaitan dengan masalah tenaga pembina, metode, materi, dana, media (elektronik maupun cetak) dan fasilitasnya. Beberapa permasalahan tersebut dalam penelitian ini ingin diperoleh jawabannya.

³Departemen Agama RI, Badan Litbang Puslitbang Kehidupan Beragama, *Laporan Penelitian Pembinaan Keagamaan bagi Masyarakat Lanjut Usia*, Jakarta, 2000 :91.

⁴*Ibid*

Masalah Penelitian

1. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan kehidupan beragama lanjut usia?
2. Bagaimana pola pembinaan kehidupan beragama lanjut usia di Panti Sosial Syekh Burhanuddin?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan kehidupan beragama lanjut usia di Panti Sosial Syekh Burhanuddin?

Tujuan

1. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah (Dinas Sosial Kabupaten Pariaman dan Kandepag Kota Pariaman) dalam pembinaan kehidupan beragama lanjut usia;
2. Untuk mengetahui pola-pola pembinaan keagamaan lanjut usia di Panti Sosial Syekh Burhanudin;
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan kehidupan beragama lanjut usia di Panti Sosial Syekh Burhanudin.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Dalam studi kasus akan dilakukan penggalian data secara holistik dan menganalisis secara intensif interaksi faktor-faktor yang terlibat di dalamnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan telaah dari buku-buku dan laporan-laporan hasil penelitian serta dari dokumen-dokumen yang ada di panti-panti sosial.

Deskripsi Konsep

Dari judul penelitian di atas, ada beberapa konsep yang perlu dijabarkan yaitu:

Pertama, Pembinaan Keagamaan. Kata "pembinaan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan keagamaan dimaksudkan dalam penelitian ini adalah usaha, tindakan dan kegiatan membina masalah keagamaan dalam hal ini dilakukan terhadap lansia untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, yang dimaksud "lanjut usia" adalah setiap warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, baik potensial maupun tidak potensial (Kep. Mensos, No.15/HUK/2007:5), dalam arti yang masih aktif bekerja maupun tidak aktif bekerja, baik mereka yang tinggal di panti-panti maupun yang tinggal di lingkungan masyarakat atau keluarganya. Adapun lansia yang akan dijadikan sasaran penelitian adalah lansia yang berada di panti-panti sosial.

Ketiga, pengertian Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) adalah wadah atau institusi yang memberikan pelayanan dan perawatan jasmani, rohani dan sosial serta perlindungan untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup secara wajar. (Kep. Mensos, No. 15/HUK/2007:5).

Kerangka Pemikiran

Upaya pembangunan bangsa, selain ditemukan hambatan dan kendala yang dihadapi, juga telah menunjukkan keberhasilan-keberhasilan yang nyata seperti semakin membaiknya kondisi kehidupan sosial masyarakat dan kesehatannya sehingga mengakibatkan usia harapan hidup mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya usia harapan hidup, semakin bertambah pula jumlah lanjut usia. Memang para lanjut usia yang ada beraneka ragam, ada yang masih potensial (produktif) dan masih berperan aktif dalam pembangunan, tetapi ada

yang sudah tidak potensial (tidak produktif) lagi. Hal ini karena faktor usia yang sudah banyak menghadapi keterbatasan-keterbatasan.

Oleh karena itu, para lanjut usia sangat memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosial dan pembinaan keagamaan. Hakikat peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah pelestarian nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Pelestarian nilai-nilai agama dan budaya bangsa dapat dilakukan melalui pembinaan kehidupan beragama bagi para lanjut usia.

Adapun pembinaan yang dimaksudkan di sini mencakup beberapa hal yaitu kebijakan, koordinasi, penyuluhan, pembinaan dan bimbingan, pemberian bantuan, pemberian perizinan serta pengawasan. Kehidupan beragama adalah mengenai pemahaman agama, aktivitas agama dan pengamalan agama, baik oleh individu maupun kelompok. Para lanjut usia, ada yang tinggal dalam keluarga (masyarakat) dan ada yang tinggal di panti-panti. Namun dalam penelitian ini difokuskan pada lanjut usia yang ada di Panti Sosial Syekh Burhanuddin. Adapun aspek yang diteliti dalam kajian ini meliputi: sejarah panti, bantuan yang diterima panti, struktur kepengurusan panti, persyaratan penerimaan lanjut usia, jumlah profil tenaga pembina keagamaan, jumlah dan profil lanjut usia, materi pembinaan, sarana pembinaan, biaya pembinaan dan metode pembinaan serta faktor pendukung dan penghambat.

Kehidupan Keagamaan

Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat sejumlah rumah ibadah, yakni masjid sebanyak 302 buah, musholla 1.837 buah dan gereja Protestan 2 buah. Sejumlah rumah ibadat tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah ibadat bagi 396.576 orang pemeluk agama Islam, 468 orang pemeluk agama Kristen dan 154 orang pemeluk agama Katholik yang ada di kabupaten ini.⁵

Faham/ormas keagamaan yang berkembang di Kabupaten Padang Pariaman di antaranya adalah: Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) dan Tarekat Satariyah. Aktivitas kegiatan keagamaannya cukup padat seperti pengajian-pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu majelis taklim dari organisasi Nahdlatul Ulama

⁵Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, BPS, Kabupaten Padang Pariaman, 2007 : 82.

(NU), Muhamadiyah, dan Tarikat Satariyah. Demikian juga kegiatan Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA) bagi anak-anak remaja masjid dan mushalla-mushalla.

Aktivitas pengajian bagi kaum ibu biasanya diadakan setiap hari Sabtu yang dimulai pada pukul 9.00 s.d. 11.00. Jamaahnya kebanyakan kaum ibu yang sudah tua-tua, tetapi ada juga yang masih berusia muda. Penceramahnya ada ustadzah dan ada juga ustadz (datuk-datuk). Materi pengajiannya terkait dengan masalah ibadah, akhlaq dan tauhid. Sedangkan metode penyampaian berupa ceramah dan tanya jawab.

Kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) biasanya diadakan sore hari mulai pukul 14.00 s.d. 16.00. Materi yang diajarkan di TPA itu meliputi: Kitab Juz 'amma, Iqra jilid 1 (satu) S/D 6 (enam), praktek shalat wajib dan praktek melakukan shalat-shalat sunat, melakukan shalat ashar berjamaah. Staf pengajar dari kegiatan TPA tersebut adalah para remaja masjid lulusan dari pondok pesantren dan IAIN. Metode penyampaian berupa praktek dan teori.

Sistem kekerabatan Suku Minangkabau adalah matrilineal, yaitu garis keturunan seseorang dengan segala aspeknya dihitung menurut garis keturunan ibu. Bentuk keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak tidak populer dalam kalangan masyarakat Minangkabau, walaupun keluarga tersebut sebenarnya ada. Yang menjadi penyebab adalah si isteri sesudah kawin tetap pada keluarga asalnya dan suami menginap di rumah asal isterinya. Masing-masing suami atau isteri masih erat terlibat dengan keluarga asalnya.

Seorang isteri lebih erat tersangkut pada ibunya bersama-sama dengan anak-anaknya. Begitu pula suaminya tidak dapat melepaskan aktifitas di rumah ibunya sendiri sebagai mamak. Dengan demikian, pada masyarakat Minangkabau keluarga luas lebih populer yaitu keluarga yang terdiri dari nenek ditambah dengan anak-anak dan cucu-cucunya.⁶ (Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat. 1997 : 14)

Di antara ciri-ciri masyarakat Minangkabau dengan sistem garis keibuannya adalah sebagai berikut :

⁶Ungkapan Tradisional yang berkaitan dengan sila-sila dalam pancasila, Sumatera Barat, 1985 : 9.

- 1) keturunan dihitung berdasarkan keturunan ibu,
- 2) suku terbentuk menurut garis ibu,
- 3) setiap orang tidak dibenarkan kawin dengan orang sepersukunya atau mereka harus kawin dengan orang di luar sukunya (exogami),
- 4) kekuasaan di dalam suku secara teori terletak di tangan ibu. Namun dalam prakteknya yang berkuasa adalah saudara laki-laki dari ibu (paman),
- 5) perkawinan bersifat matri lokal,
- 6) hak-hak dan pusaka di wariskan oleh mamak kepada keponakannya.

Landasan Hukum Keberadaan PSTW

- a) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - a.1. Pasal 34 : Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara
 - a.2. Pasal 27 ayat 2 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b) Undang-Undang No. 4 tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan lansia terlantar.
- c) Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.
- d) Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/IX/1979 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi susunan organisasi dan Tata kerja panti dan Sasana di Lingkungan Departemen Sosial Propinsi.
- e) Keputusan Menteri Sosial RI No.6/HUK/1989 tentang organisasi dan Tata kerja Panti di lingkungan Departemen Sosial.
- f). Keputusan Menteri Sosial RI No. 16/HUK/1983 tentang Struktur dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi.
- g) Keputusan Menteri Sosial RI No. 22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di lingkungan Departemen Sosial.

- h) Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- j) Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.
- k) Keputusan Menkokesra. Nomor 15/Kep/Menko/Kesra/IX/1994 tentang Panitia Nasional Lanjut Usia.
- l) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 75/HUK/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Departemen Sosial RI.
- m) Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, jo Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom :
 - a. Pasal 2 ayat (3) angka 12 huruf c berbunyi : penetapan pedoman pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial dan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (merupakan kewenangan Pemerintah Pusat);
 - b. Pasal 3 ayat (5) angka 11 Bidang Sosial huruf a berbunyi : mendukung upaya pengembangan pelayanan sosial (merupakan kewenangan Propinsi).

Tujuan didirikannya PSTW Syekh Burhanuddin

Tujuan didirikannya PSTW Syekh Burhanuddin ini tidak lain adalah menyatukan para lanjut usia yang hidupnya kesepian dan terlantar, dikarenakan keluarganya tidak bisa mendampingi dan melayaninya dengan baik, sehingga mereka dapat hidup dengan nyaman dan senang bisa hidup bersama.

Profil Panti Sosial Syekh Burhanuddin

Panti Sosial Syekh Burhanuddin beralamat di Desa Tanjung Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Sumatera

Barat. Bermula Panti Sosial ini berdiri pada tanggal 12 Desember 1996 atas ide dari para pengurus Yayasan Pondok Pesantren Luhur Syekh Burhanudin.

Ide tersebut timbul karena melihat permasalahan yang ada di kampung sekitar Pondok Pesantren banyak masyarakat lanjut usia yang harus dibantu karena mereka ditinggalkan oleh anak-anaknya yang sebagian besar merantau ke berbagai daerah untuk mencari nafkah, sehingga para lansia dititipkan ke Panti Sosial Syekh Burhanudin dengan alasan : a. terbatasnya kemampuan anak dalam penanganan lansia karena banyaknya tuntutan kebutuhan ekonomi keluarganya; b. tidak mau melihat orang tuanya hidup dalam kesendirian. Tetapi ada juga lansia yang datang ke panti sosial diantarkan oleh Datuk atau Ustaz disebabkan karena kekecewaan keluarganya atau para isteri yang tidak mau lagi merawat suaminya yang sakit-sakitan.

Sepanjang berdirinya Panti Sosial ini sudah beberapa kali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yaitu :

- a. Pada awal berdirinya, Panti Sosial Syekh Burhanudin mendapat bantuan dari masyarakat sekitar dan donatur dari para perantau yang sukses berdagang di Pasar Tanah Abang Jakarta. Atas musyawarah para pengurus pondok pesantren dan masyarakat sekitar, mereka bersepakat membuat rumah sederhana maka dibuat rumah sederhana untuk menampung para lansia yang ada walaupun kondisinya belum maksimal. Pada waktu itu jumlah lansia yang perlu dibina ada 30 orang, tetapi pada saat itu baru dapat menampung sebanyak 15 orang karena baru memiliki 7 buah kamar dan 15 buah tempat tidur. Sehingga lansia yang 15 orang lagi dibina di luar panti. Atas kesulitan tempat tinggal itulah maka pengurus panti sosial Syekh Burhanudin tersebut menyampaikan keluhan itu ke kantor sosial Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian keluhan itu dari kantor sosial Kabupaten Padang , disampaikan lagi ke kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya tidak lama kemudian mendapatkan bantuan sebuah rumah yang tergolong mewah di Komplek Panti Sosial Syekh Burhanudin atas bantuan dari orang Jepang. Sebuah rumah mewah itu yang dilengkapi peralatan yang serba baru dan mewah pula.

- b. Pada tahun 2000 Panti Sosial Syekh Burhanudin mendapat bantuan dari Menteri Sosial sebesar Rp. 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk membangun sebuah rumah yang berukuran 13,5 x 24 m yang terdiri dari 8 buah kamar. Tetapi sampai saat penelitian ini dilakukan pembangunan rumah tersebut belum selesai dikarenakan kekurangan biaya. Direncanakan pada tahun 2008 ini akan dilanjutkan kembali pembangunannya. (Hasil wawancara dengan Sholihin S. Ag dari Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman).
- c. Pada tahun 2004 pengurus Panti Sosial Syekh Burhanuddin ini mengajukan proposal permohonan bantuan melalui Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian dilanjutkan terus ke Dinas Sosial Provinsi, dan ke Menteri Sosial, yang pada akhirnya kemudian memperoleh bantuan sebesar Rp. 73.000.000; (tujuh puluh tiga juta rupiah). Setelah menerima bantuan dana tersebut diperuntukkan untuk keperluan para lansia yang dibelikan barang-barang berupa sembako 2x sebulan.
- d. Pada tahun 2007 Panti Sosial Syekh Burhanudin menerima bantuan dari Kantor Sosial Kabupaten Padang Pariaman berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), uang tersebut dipergunakan sebagai berikut :

1. Biaya operasional panti dengan perincian :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Biaya Rekening Telepon 4 bln	Rp. 789.469,-
2	Biaya Rekening Listrik 6 bln	Rp. 1.034.380,-
3	Foto Copy surat 85 lbr	Rp. 8.500,-
4	Transportasi Pengurus 8 kali	Rp. 120.000,-
5	Kertas 1 rim	Rp. 28.000,-
6	Rol, Pena, pensil, buku dan lain-lain	Rp. 19.651,-
Jumlah		Rp. 2.000.000,-

2. Uang Jajan lansia sebesar Rp. 15.000,- per bulan untuk satu orang lansia yang ada di Panti Sosial Syekh Burhanuddin, dengan diberikan sebanyak 30 orang selama 12 bulan dengan jumlah biaya sebesar Rp. 5.400.000; (Lima juta empat ratus ribu rupiah) per tahun.

3. Bantuan dana sebesar Rp. 2.250;(Dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per- orang untuk satu hari makan. Diberikannya sebanyak lansia yang ada dan diserahkan satu bulan sekali.
4. Uang Honor Pengurus Panti Sosial Syekh Burhanuddin diberikan secara perorangan dengan jumlah yang bervariasi antara lain :

Untuk Ketua sebesar Rp. 60.000,- perbulan,

Untuk Sekretaris sebesar Rp. 55.000,- perbulan,

Untuk Pengasuh sebesar Rp. 50.000,- perbulan,

Untuk Anggota sebesar Rp. 40.000,- perbulan.

Dari sejumlah pengurus Panti Sosial ini tidak semuanya mendapatkan honor kecuali orang tertentu saja, selain itu honor tersebut diberikan satu tahun sekali dengan jumlah biaya keseluruhan mencapai Rp. 2.460.000; (Dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Struktur kepengurusan panti sosial Syekh Burhanudin terdiri dari:

1. Yahya Datuk Tamin Alam, pendidikan S1 kedudukan sebagai Ketua Umum, usia 46 tahun.;
2. Zulbaidi Pendidikan SLTA kedudukan sebagai Ketua I;
3. Zaidin Pendidikan SLTA kedudukan sebagai Ketua II, umur 44 tahun;
4. Nasrul TK Mudo Pendidikan SLTA kedudukan sebagai Ketua III, usia 32 tahun;
5. Hadisman Wjaya Pendidikan S1 kedudukan sebagai Sekretaris umum;
6. Marjuna Pendidikan STKIP kedudukan sebagai Sekretaris I;
7. Ade Formal Pendidikan SLTA kedudukan sebagai Sekretaris II;
8. Jusmanto Pendidikan SLTA kedudukan sebagai Bendahara umum;
9. Heri Efenfi Pendidikan SLTA kedudukan sebagai Bendahara I;

10. Baharuddin Pendidikan SLTP kedudukan sebagai bapak asuh;
11. Naali Pendidikan SLTP kedudukan sebagai bapak asuh;
12. Ayur Syam Pendidikan SLTP kedudukan sebagai bapak asuh;
13. Irnawati Pendidikan SLTP kedudukan sebagai ibu asuh;
14. Mardiana Pendidikan D 2 kedudukan sebagai ibu asuh;
15. Sari Pendidikan SLTP kedudukan sebagai ibu asuh.

Persyaratan Penerimaan lansia di Panti Sosial Syekh Burhanuddin:

Ada beberapa kriteria/persyaratan bagi lansia untuk bisa diterima di Panti Sosial Syekh Burhanuddin yaitu: a. Bisa mandi sendiri; b. bisa mencuci pakaian sendiri; c. bisa masak bersama-sama lansia; dan d. makan dan minum sendiri.

Dari kenyataan di lapangan bisa kita lihat bahwa lansia yang ada di Panti Sosial Syekh Burhanuddin masih cukup mandiri atau boleh dikatakan cukup potensial dalam arti mereka masih mampu melakukan aktivitas sendiri, seperti apa yang disebutkan di atas. Selain itu mereka masih pula melakukan aktivitas lain seperti: membuat tikar dan membuat sapu lidi.

Pekerjaan membuat tikar dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu untuk sebuah tikar berukuran persegi panjang, yang kemudian tikar itu bisa dijual dengan harga Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah). Sedangkan membuat sapu lidi membutuhkan waktu lebih kurang 3 hari dan dapat dijual dengan harga Rp. 1.500; (seribu lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk kepentingan lansia itu sendiri sebagai uang jajan hari-harinya.

Profil Tenaga Pembina Keagamaan di Panti Sosial Syekh Burhanudin

Jumlah dan profil tenaga pembina keagamaan yang ada di Panti Sosial Syekh Burhanudin sebanyak 8 orang, yang terdiri dari: 1. M. Hosen Tengku Bagindo; 2. Bustami Tengku Khatib; 3. Yahya Datuk Tamin Alam; 4. Drs. Basri Barmanda M. BA; 5. Amirudin Yusuf Tengku Iman; 6. HM. Yunis Datuk Sampono Alam; 7. Tengku Mustafa Kamal; dan 8. Nasrul Tengku Mudo.

Latar belakang pendidikan para tenaga pembina keagamaan tersebut sebagian besar berasal dari Pondok Pesantren dan ada juga yang berasal dari lulusan perguruan tinggi hukum.

Usia para tenaga pembina keagamaan lanjut usia yang berada di Panti sosial Syekh Burhanudin rata-rata berkisar antara 45 tahun sampai dengan 65 tahun. Spesifik tenaga keagamaan yang ada di panti sosial ini adalah karena mereka orang-orang pondok pesantren tentunya bisa berbicara bahasa arab dan ahli di bidang ceramah keagamaan.(Wawancara dengan Yahya Datuk Tamin Alam, 29-4-2008).

Dalam ketentuan peraturan pemerintah, dikatakan bahwa latar belakang pendidikan tenaga pembina keagamaan bagi lansia minimal S1 dan sesuai bidangnya. Maka dari itu dengan melihat jumlah dan tenaga pembina keagamaan yang ada di panti ini ternyata latar belakang pendidikannya sangat beragam oleh karena itu tidak mengalami kendala, karena telah memenuhi persyaratan yang ada.

Jumlah dan profil lanjut usia di Panti Sosial Syekh Burhanudin

Para lanjut usia yang berada di panti sosial Syekh Burhanudin sebanyak 30 (tiga puluh) puluh orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang laki-laki dan 22 (dua puluh dua) orang perempuan. Namun sampai akhir tahun 2007 lanjut usia yang meninggal sebanyak 5 (lima) orang dan semuanya perempuan. Sekarang ini lanjut usia yang ada di panti sosial Syekh Burhanudin sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Lanjut usia yang ada di Panti Sosial Syekh Burhanuddin kebanyakan perempuan, hal ini dikarenakan kaum perempuan umurnya lebih panjang dibanding kaum laki-laki, sehingga banyak para janda yang hidup menyendiri, sedangkan para anak-anak mereka pergi merantau ke berbagai daerah demi tuntutan keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Bagi lanjut usia yang ada di Panti Sosial Syekh Burhanuddin ini sebagian karena miskin dan tidak mempunyai keluarga yang dapat memenuhi kebutuhannya, tetapi ada juga yang tinggal di Panti karena kekecewaan dari keluarganya.

Pembinaan Kehidupan Beragama Lanjut Usia di Panti Sosial Syekh Burhanuddin

Pengurus Panti Sosial Syekh Burhanuddin menyatakan bahwa pembinaan keagamaan yang dilaksanakan khusus bagi lanjut usia belum ada, tetapi pembinaan keagamaan yang ada selama ini berjalan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di pondok pesantren dimana dalam pelaksanaan sholat lima waktu jamaahnya adalah para santri dan masyarakat sekitar serta para lanjut usia yang diimami oleh pengurus pondok pesantren atau pengurus dari panti sosial Syekh Burhanudin.

Dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan biasanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Tetapi spesifikasinya adalah metode ceramah. Metode ceramah ini adalah metode yang paling disenangi oleh para lanjut usia, mereka sudah tidak senang lagi dengan hal-hal yang menggunakan pemikiran.

Perlu sama-sama kita ketahui bahwa masyarakat yang berada di Kabupaten Padang Pariaman boleh dikatakan hampir 100 % memeluk agama Islam. Mereka mempunyai pedoman hidup adat bersandikan syara, dan syara bersandikan kitabullah.

Keyakinan kepada Allah sudah ditanamkan sejak kecil, bahkan bagi anak laki-laki umumnya di Sumatera Barat bila menanjak umur dewasa sudah dibiasakan untuk tinggal di surau-surau. Oleh karena itu para lanjut usia yang berada di panti sosial Syekh Burhanudin tingkat pengamalan agamanya tidak dapat diragukan lagi terutama masalah ibadah shalat lima waktu, puasa dan ibadah sunat lainnya. Selain itu para lanjut usia yang ada di tempat ini rajin melakukan shalat lima waktu berjamaah, membaca Al-Qur'an, shalawat, yasinan, tahlilan dan bacaan zikir lainnya. Namun demikian spesifik pengamalan keagamaan lanjut usia adalah menghafal surat yasin, tahlil, tasbih, takbir dan tahmid.

Materi pembinaan keagamaan meliputi:

- a. Akidah yaitu : memperkuat keyakinan para lansia bahwa hanya Allahlah satu-satunya yang patut kita sembah dan nanti pada hari qiamat terjadi, semua yang ada di dunia ini akan hancur kecuali Allah SWT.

- b. Ibadah yaitu : Yang dikatakan ibadah ada dua macam yaitu ibadah wajib dan ibadah sunat. Maka para lansia diajak untuk tekun menjalankan sholat lima waktu dan sholat-sholat sunat lainnya, puasa wajib dan puasa sunat lainnya
- c. Akhlak yaitu : menghimbau kepada lansia untuk saling berbuat baik, jangan bertengkar, kalau ada makanan dibagi bersama;

Spesifik materi ditekankan pada akhlak, jangan menceritakan keburukan orang lain dan bila ada bantuan makanan dibagi bersama. Peraturan Perundang-Undangan tentang lanjut usia

Peraturan Perundang-Undangan tentang lanjut usia

Peraturan perundang-undangan tentang peningkatan pelayanan terhadap lansia dapat berjalan dengan baik, dimana atas kepedulian Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang menghimbau kepada jajarannya untuk memberikan bantuan kepada panti-panti sosial yang ada di wilayahnya tanpa melihat panti itu statusnya swasta atau negeri.

Bukti kepedulian itu para lansia di Panti Sosial Syekh Burhanuddin sudah beberapa kali mendapatkan bantuan. Selain itu ada juga bantuan dana sebesar Rp. 2.250; per orang untuk satu hari makan. Bantuan itu sangat kita hargai, walaupun belum mencukupi karena melihat harga-harga kebutuhan pokok meningkat, sehingga tidak terpenuhinya 4 sehat 5 sempurna.⁷

Kebijakan Pemda tentang Pembinaan Kehidupan Beragama lansia belum ada kebijakan atau aturannya karena di Kabupaten Padang Pariaman ini banyak Datuk atau sama dengan Kyai yang dapat memberikan pembinaan keagamaan, baik bagi para Santri sekaligus para lansia.

Selama ini masalah tenaga pembina keagamaan tidak mengalami kendala karena tenaga pembina keagamaan bagi lansia di Panti Sosial Syekh Burhanuddin keberadaannya di bawah pengawasan yayasan Pesantren Luhur Syekh Burhanuddin yang selama ini melahirkan tenaga-tenaga pembina keagamaan yang biasa disebut dengan Datuk.

⁷Wawancara dengan Bpk. Solihin S. Sos Kasi Pelayanan Sosial Kantor Sosial Kantor Kabupaten Padang Pariaman , tanggal 16 Mei 2008

Kebijakan Pemda dalam hal ini Bupati Padang Pariaman telah membuat surat keputusan No. 02/KEP/BPP/2008 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA lansia) Kabupaten Padang Pariaman. Surat Keputusan tertanggal 30 Januari 2008 tersebut juga memuat Struktur Organisasi Komisi Daerah lansia periode 2008 – 2011.

Struktur tersebut telah dibentuk yang keanggotaannya berasal dari unsur pemerintah diutamakan di bidang : a. Kesejahteraan rakyat; b. Kesehatan; c. Sosial; d. Kependudukan dan keluarga berencana; e. Ketenaga kerjaan; f. Pendidikan; g. Agama; h. Pemukiman dan Prasarana wilayah; i. Pemberdayaan perempuan; j. Kebudayaan dan Pariwisata; k. Perhubungan; dan l. Pemerintahan.

Namun sampai penelitian dilakukan, kegiatan tersebut belum berjalan karena anggaran belum turun.

Selanjutnya kebijakan itu diikuti pula oleh Gubernur Sumatera Barat yang membentuk komisi Lanjut Usia Propinsi Sumatera Barat masa jabatan 2008-2013 dengan nomor : 460 – 164 - 2008 yang menyebutkan bahwa :

- a. Dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada para Lanjut Usia sebagai implementasi pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, diperlukan bimbingan dan bantuan baik berupa fisik material maupun spritual;
- b. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia, dipandang perlu membentuk Komisi Lanjut Usia Propinsi dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Sumatera Barat.

Kemudian disusun keanggotaan Komisi Lanjut Usia Propinsi Sumatera Barat yang dibentuk pada tanggal 5 Mei 2008 yang mewakili berbagai instansi yaitu:

1. Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagai ketua I ;
2. Ketua Lanjut Usia Indonesia Propinsi Sumatera Barat (mewakili unsur masyarakat) sebagai ketua II;
3. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat sebagai wakil Ketua I;

4. Tim penggerak PKK Propinsi Sumatera Barat (mewakili unsur masyarakat) sebagai wkl ket II;
5. Kepala Biro Sospora Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sebagai sekretaris;
6. Asisten III (Bidang Kesejahteraan Sosial) Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sebagai anggota;
7. Asisten II (Bidang Pembangunan dan perekonomian) Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sebagai anggota;
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat sebagai anggota;
9. Kepala BKKBN Propinsi Sumatera Barat sebagai anggota;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat sebagai anggota;
11. Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat sebagai anggota;
12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama propinsi Sumatera Barat sebagai anggota;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat, sebagai anggota;
14. Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, sebagai anggota;
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
16. Kasubdid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Provinsi Sumatera Barat, sebagai anggota;
17. Kepala Biro pemberdayaan perempuan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagai anggota;
18. Ketua Komnas HAM Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sebagai anggota;
19. Ketua Harian Angkatan 45 Provinsi Sumatera Barat sebagai anggota;

20. Ketua PWRI Provinsi Sumatera Barat (mewakili unsur masyarakat) sebagai anggota;
21. Ketua PEPABRI Provinsi Sumatera Barat (mewakili unsur ormas yang bergerak dibidang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia) sebagai anggota;
22. Perwakilan Purnakarya PNS Provinsi Sumatera Barat sebagai anggota;
23. Rektor Universitas Andalas Padang (mewakili unsur Perguruan Tinggi) sebagai anggota;
24. Rektor Universitas Negeri Padang (mewakili unsur Perguruan Tinggi) sebagai anggota;
25. Rektor IAIN Imam Bonjol Padang (mewakili unsur Perguruan Tinggi) sebagai anggota;
26. Ketua LKAM Sumatera Barat (mewakili unsur Perguruan Tinggi) sebagai anggota;
27. Ketua KADIN Provinsi Sumatera Barat sebagai anggota;
28. Direktur Bank Nagari Sumatera Barat sebagai anggota.

Faktor Pendukung dan Penghambat Panti Sosial Syekh Burhanuddin

1. Faktor Pendukung

- a. Tenaga Pembina Keagamaan lansia di Panti Sosial Syekh Burhanuddin tidak mengalami kendala karena Panti Sosial Syekh Burhanuddin ini lahir dari Pondok Pesantren yang mana di Pondok Pesantren ini melahirkan para Datuk atau Kyai, yang bertugas sehari-hari memberikan ceramah keagamaan.
- b. Keikhlasan dari para pengurus itu sendiri walaupun mendapatkan honor tidak sesuai dengan tenaganya.
- c. Lansia itu sendiri tidak banyak tuntutan walaupun diberi makan dengan tidak memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna.

- d. Implementasi peraturan perundang-undangan tentang lansia dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman beserta jajarannya.
2. *Faktor Penghambat*
- a. Masih minimnya bantuan yang diterima Panti Sosial Syekh Burhanuddin, sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya standar kehidupan yang layak.
 - b. Selama ini tenaga pembina keagamaan lansia yang berada di Panti Sosial Syekh Burhanuddin belum ada honorinya.
 - c. Belum ada koordinasi antara Panti Sosial Syekh Burhanuddin dengan pihak Departemen Agama RI, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat, Kantor Departemen Agama Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulakan dan dengan Departemen Sosial RI, Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Sumatera Barat, Kantor Departemen Sosial Kabupaten Padang Pariaman, pihak Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman dalam hal pembinaan Kehidupan Beragama lanjut usia;
 - d. Sarana dan prasarana yang ada di Panti Sosial Syekh Burhanuddin belum memadai.

Kesimpulan

1. Peraturan Perundang-Undangan tentang kesejahteraan lanjut usia sudah dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dapat dibuktikan bahwa walaupun Panti Sosial Syekh Burhanuddin statusnya swasta tetapi lembaga ini sudah beberapa kali mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman;
2. Kebijakan pemerintah daerah cq Kandepag/KUA dalam pembinaan kehidupan beragama bagi lansia belum ada koordinasi dengan Panti Sosial Syekh Burhanuddin dan Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman karena selama ini belum ada perintah dari pimpinan;

3. Pembinaan Kehidupan Beragama lansia di panti sosial Syekh Burhanuddin selama ini sudah dilakukan dengan baik, meskipun pelaksanaannya masih dilakukan bersamaan dengan kegiatan yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Luhur Syekh Burhanuddin;
4. Pola pembinaan keagamaan khusus bagi lansia belum ada, tetapi yang berjalan selama ini mengikuti pola yang diprogramkan oleh Yayasan Pondok Pesantren.

Rekomendasi

1. Perlu ada kerjasama antar masing-masing instansi terkait dalam hal pembinaan keagamaan Lanjut Usia;
2. Kepedulian Bupati Kabupaten Padang Pariaman terhadap para lansia perlu dipertahankan terus.
3. Kebijakan pemerintah tentang pembinaan kehidupan beragama lanjut usia perlu payung hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Sosial RI, *Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, Jakarta, 2007.
- Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, *Keputusan Menteri Sosial RI No. : 15/HUK/2007*, Jakarta, 2007.
- Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka*, BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2006
- Kondisi Sosial Ekonomi Lanjut Usia di Indonesia*, *Komisi Nasional Lanjut Usia*, Jakarta, 2006
- Kumpulan Kesepakatan Internasional Bidang Lanjut Usia*, *Komisi Nasional Lanjut Usia*, Jakarta, 2007
- Statistik Penduduk Lanjut Usia*, BPS 2006
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2006.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Pembinaan Keagamaan Bagi Masyarakat Lanjut Usia*, Jakarta, 2002.

Kehidupan Beragama Lanjut Usia di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah - Pekanbaru

Ahsanul Khalikin

*Peneliti pada Puslitbang
Kehidupan Keagamaan,
Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama.*

Abstract:

This research intends to observe the effectiveness of the regulations regarding to elder guidance, guidance pattern, supporting factors, and its challenges. The case study located in PTW Khusnul Khotimah Pekanbaru shows that constitutions and regulations on general elderly welfare have been implemented by BPSTW Khusnul Khotimah, Pekanbaru. The religious life guidance pattern is currently conducted in a simple manner, institutionally in coordination with the former Head of KUA, MKMT, and DMI organizing members; also non-institutionally along with volunteers from college students. Among the religious guidance supporting factors are: sufficient source of funding from Regent budget/ APBD; government policy to divide social service work equally to all employees, philanthropy from the wealthy Chinese and Muslim citizens to donate help, the existence of religious guidance voluntary work; and a conducive environment. The challenge is as follows: The fund is considered insufficient; structural position subsidies based on Labor Standard Operation//SOTK is not available; less optimized service, due to the absence of professional guidance labor; and less optimized guidance materials.

Keywords: *elder guidance, social service*

Latar Belakang

Sebagai bangsa yang memiliki nilai luhur, adalah suatu keharusan untuk memberikan rasa hormat kepada orang tua dan bersikap santun walaupun telah masuk lanjut usia (lansia). Cara melakukan penghormatan dan penghargaan kepada lansia di antaranya adalah dengan memberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya sebagai contohnya adalah memberikan perhatian dan peningkatan pelayanan keagamaan/mental spiritual (Kep. Mensos RI No. 15/HUK/2007).

Tindak lanjut dari Keputusan Menteri Sosial tersebut adalah dengan disusunnya Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia bagi Panti (No. 4/PRS-3/KPTS/2007) yang berisi tentang pola-pola pembinaan/pembimbingan bagi lansia di panti sosial. Adapun pola pembinaan/pembimbingan yang dimaksud dalam pedoman tersebut berupa bimbingan mental-spiritual dan kerohanian dengan menggunakan metode ceramah, peragaan dan diskusi, bimbingan ibadah sehari-hari, pengajian, baca al-Qur'an.¹ Pedoman dimaksud dalam rangka meningkatkan kesadaran dan memotivasi untuk melaksanakan ibadah, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran iman, tanggung jawab moral dan pengembangan kepribadian serta mempertebal ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pembinaan lansia dalam pelaksanaannya memerlukan penanganan terpadu melalui peningkatan peran lintas sektor, lembaga swadaya masyarakat serta partisipasi aktif masyarakat. Koordinasi dalam program kerja, pendataan, pemanfaatan pelayanan, pengenalan diri masalah lansia sampai kepada masalah pendanaan sangat diperlukan. Selama ini keterlibatan sektor dalam pembinaan lansia sudah dilaksanakan namun masih perlu diintegrasikan dengan baik sehingga dapat diperoleh hasil optimal.²

Dalam rangka memperoleh informasi dan gambaran yang lebih jelas mengenai pembinaan keagamaan di panti sosial khusus lansia, perlu dilakukan penelitian tentang: *Pembinaan Kehidupan Beragama Lanjut Usia di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah - Pekanbaru.*

¹Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 4/PRSS-3/KPTS/2007, *Pedoman Pelayanan Lanjut Usia*, 2007, hal 23-24

²Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Panduan Program Bina Keluarga Lansia (BKL) Percontohan*, tahun 2006

Masalah atau pertanyaan penelitian ini dirumuskan; a) bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan lansia BPSTW Khusnul Khatimah Pekanbaru?; b) bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan kehidupan beragama lansia?; c) bagaimana pola pembinaan kehidupan beragama lansia, khususnya di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah - Pekanbaru; c) apa saja faktor pendukung dan kendala dalam pembinaan kehidupan beragama lansia?

Penelitian ini diharapkan mendatangkan kegunaan dan manfaat dengan harapan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan peningkatan kehidupan beragama lansia di panti-panti sosial dalam melakukan pembinaan kehidupan beragama yang optimal.

Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan berbagai instrumen yang diperlukan dalam penelitian kualitatif. Obyek penelitian adalah panti lansia yang ada di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru Riau.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara mendalam (*depth interview*) dan observasi secara langsung. Di samping itu dilakukan pula telaah dari buku-buku dan laporan-laporan hasil penelitian yang relevan, serta dari dokumen-dokumen di balai pelayanan sosial. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yang terdiri dari: 1) reduksi data (seleksi dan penyederhanaan), 2) penyajian data (*display*) yang dinarasikan, dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

Kerangka Pemikiran

Peningkatan kesejahteraan sosial lansia dapat dilakukan melalui pelestarian nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Pelestarian nilai-nilai agama dan budaya dapat dilakukan melalui pembinaan kehidupan beragama bagi lansia. Pembinaan ialah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperoleh hasil yang lebih baik³. **Pembinaan** yang dimaksud mencakup beberapa hal

³Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia BP*, Edisi ke III, Jakarta: 2001, hal. 885

antara lain kebijakan, koordinasi, penyuluhan dan bimbingan, pemberian bantuan, perizinan dan pengawasan. Pola adalah : a. Bentuk atau struktur yang tetap; b. sistem atau cara kerja.⁴ Sedangkan **Pola** yang dimaksud dalam kajian ini meliputi beberapa aspek yaitu: 1) aspek kelembagaan, 2) aspek ketenagaan, 3) aspek materi, 4) aspek metode dan 5) aspek manajemen. **Kehidupan beragama** ialah realita pemahaman, kegiatan dan pengamalan agama, baik oleh individu maupun kelompok.

Beragam cara yang dapat dilakukan dalam pembinaan kehidupan beragama para lansia di panti sosial. Metode pembinaan sebagian besar dalam bentuk ceramah, tanya jawab dan dengan cara diskusi. Cara pembinaan umumnya diberikan buku-buku keagamaan dan buku do'a. Pembinaan lansia di panti sosial tidak lepas dari kendala dan faktor-faktor pendukung. Kendala yang ada antara lain menurunnya kemampuan lansia menurun dalam mengikuti pembinaan kehidupan beragama.

Aspek yang diungkap dalam studi ini meliputi 6 (enam) hal, di antaranya: *pembina* (jumlah dan profil: usia, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain), *lansia* (jumlah dan profil: usia, pendidikan, alasan masuk panti, dan lain-lain), *materi pembinaan* (aqidah/teologi, peribadatan/kebaktian, akhlak/moral), metode pembinaan (ceramah, tanya jawab, praktik, dan lain-lain), *sarana pembinaan* (buku agama, papan tulis, VCD, dan lain-lain), *efek pembinaan* (pelaksanaan, keberhasilan dan hambatan), serta gambaran umum pengamalan sesuai ajaran agama masing-masing. Aspek lain yang dikembangkan dalam penelitian ini ialah melihat sejauhmana *implementasi peraturan perundang-undangan tentang lansia, serta kebijakan pemerintah daerah tentang peningkatan kesejahteraan lansia sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah.*⁵

Gambaran Lokasi Penelitian

Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km², terletak antara 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur 0° 14' – 0° 45' Lintang Selatan. Batas wilayah adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten

⁴Ibid

⁵Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Desain Operasional Penelitian tentang "Pembinaan Kehidupan Beragama Lanjut Usia pada Panti-Panti Sosial di Indonesia", Tahun 2008.

Kampar dan Kabupaten Pelalawan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Jumlah pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru tahun 2006 sebanyak 754.467 orang, terdiri dari penduduk laki-laki 380.993 orang dan penduduk perempuan 373.474 orang. Klasifikasi penduduk berdasarkan agama yang menganut agama Islam 462.488 orang (61,30%), Kristen 115.660 orang (15,33%), Katolik 77.107 orang (10,22%), Hindu 7.394 orang (0,98%), Budha 92.498 orang (12,26%).

Profil BPSTW Khusnul Khotimah - Kota Pekanbaru

Sejak berdiri tahun 1981, lembaga ini bernama Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah, setelah beralih wewenang dari Pusat ke Daerah (Undang-Undang No. 22 Tahun 1999) berubah menjadi Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah – Pekanbaru, sebagai unit pelaksana teknis Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. Tugas pokoknya memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi para lansia berupa penampungan jaminan hidup seperti makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan, pengisian waktu luang termasuk rekreasi, bimbingan sosial, mental agama, bantuan pemecahan masalah (penanganan kasus) serta konseling sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya tenteram lahir dan batin.⁶

Balai Pelayanan sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah - Pekanbaru yang disingkat dengan BPSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru beralamat di Jalan Kaharuddin Nasution No. 116 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai.⁷ Mulai saat berdiri sampai sekarang telah melaksanakan pembinaan dan pelayanan kepada 387 orang lansia. Jumlah klien saat ini sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang berasal dari kabupaten dan kota di Provinsi Riau.⁸

⁶Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru - Badan Kesejahteraan Sosial Propinsi Riau, *Profil Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru*, 2007, tanpa hal.

⁷Ibid

⁸Ibid

BPSTW Khusnul Khotimah - Pekanbaru memiliki luas $\pm 9.000\text{m}^2$. Bangunan fisik yang ada meliputi: 1 unit kantor, 13 unit wisma, 1 unit gedung serba guna, 1 unit rumah dinas kepala, 4 unit rumah petugas, 1 unit aula keterampilan, 1 unit tempat ibadah berupa mushalla, 1 unit poliklinik, 1 unit gudang, 1 unit tempat mandi jenazah, 1 unit dapur umum, 2 unit gerasi mobil, 1 unit pos satpam, dan 1 hektar tempat pemakaman milik panti.

Visi panti sosial ini adalah “terwujudnya kesejahteraan sosial bagi para lansia yang didasarkan iman dan taqwa serta nilai-nilai budaya”. Sedangkan misinya antara lain : a) meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan panti, b) meningkatkan pelayanan, informasi dan kesejahteraan, c) meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan individu, keluarga serta masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lansia.

Tujuan dari panti sosial ini adalah; a) terbinanya lansia terlantar yang mengalami masalah sosial melalui pemberian pelayanan dan perawatan jasmani, rohani, kesehatan, sosial, konsultasi dan rehabilitasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup secara wajar. b) tumbuhnya kemandirian lansia. c) tercegahnya keterlantaran lansia yang mengalami masalah sosial sehingga lansia dapat hidup secara wajar.

Sedangkan tugas dan panti lansia tersebut adalah memberikan pelayanan dan perawatan jasmani, rohani, kesehatan, sosial konsultasi dan rehabilitasi kepada lansia terlantar agar para lansia tersebut dapat hidup secara wajar. Selain itu memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu; sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial lansia, melaksanakan pemenuhan kebutuhan hidup (sandang, pangan, papan), melaksanakan pemeliharaan kesehatan, pengisian waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat (termasuk kegiatan yang bersifat kreatif) memberikan rehabilitasi bagi yang bermasalah seperti masalah relasi dalam keluarga dan masyarakat, masalah ekonomi serta masalah pribadi. Kemudian juga membuka konsultasi bagi lansia yang yang berada di dalam maupun luar panti yang tinggal bersama keluarga.

Panti sosial berfungsi sebagai pusat informasi kesejahteraan sosial lansia khususnya di bidang pembinaan kesejahteraan sosial lansia yakni melaksanakan penyediaan data pembinaan kesejahteraan sosial lansia dan menyebarkan informasi usaha kesejahteraan sosial lansia. Panti sebagai pusat pengembangan usaha kesejahteraan sosial, yakni dengan menyediakan sarana pembinaan kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia bagi yang tinggal di dalam panti maupun di luar, menyediakan sarana pembinaan dalam menciptakan suasana hubungan yang serasi antara sesama lanjut usia, menyediakan sarana pemberian keterampilan kepada lanjut usia yang berkemampuan sesuai dengan kondisi lanjut usia untuk meningkatkan kemampuan di bidang keterampilan.

Sasaran pemberian pelayanan adalah para lansia yang terlantar dengan kriteria sebagai berikut: tidak mempunyai keluarga, tidak mendapatkan perawatan dari keluarga, usia minimal 60 tahun, mengajukan surat permohonan untuk diterima sebagai klien yang dialamatkan kepada Kepala BPSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru, membuat pernyataan penyerahan diri dari ahli waris/penanggung jawab kepada kepala kantor, berasal dari keluarga tidak mampu dengan dibuktikan surat keterangan dari pemerintah setempat, tidak mempunyai penyakit menular dengan keterangan dari Puskesmas atau pihak yang berwenang, phas photo, dapat mengurus diri sendiri, calon klien sebelum diterima/disetujui terlebih dahulu dilakukan home visit, dan surat izin dari pihak keluarga atau yang bertanggung jawab.

Target pemberian pelayanan ini adalah terlaksananya proses pembinaan dan pelayanan kepada klien secara optimal, sehingga para klien dapat menikmati hari tua secara wajar dan layak; tercapainya target kuantitatif dengan terpenuhinya kapasitas sebanyak 100 orang, sehingga tujuan dan fungsi balai pelayanan ini dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia di Provinsi Riau dapat terlaksana secara optimal. Sedangkan target kualitatifnya yaitu: a) terbinanya lansia terlantar, sehingga mereka dapat kembali menikmati hari tua secara wajar dan layak; b) tercapainya kualitas penghidupan dan kehidupan lansia sewajarnya; c) terpeliharanya kesehatan jasmani dan rohani lansia; d) klien dapat mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang berguna, yaitu dengan melakukan

kegiatan positif seperti: keterampilan (beternak, berkebun dan kerajinan tangan), berekreasi, olah raga atau kegiatan lainnya sesuai dengan motto Mengisi Hari Tua yang Berguna dan Bahagia.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan rutin berupa pelayanan spritual keagamaan (bimbingan mental spritual). Pelayanan keagamaan dilaksanakan dengan memberikan pelayanan bimbingan mental agama, spritual bekerjasama dengan KUA Kecamatan Marpoyan Damai dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi Riau. Kegiatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui kerjasama dengan RSUD Kota Pekanbaru, Rumah Sakit Jiwa serta Puskesmas Simpang Tiga dilakukan 1 kali seminggu. Kerjasama ini diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa dengan memberikan pelayanan gerontik terhadap lansia, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada klien khususnya dibidang kesehatan. Kerjasama pelayanan dengan perguruan tinggi antara lain: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pekanbaru, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Riau, Politekes Pekanbaru, Akper Payung Negeri, Akper Abdurrah, Akper UNRI, Akper Muhammadiyah, Akper Dharma Husada, Akper Maharatu, Akper Hangtuah, dan Akper Tuanku Tambusai.

Pembinaan juga dilakukan atas kerja sama dengan ormas yang peduli dengan lansia terlantar dilakukan baik secara kelompok maupun perorangan. Bantuan yang diberikan berupa bantuan makanan, pakaian dan uang. Kegiatan pelayanan di luar panti dilakukan kepada sebanyak 50 orang calon klien binaan. Pembinaan dan pengembangan lansia luar panti tersebut seperti pelayanan kesehatan, pengajaran keterampilan mengisi waktu luang, rekreasi, jaminan hidup dan mengundang para lansia di luar panti pada kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang dilakukan sekali dalam setahun dan diikuti dengan pemberian paket.

Tidak semua usia lansia tersebut potensial dan produktif, namun terdapat pula yang tidak potensial dan bahkan terlantar sehingga tidak dapat menikmati hidup pada hari tuanya secara wajar dan layak sesuai harkat dan martabatnya. Hal tersebut disebabkan karena keadaan sebagai berikut: a) sudah tidak mempunyai keluarga lagi. b) keluarganya nyata-

nyata tidak diketahui keberadaannya c) ketidakmampuan keluarganya, baik secara materi maupun non materi untuk mengurusnya. d) yang bersangkutan tidak bersedia tinggal bersama keluarga.

Pembinaan dan pelayanan dilakukan langsung kepada klien dan dikerjakan oleh pekerja sosial yang berjumlah 9 orang dan dibantu oleh keluarga asuh di setiap wisma. Adapun proses pembinaan dan pelayanan yang dilaksanakan terdiri dari lima tahap yaitu: a) sosialisasi (berupa penyuluhan, pendataan dan survei oleh petugas balai bersama petugas Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. b) komunikasi bersama pekerja sosial (balai) dengan lansia dan keluarganya. Pada kesempatan ini dilakukan hal-hal seperti: perjanjian dan konsultasi awal dimana dalam kegiatan ini dengan memberi dukungan sosial yang memadai dengan instansi terkait, organisasi sosial dan masyarakat. Jika lansia telah memenuhi syarat sebagai calon klien dan memperoleh pelayanan di lingkungan balai; c) Identifikasi calon klien; meliputi data lengkap calon klien antara lain identitas, pelayanan yang pernah diterima, kasus/ masalah yang dihadapi, kebutuhan, potensi dan menganalisisnya melalui pengisian formulir bahan seleksi serta lain-lain yang menyangkut kondisi calon klien balai; d) seleksi calon klien; kegiatan seleksi dimaksudkan untuk memilih dan menetapkan lansia sebagai calon klien dalam balai. Seleksi klien didasarkan pada informasi yang diperoleh, seleksi meliputi antara lain seleksi administrasi (persyaratan administrasi telah ditentukan) oleh pekerja sosial dan seleksi fisik dilakukan oleh petugas paramedis; e) kontrak; Pendaftaran register setelah klien diterima resmi menjadi klien balai, kemudian dilakukan kontrak/kesepakatan pelayanan secara tertulis antara klien dan pekerja sosial, meliputi: ruang lingkup pelayanan, langkah-langkah bersama yang akan dilakukan, hak dan harapan serta persetujuan dari pekerja sosial untuk melaksanakan pelayanan sosial. Kemudian dilakukan penempatan sesuai dengan kasus dan program penanganan yang akan dilakukan oleh balai.

Pembinaan Kehidupan Keagamaan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 tentang kesejahteraan lanjut usia disebutkan: "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh

negara". Dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 di sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial disebutkan bahwa membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial menjelaskan tugas-tugas pemerintah ialah: a) menentukan garis kebijakan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial; b) memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab sosial masyarakat; c) melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dalam Bab V Ps 12 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial di antaranya: a) pelayanan keagamaan dan mental spritual; b) pelayanan kesehatan; c) pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; d) pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; e) perlindungan sosial.¹⁰ Pelaksanaan pelayanan keagamaan dalam Bab VI Pasal 13 ayat 1 dan 2 disebutkan: 1) Pelayanan keagamaan dan mental spritual bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2) Pelayanan keagamaan dan mental spritual sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom: a) Pasal 2 ayat (3) angka 12 huruf c berbunyi : penetapan pedoman pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial dan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

⁹Ibid

¹⁰Direktorat Bina Pelayanan Sosial Lanjut Usia - Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial RI, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, Cet. Ulang, Jakarta, 2006, hal. 6

(merupakan kewenangan Pemerintah Pusat), b) Pasal 3 ayat (5) angka 11 Bidang Sosial huruf a berbunyi : mendukung upaya pengembangan pelayanan sosial (merupakan kewenangan Provinsi).¹¹

Keputusan Gubernur Riau Nomor 10/2000 Tanggal 26 Pebruari 2000 tentang Dinas Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau.¹²

Prinsip Pelayanan yang diberikan oleh pengelola BPSTW Khusnul Khotimah – Pekanbaru untuk lansia terlantar berdasarkan penilaian pada usia lansia yang tidak potensial dan kurang berdaya dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, memerlukan bantuan pihak lain. Pelayanan kesejahteraan sosial lansia bersandar pada kaidah-kaidah pekerjaan sosial profesional, hak azasi lansia, keterpaduan dan aksesibilitas, serta partisipasi. Prinsip pelayanan tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang satu dengan lainnya saling terkait, melengkapi dan diyakini sebagai suatu kebenaran dalam memberikan pelayanan terbaik bagi kesejahteraan sosial lansia. Prinsip pelayanan ini didasarkan pada Resolusi PBB nomor 46/1991 tentang Principles for Older Persons (Prinsip-Prinsip bagi lansia) yang pada dasarnya berisi tentang hak dan kewajiban lansia yang meliputi kemandirian, partisipasi, pelayanan, pemenuhan diri dan martabat.

Ada beberapa prinsip pelayanan kesejahteraan sosial dalam panti yang harus dilakukan oleh pengelola panti sosial, yaitu: a) memberikan pelayanan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat lansia; b) melaksanakan hak asasi lansia; c) memberikan kesempatan kepada lansia untuk mendapatkan hak menentukan pilihan bagi dirinya sendiri; d) memberikan pelayanan yang didasarkan pada kebutuhan sesungguhnya; e) mengupayakan kehidupan lansia lebih bermakna bagi diri, keluarga dan masyarakat; f) menciptakan suasana kehidupan dalam panti yang bersifat kekeluargaan; g) menjamin terlaksananya pelayanan bagi lansia yang disesuaikan dengan perkembangan pelayanan lansia

¹¹Ibid, hal. 5-6

¹²Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru, Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau, *Profil Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru*, 2007, hal. Tanpa hal.

secara terus menerus serta meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak; h) menerapkan pendekatan antar disiplin dan antar profesi; i) memasyarakatkan informasi tentang aksesibilitas bagi lansia agar dapat memperoleh kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana serta perlindungan sosial dan hukum.

Metode pelayanan kesejahteraan sosial lansia yang dilakukan berdasarkan prosedur kerja yang sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia antara lain dengan manajemen kasus, metode pekerjaan sosial dan jaringan kerja.

Manajemen kasus merupakan metode pelayanan yang berupaya memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan sosial lansia melalui pemanfaatan dan pendayagunaan jaringan kerja dengan berbagai sektor penyedia pelayanan. Metode ini sebagai salah satu pendekatan pelayanan ditujukan untuk menjamin agar lansia yang bermasalah secara kompleks dapat memperoleh semua pelayanan yang dibutuhkan secara tepat. Manajemen kasus bertujuan di antaranya; untuk mengungkap permasalahan dan kebutuhan lansia, manajemen terselenggaranya pelayanan lintas sektor, terpenuhinya berbagai kebutuhan lansia, memfasilitasi lanjut usia dalam memperoleh akses pelayanan, dan menjelaskan kepada lansia tentang syarat mendapatkan pelayanan.

Metode pekerjaan sosial terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu; pekerjaan sosial dengan individu, pekerjaan sosial dengan kelompok, dan pekerjaan sosial dengan masyarakat. Pengertian pekerjaan sosial dengan individu adalah suatu proses pelayanan profesional yang diberikan oleh pekerja sosial kepada lansia yang mengalami permasalahan psikososial yang mengganggu peranan sosialnya. Metode ini bertujuan untuk membantu untuk lansia dalam pemenuhan kebutuhan, menghadapi dan memecahkan masalahnya serta dalam peningkatan kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungannya sehingga terjalin relasi sosial secara lebih efektif dan efisien. Adapun pengertian pekerjaan sosial dengan kelompok adalah proses pertolongan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu mengatasi permasalahan psikososial yang dialami klien dengan memanfaatkan hubungan kelompok sebagai

media. Sedangkan pengertian pekerjaan sosial dengan masyarakat adalah suatu proses pertolongan profesional yang dilakukan pekerja sosial untuk membantu masyarakat memahami permasalahan lansia.

Jaringan kerja merupakan mekanisme kerja sama setiap tingkatan wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota) yang memadukan secara sinergis semua pemilik sumber (pemerintah dan masyarakat) demi terwujudnya berbagai bentuk pelayanan kesejahteraan sosial lansia. Tujuan jaringan kerja adalah: a) memperluas jangkauan pelayanan lansia, b) meningkatkan kualitas pelayanan lansia, c) meningkatkan kesejahteraan sosial lansia.

Proses pelayanan lansia di dalam panti berupa bantuan pertolongan, perlindungan, bimbingan, santunan dan perawatan yang dilakukan secara sistematis, terarah dan terencana atas dasar pendekatan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lansia. Proses pelayanan dilakukan dengan tahap; a) persiapan (sosialisasi panti, kontak, kontrak, assesment, dan rencana intervensi; b) pelaksanaan (pelayanan sosial, pelayanan fisik, pelayanan psikososial, pelayanan keterampilan); c) pelayanan spiritual/keagamaan (pelayanan pendampingan, dan pelayanan bantuan hukum).

Monitoring dan evaluasi, dilakukan oleh Pekerja Sosial terhadap orang yang dianggap paling dekat dengan klien. Dari monitoring akan didapatkan berbagai catatan seperti catatan proses dan catatan kasus. Catatan-catatan tersebut dianalisis dan dievaluasi untuk dijadikan laporan gunanya sebagai bahan untuk pembahasan kasus. Evaluasi merupakan proses untuk menentukan apakah tujuan pelayanan telah tercapai, dan apakah metode yang digunakan telah tepat sasaran dan penggunaannya. Evaluasi dilaksanakan oleh Pekerja Sosial, Pimpinan Panti dan klien itu sendiri.

Tahap terminasi adalah tahap diputuskannya pelayanan kepada lansia oleh panti. Terminasi dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja Sosial, Pimpinan Panti dan klien (lanjut usia). Kegiatan ini dilakukan bilamana: a) klien meninggal dunia, b) klien membutuhkan rujukan ke lembaga lain, karena panti tidak mampu menyediakan

pelayanan yang dibutuhkan oleh klien, dan c) dikembalikan ke lingkungan keluarganya.

Tahap pembinaan lanjut, dilaksanakan setelah lansia tidak lagi menerima pelayanan profesional dari pekerja sosial. Tujuan tindak lanjut adalah untuk memantau dan memelihara hasil-hasil yang telah dicapai dalam proses pelayanan.

Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Kehidupan Beragama

Biaya operasional tahun 2008 BPSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru sebesar 1.2 milyar rupiah, termasuk biaya pelayanan klien lanjut usia, belanja pegawai negeri dan pegawai honorer, serta keperluan perawatan. Biaya tersebut masih dirasakan belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Idealnya menurut pengelola dana operasional yang diperlukan adalah 2 milyar rupiah dengan harapan mencapai target rencana kegiatan yang sudah dibuat oleh pengelola.

Dapat dibayangkan untuk melayani klien sebanyak 90 orang dengan jadwal makan dan snack tiga kali sehari, kemudian pada jam 10 pagi tersedia snack, makan siang, snack sore, dan makan malam, diperhitungkan perorang Rp. 17.000,-/hari x 90 klien = Rp. 1.530.000,- x 30 hari = Rp. 45.900.000,- x 11 bulan = Rp. 504.900.000,- jadwal menu tersebut terkecuali yang berbeda di bulan puasa yaitu dengan makan sahur, berbuka puasa, makan malam, dan snack setelah shalat terawih dengan biaya tidak kurang dari menu hari biasanya. Biaya operasional ini belum termasuk keperluan belanja pegawai dan perawatan fasilitas.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru dan Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau agar Pemda memberikan perhatian dan anggaran yang mencukupi kebutuhan dimaksud, namun dalam realitas tidak pernah dilakukan. Meskipun diceritakan bahwa untuk pemberdayaan pelayanan ke depan dilakukan studi banding ke negara Malaysia dan Singapura oleh Pemda Provinsi Riau dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial, namun tidak pernah terwujud dalam realiasasi yang sesungguhnya.

Pemberian pelayanan bimbingan mental agama bekerjasama dengan Drs. Nazir Khatib (mantan Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai), Dra. Hj. Nurmala (Badan Kontak Majelis Taklim) Provinsi Riau. Kerjasama ini sudah lama namun belum pernah dilakukan evaluasi dan perubahan baik aspek tenaga pembimbing, materi pembinaan maupun metode pembinaan keagamaan. Selain itu, juga memanfaatkan tenaga honorer Suhardi Rahmat (Mahasiswa Universitas Islam Riau) yang tinggal bersama dengan klien dan pekerja sosial lainnya.

Pembinaan keagamaan juga dilakukan pada saat bulan Ramadhan dengan melibatkan penceramah dari Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Riau. Kegiatan ceramah biasanya dilakukan setelah shalat terawih dan shalat subuh berjamaah. Kegiatan refreshing minimal satu kali sebulan, khusus klien laki-laki dengan syarat fit staminanya.

Materi bimbingan keagamaan yang disampaikan oleh 3 tenaga pembimbing. Dari segi metode maupun materi berbeda-beda. Bimbingan keagamaan yang dilakukan Drs. Nazir Khatib dilakukan pada hari Senin atau Jum'at pagi jam 08.30 s.d. 10.30 dengan materi bimbingan masalah aqidah dan ibadah (ibadah mahdah; seperti thaharah, shalat, puasa, zakat, haji); Muamalah (infaq, sedakah, birrul walidain dan menyayangi yang muda, saling menyayangi sesama manusia), muamalah dengan alam sekitarnya (menjaga kelestarian lingkungan, menyayangi binatang peliharaan dan tanaman, menjaga kebersihan dan keindahan).

Bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh Ust. Suhardi Rahmat dilakukan setelah shalat fardhu berjamaah di mushalla BPSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru. Materi yang disampaikan mengenai keutamaan shalat berjamaah, keutamaan zikir dan do'a, rukun wudhu dan shalat, shalat sunnat, aturan dalam keadaan shalat masbuq dan lain-lain. Bahan rujukan yang disampaikan kaidah-kaidah umum pelajaran Islam.

Pembinaan oleh Dra. Hj. Nurmala, pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Riau dilakukan pada hari Sabtu jam 10.30 WIB. Materi bimbingan yang disampaikan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang berhubungan dengan sejarah para nabi, sahabat, ulama dan umara sesudah jaman sahabat yang menjadi suri tauladan bagi pengikut Nabi

Muhammad SAW. Materi lainnya juga disinggung tentang kehidupan hari akhir lebih baik dari kehidupan di dunia, makna kehidupan dan kematian bagi makhluk manusia sebagai hamba Allah. Untuk mengurangi kejenuhan di kalangan klien lanjut usia yang hadir, materi diisi dengan qasidahan dan rebana (marawis).

Metode penyampaian materi oleh para penceramah kepada klien lanjut usia yang hadir \pm 25 – 30 klien dari 90 klien, pada umumnya menggunakan metode ceramah dilanjutkan dengan tanya jawab. Waktu yang digunakan berkisar \pm 1,5 – 2 jam. Ust. Suhardi lebih banyak mempraktekkan shalat, puasa, niat setiap melakukan ibadah shalat, puasa dan lainnya. Begitu pula dengan penceramah Pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau, selalu dilakukan praktek shalat, puasa, membayar zakat, sedekah, infaq, dan berkorban bagi yang bisa menabung. Namun, metode penyampaian yang digunakan belum memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan dengan pimpinan BPSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru, para pegawai, keluarga asuh, pekerja sosial, dan klien, pada umumnya mereka mendapatkan ketenangan dan kenyamanan tinggal bersama di panti. Mereka tidak banyak berharap dan bercita-cita untuk kehidupan dunia. Yang ada hanya bagaimana melakukan perbuatan amal ibadah sebaik mungkin untuk menanti kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya.

Semua problema keluarga dan dirinya sendiri yang tidak bermanfaat termasuk berbagai kemaksiatan atau pun kesalahan di waktu mudanya, mereka lupakan untuk tidak diingat dan dipikirkan kembali, yang ada hanya kenikmatan tinggal di BPSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru dan ibadah yang bermanfaat. Namun tidak semua klien lanjut usia yang punya pandangan dan pikiran seperti itu, ada di antara mereka pasrah apa adanya tanpa lebih banyak melakukan ibadah untuk menghadapi kematian, ada juga senang menunggu kunjungan dan bantuan materi atau pun pakaian tanpa diimbangi dengan ibadah shalat, zikir, puasa dan ibadah lainnya.

Latar belakang pendidikan agama mereka tergolong rendah, sehingga mereka merasa lebih banyak mendapatkan hal yang baru

tentang pengamalan agama. Sebelumnya tidak pernah shalat, puasa, zikir akhirnya mereka lakukan walaupun masih banyak kejanggalan atau pun kesalahan. Mereka menjadi rajin dan menemukan makna hidup yang sebenarnya sebagai hamba Allah yang lemah dan tidak berdaya.

Mereka diajarkan berbuat baik sesama manusia dan makhluk lainnya sehingga setiap kunjungan dan bantuan yang diberikan oleh tamu dermawan menjadikan beberapa klien rajin menabung untuk membeli sapi atau kerbau yang dipersiapkan untuk korban sehingga dagingnya dapat dibagikan ke masyarakat di sekitarnya. Kegiatan seperti ini sudah dilakukan tiga tahun berturut-turut setiap hari raya Idhul Adha.

Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam melakukan pembinaan keagamaan terhadap klien lanjut usia sangat mendorong pengamalan keagamaan, seperti shalat fardhu berjamaah menjadikan mereka lebih terasa akrab dan kekeluargaan terjalin dengan baik serta merasa lebih betah tinggal di panti sampai akhir hayatnya.

Pola Pembinaan Keagamaan

Pola pembinaan kehidupan beragama yang dilakukan secara kelembagaan dengan bekerjasama dengan KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Riau, dan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau. Secara non-kelembagaan juga dilakukan dengan melibatkan mahasiswa UNRI yang memerlukan bantuan biaya dan tempat tinggal selama masih berstatus mahasiswa.

Kerjasama ini tidak pernah dilakukan evaluasi atau pun perubahan oleh masing-masing pihak. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau dan Kepala Bidang Penerangan Masyarakat Islam selaku pimpinan KUA Kecamatan setelah dikonfirmasi, ternyata tidak banyak mengerti tentang kegiatan yang dilakukan oleh BPSTW Khusnul Khotimah. Jelasnya pola pembinaan keagamaan yang sudah melibatkan kerjasama dengan pihak luar tidak dikoordinir dengan baik, sehingga kondisi apapun yang dilakukan tidak banyak diketahui dan dipahami oleh masyarakat luar.

Penceramah dari luar panti yang sudah dilibatkan sebagai tenaga pembinaan dirasakan belum profesional, sehingga manfaat pembinaan

yang pernah dilakukan tidak banyak memberikan peningkatan, kecuali yang dilakukan Pengurus Dewan Masjid Provinsi Riau. Untuk pencerahan perlu ada tenaga profesional, berpengalaman dan memiliki wawasan keagamaan yang luas. Materi pembinaan keagamaan yang dilakukan selama ini memang sudah disesuaikan dengan kondisi kehidupan klien. Dari segi aqidah difokuskan pada penguatan keyakinan dan keimanan mereka agar semakin baik dan kuat, beribadah lebih tekun dan sungguh-sungguh. Dalam bermuamalah dan akhlakul karimah (budi pekerti), sopan santun selalu diingatkan agar lebih baik. Namun materi-materi pembinaan keagamaan yang disampaikan tidak ditunjang dengan literatur rujukan, lebih bersifat pengalaman pribadi. Metode penyampaian terbilang umum dan sederhana, yaitu metode ceramah dilanjutkan dengan tanya jawab, tidak disertai dengan alat peraga dan fasilitas penunjang lainnya.

Meskipun metode/cara ceramah dan tanya jawab, tetapi pemahaman mereka dirasakan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam mendengarkan dan menyerap pesan-pesan yang disampaikan.

Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembinaan para lansia di panti ini berupa bangunan fisik mushalla 1 unit, dan moda transportasi seperti 1 unit mobil ambulance. Tempat pemakaman seluas 1 hektar juga telah ada. Sedangkan bangunan mushalla berikut alat pengeras suara, karpet berupa permadani, kipas angin dan beberapa buah kitab suci al-Qur'an juga telah dimiliki.

Kepemimpinan Satuan Organisasi Tata Kerja (SOT) Balai di lingkungan Pemda Provinsi Riau belum ada alokasi anggaran untuk tunjangan jabatan struktural sehingga menjadi salah satu hambatan tersendiri bagi kinerja para pegawai. Kebijakan Pembinaan Kehidupan Beragama sedikit-tidaknya sudah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dalam Bab V Pasal 12 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial dalam pasal 13. peraturan ini kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah mengenai peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia tidak potensial.

Faktor Pendukung dan Kendala

Beberapa faktor pendukung pelayanan sosial dan pembinaan kehidupan beragama, antara lain: a) Lembaga pelayanan sosial ini adalah milik Pemda Provinsi Riau dengan dana operasional APBD Provinsi Riau. b) Terpenuhi dengan baik fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki untuk semua keperluan pembinaan pelayanan termasuk pelayanan pembinaan keagamaan. c) Kebijaksanaan pimpinan membagi rata tugas pekerjaan pelayanan sosial kepada semua karyawannya. d) Perhatian dan kepedulian masyarakat Tionghoa dan Muslim kalangan atas;. e) Tugas yang dibebankan kepada karyawan, pekerja sosial, keluarga asuh, dan tenaga pembimbing keagamaan mereka laksanakan dengan penuh tanggung jawab, saling pengertian, kebersamaan, dan atas dasar hati yang ikhlas; f) Tersedia tenaga pembimbing keagamaan yang dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan keyakinan dan ibadah bagi sebagian klien lanjut usia. g) Terciptanya suasana kondisi lingkungan dengan nyaman, tenang, bahagia dan akrab baik sebagai pimpinan, karyawan, keluarga asuh, dan pembimbing keagamaan.

Di antara kendala-kendala yang muncul antara lain; a) Anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Riau belum mencukupi untuk keperluan dana operasional kebutuhan. b) Realisasi dana yang dibutuhkan sering mengalami keterlambatan. c) Belum ada tunjangan jabatan struktural yang harus mereka terima sesuai Satuan Organisasi Tata Kerja. d) Tenaga pelaksana yang ada latar belakang pendidikan umum, sedikit sekali latar belakang pendidikan pekerja sosial yang profesional. e) Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk berkunjung yang bersifat komunikatif antara keluarga (anak, saudara, atau famili dekat) dengan klien lanjut usia yang tinggal untuk memberikan motivasi, kebahagiaan dan semangat hidup. f) Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program dan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan sosial bagi lanjut usia. g) Menurunnya kondisi kesehatan fisik, mental, dan psikologis klien lanjut usia, yang membuat keluarga asuh dan pengelola harus ekstra sabar dan ikhlas untuk melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. h) Pelayanan pembinaan keagamaan belum dilakukan secara optimal baik tenaga pembimbing,

materi, metode penyampaian, sarana dan prasarana. j) Perhatian dan kepedulian Pemda dan DPRD Provinsi Riau terhadap pelayanan sosial di kalangan lanjut usia belum optimal.

Respon Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Menurut pendapat beberapa narasumber yang berhasil diwawancarai bahwa sesuai dengan jumlah penduduk di daerah Provinsi Riau bahwa pemeluk agamanya mayoritas Islam, maka pandangan masyarakat orang asli Melayu (Riau), terhadap orang tua yang tinggal bersama di BPSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru atau Panti Sosial apapun namanya, dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Perbuatan dosa besar/tergolong menelantarkan orangtua, dalam arti pada diri orangtua ada kewajiban anak untuk berbakti terhadap keduanya sebagai balas budi/berbakti, karena mereka telah melahirkan, membesarkan dan membekali berbagai macam pendidikan dan pengalaman agar masa depan anaknya lebih baik dari orangtuanya.¹³

Warga masyarakat dari kelompok lansia tersebut, seyogyanya dapat menikmati hari tuanya bersama keluarga sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai sosial budaya yang mereka miliki. Namun, ternyata terdapat di antara mereka yang justru terlantar dan tidak dapat tinggal bersama keluarga yang mereka cintai.

Ada beberapa aspek yang penting perlu mendapatkan perhatian dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia yang harus tetap dapat diberdayakan terutama orangtua lansia/yang terlantar. BPSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah daerah berperan dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat sehari-hari secara berguna dan berkualitas, dengan tetap memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, kondisi fisiknya dan terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan sosial lanjut usia. Selain itu upaya tersebut sekaligus juga bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup para lansia yang bersangkutan.

¹³Wawancara dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru, Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Riau, Kasubag Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru dan beberapa informan (pemikiran lainnya), Pekanbaru, tanggal, 6 – 7 Juni 2008

Sehubungan dengan pelayanan pembinaan kehidupan beragama yang sudah berjalan, belum banyak komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga tidak banyak harapan untuk melihat perkembangan kehidupan beragama dari kalangan lansia. Semestinya pengelola lembaga lebih banyak melakukan komunikasi dan berinteraksi dengan lembaga pemerintah atau pun swasta yang terkait dengan profesi penyiaran agama terutama juru dakwah dari agama Islam, begitu juga dengan penyiar agama lainnya.

Penutup

Dari paparan penelitian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain; a) PERPU tentang kesejahteraan lansia yang ada telah dilakukan, namun masih ditemukan berbagai kendala yakni keterbatasan dan ketidakmampuan pelaksana dalam pengimplementasiannya, terutama di bidang keagamaan. Hal ini disebabkan belum dilakukannya koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah/lembaga swasta yang terkait dengan masalah pelayanan keagamaan; b) PEMDA Kota Pekanbaru kurang memberikan perhatian terutama alokasi dana BPSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru dan Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau; c) Belum ada tunjangan jabatan struktural bagi pengelola panti sesuai dengan ketentuan; d) Kebijakan Badan Kesejahteraan Sosial dan BPSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru dalam Pembinaan Kehidupan Beragama yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia kurang menyentuh bagi pelayanan keagamaan dan mental spritual; e) Pembinaan kehidupan beragama yang dilakukan secara lembaga dilakukan bekerjasama dengan KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Riau, dan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau. Sedangkan secara non-kelembagaan kerjasama dilakukan dengan memanfaatkan mahasiswa yang memerlukan biaya dan tempat tinggal selama masih kuliah;

Faktor-faktor pendukung terselenggaranya kegiatan di panti ini; antara lain: a) BPSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru adalah panti sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemda Provinsi Riau dimana sumber dana

operasional berasal dari APBD. b) Kebijakan pimpinan membagi rata tugas pekerjaan pelayanan sosial kepada semua karyawan. c) Perhatian dan kepedulian masyarakat, terutama golongan atas masyarakat Tionghoa dan Muslim yang memberikan bantuan berupa; makanan, pakaian, uang dan kebutuhan lainnya. d) tersedianya tenaga pembimbing keagamaan yang membantu meningkatkan kehidupan spiritual klien; e) Suasana kondisi lingkungan kondusif.

Adapun faktor kendala yang dihadapi di antaranya; a) dana pelayanan sosial dan pembinaan keagamaan dari PEMDA belum mencukupi keperluan secara keseluruhan. b) Tunjangan jabatan struktural yang diterima tidak sesuai dengan Satuan Organisasi Tata Kerja. c) Pelayanan pembinaan keagamaan belum dilakukan secara optimal oleh tenaga pembimbing; dan d) kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan pihak luar.

Sebagai input bagi perbaikan kegiatan pengelolaan panti, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi; a) Perlu dukungan biaya operasional yang mencukupi dari Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Riau; b) memberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan Satuan Organisasi Tata Kerja, sebagaimana yang dilakukan di beberapa daerah lainnya. b) Pembinaan kehidupan beragama perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk perbaikan di masa mendatang, terutama aspek tenaga pembimbing, materi, metode penyampaian, serta manajemennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1982, Lembaga Kemaslahatan Nahdhotul Ulama, *Membina Kemaslahatan Keluarga*, Jakarta.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2006, *Panduan Program Bina Keluarga lansia (BKL) Percontohan*, Jakarta.
- Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru - Badan Kesejahteraan Sosial Propinsi Riau, 2007, *Profil Balai Pelayan Sosial Tresna Werdha Khusunul Khotimah Pekanbaru*.

- Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Direktorat Bina Pelayanan Sosial Lanjut Usia, 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, Cetak Ulang, Jakarta.
- Direktorat Kesejahteraan Anak - Keluarga dan Lanjut Usia - Direktorat Jenderal Pelayanan Sosial, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, 2001, *Acuan Umum Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*, Jakarta.
- Direktorat Bina Pelayanan Sosial Lanjut Usia - Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Departemen Sosial RI, 2006, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, Cet. Ulang, Jakarta.
- Direktorat Bina Pelayanan lanjut Usia - Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Departemen Sosial RI, 2006, *Buletin, Pelayanan Sosial Lanjut Usia*, Jakarta.
- Komisi Nasional Lanjut Usia, 2006, *Kondisi Sosial-Ekonomi Lanjut Usia di Indonesia*, Jakarta.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 4/PRSS-3/KPTS/2007, 2007, *Pedoman Pelayanan Lanjut Usia*. Jakarta
- Komisi Nasional Lanjut Usia, 2005, *Keppres No. 52/2004*, Jakarta
- Depdiknas, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia BP*, Edisi ke III, Jakarta.
- Keputusan Menteri Sosial RI, No.15/HUK/2007: 5

Kehidupan Beragama Lanjut Usia di PSTW Budhi Dharma, Bekasi

Ibnu Hasan Muchtar

*Peneliti Madya pada
Puslitbang Kehidupan
Keagamaan, Badan Litbang
dan Diklat Departemen
Agama.*

Abstract:

This research intends to understand how the implementation of regulations regarding elder welfare in the religious sector is; how the governmental policies/directors get involved in the religious life guidance for the elders; guidance patterns; supporting factors and challenges in religious life guidance for the elders. Case study which was conducted in Tresna Werda Budhi Dharma Bekasi Social Care applies a qualitative approach. Data is collected by in-depth interviews and literature research. It indicates that various regulations regarding elder welfare hasn't received sufficient attention from the directors of PSTW Budhi Dharma Bekasi. Furthermore, Depsos (Social Department) and leaders of the social care haven't given significant policies for elder guidance. Even though a special pattern of guidance is absence, there is a strong will and enough room from leaders of the social care to perform guidance and service, along with all the programs which they have designed.

Keywords: *guidance, policy, elders*

Pendahuluan

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1991 membawa konsekuensi bagi masyarakat dunia Internasional untuk

memberi perhatian pada penduduk lanjut usia (lansia), yang secara simbolik diwujudkan melalui penetapan 1 Oktober sebagai International Day for the Elderly.

Usia lansia di Indonesia dari segi jumlahnya mengalami peningkatan. Pada tahun 1980, jumlah penduduk lansia sekitar 7.998.543 jiwa (5,45%) dari seluruh jumlah penduduk. Sepuluh tahun kemudian (1990) menjadi 12.778.121 jiwa (6,29%), dan pada tahun 2000 menjadi 17.767.709 jiwa (7,97%). Diperkirakan pada tahun 2010 mencapai 23.9 juta jiwa (9,77%) dan pada tahun 2020 akan mencapai 28.822.879 jiwa (11,34%).

Jumlah lansia saat ini mencapai sekitar 8 % dari total penduduk Indonesia. Tidak menjadi masalah bila para lansia itu kalangan menengah ke atas di daerah perkotaan dan kehidupan mereka di usia senja sudah terjamin. Namun, kenyataannya para lansia di perkotaan juga tidak sedikit yang terlantar dan sebagian besar lansia di daerah pedesaan dalam kondisi tidak jauh berbeda, hidup tidak berkecukupan.

Peningkatan jumlah lansia tersebut juga dipicu keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) melalui program Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). (BKKBN, 2001: 3).

Masalah lansia dilihat dari aspek sosial, upaya *stake holder* bagi pemberdayaan lansia agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia, mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, serta secara khusus bagi lansia potensial memperoleh pelayanan kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial. Secara khusus pula bagi lansia yang tidak potensial memperoleh perlindungan sosial.¹

Selain pelayanan sosial keagamaan dan mental spiritual yang dimuat dalam UU tersebut, mereka juga memperoleh pembinaan agama sebagai bagian dari tugas Departemen Agama beserta jajarannya di tingkat daerah. Para lansia ada yang mandiri dan pada umumnya ikut bersama anak-anaknya yang telah berkeluarga, baik karena tanggung

¹UU No. 13 Tahun 1998, pasal 9-11

jawab secara moral kemanusiaan maupun dalam rangka kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Namun ada pula lansia yang tinggal di panti-panti sosial. Banyak faktor penyebab lansia ke panti sosial, di antaranya karena terlantar, atau kemauan sendiri, atau memang dengan sengaja dititipkan oleh keluarganya.

Penelitian ini memprioritaskan pada masalah lansia di panti sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa "*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*".² Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Pasal 5 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, disebutkan bahwa "*Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*". Kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas sosial lansia ditetapkan terkoordinir oleh instansi terkait baik pemerintah maupun masyarakat (Pasal 25, ayat 1). Pada tahun 2005 pemerintah telah membentuk Komnas lansia dengan tugas meningkatkan kesejahteraan sosial lansia.³

Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia, diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya, salah satunya adalah di bidang pelayanan keagamaan (mental spiritual).⁴ Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mensos tersebut, disusunlah Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia bagi Panti (No.4/PRS-3/KPTS/2007) yang berisi tentang pola-pola pembinaan/pembimbingan bagi lanjut usia di panti sosial. Adapun pola pembinaan/pembimbingan yang dimaksud dalam pedoman tersebut berupa bimbingan mental-spiritual dan kerohanian dengan menggunakan metode ceramah, peragaan dan diskusi, bimbingan ibadah sehari-hari, pengajian dan baca Al-Qur'an.⁵ Pedoman tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi dalam melaksanakan ibadah, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran iman, tanggung jawab moral dan pengembangan kepribadian serta mempertebal ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Data tentang Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia menunjukkan bahwa pada tahun 2004 terdapat 235 buah Panti Pelayanan Sosial Lanjut

²Pasal 34, ayat 2 UUD 45.

³Keppres No. 52/2004, pasal 3

⁴Kep. Mensos RI. No. 15/HUK/2007

⁵Pedoman pelayanan lanjut usia, No.4/PRS-3/KPTS/2007, hal. 23-24

Usia yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta. Dari jumlah tersebut hanya dua buah panti yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu panti yang ada di Bekasi dan Sulawesi Selatan⁶. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji Pembinaan Kehidupan Beragama Lanjut Usia di Panti Sosial yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yakni Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma yang ada di Bekasi.

Masalah penelitian ini adalah; a) Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan lanjut usia di bidang keagamaan di PSTW Budhi Dharma; b) Bagaimana kebijakan pemerintah/pimpinan dalam pembinaan kehidupan beragama lanjut usia di PSTW Budhi Dharma?; c) Bagaimana pola-pola pembinaan kehidupan beragama lansia di PSTW Budhi Dharma oleh pemerintah?; d) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan kehidupan beragama lansia di PSTW Budhi Dharma?

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan; a) menjadi masukan dalam perumusan kebijakan peningkatan kehidupan beragama lansia di panti-panti sosial; b) menjadi masukan upaya peningkatan pembinaan kehidupan beragama yang optimal bagi lansia di panti sosial; c) merumuskan pola-pola pembinaan keagamaan di panti-panti sosial; dan d) dapat mengungkapkan faktor keberhasilan untuk dikembangkan pada panti-panti sosial lain.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa, selain ditemukan hambatan dan tantangan juga telah menunjukkan keberhasilan dimana kondisi sosial masyarakat semakin membaik dan usia harapan hidup mengalami peningkatan seiring makin bertambah jumlah kuantitas yang memasuki usia lanjut. Di antaranya ada yang masih produktif dan berperan aktif dalam pembangunan. Namun karena faktor usia, banyak di antaranya menghadapi keterbatasan dan memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosial dan keagamaannya. Peningkatan kesejahteraan sosial lansia dilakukan dengan upaya penanaman (internalisasi) nilai-nilai agama dan budaya bangsa.

Pelestarian nilai-nilai agama dan budaya dilakukan melalui pembinaan kehidupan beragama. Pembinaan ialah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk

⁶Departemen Sosial RI, 2004, hal. 29

memperoleh hasil yang lebih baik (Depdiknas, 1991). Yang dimaksud dengan pola adalah: a. Bentuk atau struktur yang tetap; b. Sistem atau cara kerja. (Dalam Pemerintahan).⁷ Sedangkan aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini meliputi beberapa aspek hal, yaitu: a) aspek kelembagaan, b) aspek ketenagaan, c) aspek materi, d) aspek metode; dan e) aspek manajemen. Adapun pembinaan yang dilakukan mencakup beberapa hal antara lain kebijakan, koordinasi, penyuluhan dan bimbingan, pemberian bantuan, perizinan dan pengawasan. Kehidupan beragama ialah mengenai realita pemahaman, kegiatan dan pengamalan agama, baik oleh individu maupun kelompok.

Usia lansia ialah setiap warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, baik potensial maupun tidak potensial yang tinggal di panti sosial maupun yang tinggal dalam keluarga⁸. Penelitian Pembinaan Keagamaan Bagi Masyarakat lansia pernah dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Beragama pada tahun 2000, baik terhadap lansia di masyarakat maupun di panti-panti sosial. Di antara temuan penelitian tersebut adalah belum tersedianya pedoman secara khusus bagi pembinaan kehidupan beragama. Aspek pembinaan yang diteliti meliputi: petugas pembinaan, materi pembinaan, sarana pembinaan, biaya pembinaan, serta pendukung dan penghambat.

Materi pembinaan umumnya adalah masalah keimanan, ibadah wajib, dan bacaan do'a atau dzikir. Hal ini berjalan di panti sosial dan di masyarakat berupa pemberian materi keimanan lebih banyak bagi lansia. Petugas pembinaan umumnya berasal dari berbagai lembaga keagamaan, termasuk dari jajaran Departemen Agama. Metode pembinaan sebagian besar dalam bentuk ceramah, tanya jawab, dan ada pula diskusi. Sebagai panduan diberikanlah buku-buku keagamaan dan buku do'a. Biaya pembinaan bagi Panti Sosial Pemerintah dibiayai negara, sedangkan pendanaan panti sosial swasta berasal dari para dermawan. Sedangkan dana pemberdayaan lansia di masyarakat bersumber dari pribadi dan donatur. Kendala yang umumnya dihadapi adalah kemampuan para lansia dalam mengikuti pembinaan kehidupan beragama mulai menurun.

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, BP. Depdiknas, Edisi ke III, Jakarta: 2001, hal. 885

⁸Kep. Mensos RI, No.15/HUK/2007: 5

Aspek yang diungkap dalam studi ini meliputi 6 (enam) unsur pembinaan kehidupan beragama, yaitu: pembina (jumlah dan profil: usia, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain), para lansia (jumlah dan profil: usia, pendidikan, alasan masuk panti, dan lain-lain), materi pembinaan (akidah / teologi, peribadatan atau kebaktian, akhlak / moral), metode pembinaan (ceramah, tanya jawab, praktik, dan lain-lain), sarana pembinaan (buku agama, papan tulis, VCD, dan lain-lain), efek pembinaan (pelaksanaan, keberhasilan dan hambatan), serta gambaran umum pengamalan sesuai ajaran agama masing-masing. Aspek lain yang dikembangkan dalam penelitian ini ialah sejauhmana implementasi peraturan perundang-undangan tentang lansia, serta bagaimana kebijakan Pemerintah tentang peningkatan kesejahteraan lansia.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dari obyek yang diteliti, data yang berhasil dikumpulkan kemudian dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang integral (*holistik*).⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara mendalam (*depth interview*) dan pengamatan langsung.¹⁰ Di samping itu dilakukan telaah terhadap buku-buku dan laporan-laporan hasil penelitian yang relevan, serta dari dokumen-dokumen yang ada di panti sosial.

Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budhi Dharma berdiri pada tahun 1971 di Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial RI Nomor 3-2-4/115 tahun 1971. Pada saat itu klien masih terbatas dari anggota perintis kemerdekaan dan veteran, dengan daya tampung 40 orang. Luas lahan 43.172 M² dan luas bangunan 4.143 M². Dalam rangka meningkatkan pelayanan, pada tanggal 2 Nopember 1992 PSTW Budhi Dharma dipindahkan ke Jalan HM. Djoyomartono No. 19 Bekasi Timur Jawa Barat dengan daya tampung 111 orang.¹¹

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Departemen Sosial RI, PSTW "Budhi Dharma" Bekasi berupaya menyelenggarakan pelayanan tersebut melalui

⁹Jacob Vredenberg, 1980 : 38

¹⁰Ibid

¹¹Tua Berguna dan Berkualitas, Panti Sosial Tresna Werda Budhi Dharma

empat program pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia baik lanjut usia yang berasal dari keluarga yang tidak mampu/terlantar maupun dari keluarga mampu namun mengalami keterlantaran atau karena sesuatu hal mereka tidak dapat tinggal bersama keluarga atau keluarga tidak dapat memberikan pelayanan dan perawatan sebagaimana mestinya.

Visi PSTW Budhi Dharma adalah: “*Menuju Lanjut Usia Bahagia dan Sejahtera di hari Tua*”. Sedangkan misinya adalah: a) meningkatkan pelayanan kepada Lanjut Usia melalui pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan; b) meningkatkan jaminan sosial dan perlindungan kepada lanjut usia; c) meningkatkan hubungan yang harmonis antar sesama lanjut usia, lanjut usia dengan pegawai, dan lanjut usia dengan masyarakat.

Pelayanan pendampingan dan perawatan lanjut usia di rumah (*home care*) sesuai dengan masyarakat Indonesia yang masih berpegang pada nilai-nilai budaya timur, sebagai wujud perhatian terhadap lanjut usia dengan mengutamakan peran masyarakat berbasis keluarga. Pelayanan lanjut usia di rumah (*home care*) sangat membantu lanjut usia yang mempunyai hambatan fisik, mental dan sosial, termasuk memberikan dukungan dan pelayanan untuk hidup mandiri, sehingga mengurangi beban baik dari anggota keluarga, teman, kerabat maupun tetangga yang membantu memenuhi kebutuhan lanjut usia.

Selain itu program *home care* sangat diperlukan dalam mendayagunakan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan lanjut usia secara utuh. Dalam hal ini program *home care* diharapkan dapat membantu lanjut usia mendapatkan kenyamanan dan rasa aman serta diakui keberadaannya.

Kepala panti yang menduduki struktur tertinggi, membawahi Kasie Program dan Advokasi Sosial, Kasie Rehabilitasi Sosial, Kasubbag Tata Usaha, Shalter Workshop dan pekerja sosial. Keseluruhan pengurus sebagai sumberdaya manusia berjumlah 29 orang.

Kelancaran pelayanan lansia dalam panti PSTW Budhi Dharma dilengkapi dengan sarana pelayanan, seperti: asrama, rumah negara golongan I, Kantor, pos jaga gerbang utama, pos jaga panti, gedung serba guna, dapur, ruang perawatan khusus, klinik, gereja, mushalla, lapangan tennis dan gedung PHLU. Di samping sarana-sarana tersebut di atas

juga dilengkapi dengan prasarana pelayanan berupa peralatan kantor, asrama, kesehatan, dapur, keterampilan atau hiburan, transportasi dan perpustakaan. Berdasarkan data laporan Klasifikasi Klien PSTW Budhi Dharma bulan Mei 2008, jumlah lansia yang ada mengikuti program: reguler sebanyak 111 orang, Subsidi Silang 11 orang, Day Care Services 134 orang dan Home Care 40 orang.

Daftar Klasifikasi Klien di PSTW Budhi Dharma Bekasi Berdasarkan Umur Bulan Mei 2008

Berdasarkan Umur	Program			
	Reguler	Subsidi Silang	Day care Services	Home care
≤ 60	4	1	81	-
≥ 60	107	10	53	40
Jumlah	111	11	134	40

Daftar Klasifikasi Klien Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Jenis kelamin	Program			
	Reguler	Subsidi Silang	Day care Services	Home care
Pria	36	3	8	8
Perempuan	75	7	52	32
Jumlah	111	10	134	40

Daftar Klasifikasi Klien Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan	Program			
	Reguler	Subsidi Silang	Day care Services	Home care
Tidak sekolah	20	3	-	11
SD	45	1	20	28
SLTP	19	1	74	1
SLTA	22	3	34	-
Diploma	3	1	4	-
Sarjana	2	2	2	-
Jumlah	111	11	134	40

Daftar Klasifikasi Klien Berdasarkan Agama

Berdasarkan Agama	Program			
	Reguler	Subsidi Silang	Day care Services	Home care
Islam	95	7	56	40
Kristen	16	3	4	-
Katolik	-	-	-	-
Hindu	-	-	-	-
Budha	-	-	-	-
Khonghucu	-	-	-	-
Jumlah	111	10	60	40

Sumber Data: Klasifikasi Klien PSTW Budhi Dharma Tahun 2008

Pelayanan dan Pembinaan Kehidupan Beragama

Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 disebutkan: "Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu". Sebagai tindak lanjut dari landasan konstitusi tersebut, terbitlah UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan lansia. Dalam Bab V tentang pemberdayaan pelaksanaan,

Pasal 11 dan 12 ayat a menyebutkan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia baik potensial maupun tidak potensial antara lain melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual.

Pada Bab VI tentang pelaksanaan pasal 13 ayat 1 dan 2 dijelaskan pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia dimaksudkan pada pasal 1 untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pelayanan keagamaan dan mental spiritual dimaksud diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.¹²

Dilihat dari sisi agama para lansia yang ada di PSTW ini tidak terdapat banyak variasi dari segi agama karena yang ada di panti ini hanya terdiri dari penganut agama Islam dan Kristen baik yang ada di program *reguler*, *subsidi silang*, *day care services* dan *home care*, masing-masing penganut Islam sebanyak 198 orang, dan penganut agama Kristen sebanyak 23 orang.

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budhi Dharma sampai saat ini belum memiliki pembimbing keagamaan yang khusus untuk melayani pembinaan kehidupan beragama lanjut usia. Yang ada adalah pegawai fungsional sebagai Pekerja Sosial dan para staf pada Seksi Rehabilitasi Sosial. Bimbingan agama termasuk dalam tupoksi seksi rehabilitasi sosial sekaligus penugasan seksi rehabilitasi sebagai penanggung jawab masalah pembinaan keagamaan lansia. Profil pembina keagamaan, materi pembinaan, metode dan sarana/prasarana pada masing-masing agama adalah sebagai berikut:

Lansia Pemeluk Agama Islam

Sejak tahun 1993 sampai tahun 2005, pembinaan keagamaan di pegang oleh Ahmad Sunar, Jabatan Pekerja Sosial Trampil, Pangkat/Golongan (Penata Muda TK I/IIIb), Pendidikan terakhir SMA. Untuk mendukung kegiatan keagamaan di PSTW Budhi Dharma bagi yang beragama Islam, diperlukan SDM yang mampu mengelola kegiatan keagamaan, salah satunya adalah tenaga pembimbing/pengajar. Namun sampai dengan saat itu tahun 2005 belum mempunyai tenaga yang profesional di bidang keagamaan Islam.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 1998 ttg Kesejahteraan Lanjut Usia

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab bimbingan agama Islam Ahmad Sunar memberanikan diri dengan pengetahuan ala kadarnya karena memang tidak mempunyai latar belakang pendidikan agama. Pengetahuan agama beliau diperoleh dari hasil belajar sendiri atau mendengarkan ceramah dari orang lain atau pun melalui buku-buku bacaan. Apa yang beliau dapatkan dari pengajian atau pun dari buku-buku diberikan kepada para lansia.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan pada setiap malam Jum'at dengan dimulai dengan shalat maghrib, diteruskan dengan tahlilan kemudian yasinan ditutup dengan ceramah. Kemudian dilakukan shalat isya' secara berjamaah. Selain itu kegiatan yang dipimpin oleh Ahmad Sunar juga menyelenggarakan acara-acara Peringatan Hari-Hari Besar Islam dan kegiatan pada bulan Ramadhan shalat taraweh berjamaah. Materi yang disampaikan pada saat ceramah hal-hal yang menyangkut keseharian para lansia mengingat keterbatasan kemampuannya di bidang agama.

Pada tahun 2005 PSTW Budhi Dharma menerima seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bernama Triyatni, pendidikan terakhir IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Ushuluddin sebagai staf Seksi Rehabilitasi Sosial. Mengingat Ny. Triyatni berlatar belakang pendidikan agama dan masalah pembinaan keagamaan merupakan salah satu bagian dari tugas dan fungsi dari Seksi Rehabilitasi Sosial ini maka Ny. Triyatni sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang selain menjalankan tugas-tugas pokok lainnya pada seksi ini juga diberi tugas sebagai penanggung jawab masalah pembinaan keagamaan pada lansia yang ada di PSTW Budhi Dharma. Tugas Pokok dan Fungsi Staf Rehabilitasi Sosial sesuai dengan penugasan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial yang diketahui Kepala Panti adalah; a) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial termasuk perkembangan klien; b) melakukan penghimpunan dan pengolahan data sebagai laporan; c) melaksanakan bimbingan agama. Tugas pokok tersebut meliputi; a) persiapan jadwal kegiatan; b) persiapan pelaksanaan kegiatan; c) membantu pelaksanaan kegiatan; d) mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan; dan d) menghimpun data hasil pemantauan kegiatan sebagai bahan laporan.

Tanggung jawab yang diemban mencakup: a) perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi / pembuatan laporan per triwulan

tentang *kegiatan keagamaan* pada umumnya sejak tahun 2005 hingga sekarang; b) perencanaan, persiapan pelaksanaan dan evaluasi / pembuatan laporan per triwulan tentang kegiatan case study dari tahun 2006 sampai dengan 2007; c) perencanaan, persiapan pelaksanaan dan evaluasi / pembuatan laporan per-triwulan tentang bimbingan sosial dari tahun 2006 sampai saat ini; d) menjadi Bendahara Penerima (PNBP) berdasarkan SK Mensos tahun 2007, yang dalam prakteknya memegang kas pembayaran rumah dinas, dan pembayaran PNBP Sewa Kamar Subsidi Silang pada akhir tahun 2007; e) menjadi Bendahara Penerima (PNBP); f) menjadi koordinator lapangan dalam Tim Pengelola Program Pelayanan Harian Lanjut Usia (PHLU) Day Care; g) menyusun laporan setiap akhir tahun pada evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pelayanan pada Seksi Rehabilitasi Sosial sejak tahun 2005 hingga sekarang;

Kemudian Tugas tambahan lainnya antara lain; a) menjadi anggota kepanitiaan pada kegiatan-kegiatan insidental panti (PHBI); b) menjadi pembawa acara dalam berbagai kegiatan panti dan luar panti; dan c) menerima dan membantu tugas pelayanan lainnya yang setiap saat diperlukan.¹³

Memperhatikan uraian tugas pokok dan tugas-tugas lain yang diemban oleh seorang penanggung jawab masalah pembinaan keagamaan bagi lansia di PSTW Budhi Dharma di atas, tentu dapat dimaklumi jika terdapat banyak keterbatasan dalam pelaksanaan tugas sebagai penanggung jawab. Namun demikian dari hasil wawancara dan penelusuran di lapangan berbagai rencana kegiatan yang tertera dalam proposal bimbingan agama dan beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan. Kegiatan pembimbingan keagamaan berdasarkan pemikiran bahwa Allah akan meninggikan/mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kegiatan tersebut memiliki maksud meningkatkan keimanan, ketakwaan dan keshalehan para lanjut usia hingga di akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah. Kemudian tujuannya adalah membekali para lanjut usia dengan pengetahuan agama dan cara menghayati dan melaksanakan ajaran agama Islam. Pelaksanaan pembimbingan meliputi bimbingan/Ceramah klasikal dilakukan seminggu sekali bertempat di Aula/Mushalla.

¹³Daftar Riwayat Hidup Triyatni, 8 Juni 2008

Bimbingan individu dilakukan bagi para mu'allaf dan Islam abangan/dari awal atau untuk klien yang dalam keadaan sakit, sakratul maut dan klien bermasalah pribadi. Pelaksanaan kegiatannya dibagi dan ditempatkan pada setiap wisma. Acara do'a bersama dilakukan pada setiap malam Jum'at.

Target dari pembimbingan ini adalah agar para peserta lebih rajin berlatih untuk meningkatkan ibadah dan terlatih untuk berakhlak baik serta menguatkan keimanan setiap individu lanjut usia.¹⁴ Di antara kegiatan yang masih berjalan adalah kegiatan bimbingan ceramah secara klasikal yang dilakukan secara rutin pada setiap hari Selasa dimulai pada pukul 08.30 sd. 10.00 WIB. Saat ini sebagai pembimbing adalah Ny. Sya'adah Syam (70 tahun), pendidikan S2 tanpa di bayar. Ia menjadi pembimbing sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2008. Namun saat ini tidak lagi mengisi pengajian atau kegiatan keagamaan atas permintaan sesama lansia karena dianggap terlalu memaksakan kehendak.¹⁵

Pembimbing yang lain adalah Ust. Wawan Pahwana, S. Ag, asal Garut, alumni Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 1994.¹⁶ Juga Endin Khoiruddin, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tinggal di Panti Sosial Bina Karya yang terletak bersebelahan dengan PSTW Budhi Dharma. Ia sehari-hari bertugas sebagai Pembina Mental pada PSBK. Karena berlatar belakang pendidikan umum, maka pengetahuan agama diperolehnya secara autodidak.¹⁷ Pembinaan keagamaan diadakan pada setiap hari Selasa pagi mulai pukul 08.30 sd. 10.00 WIB. Materi yang disampaikan berkisar pada masalah kehidupan sehari-hari. Metode pembimbingannya adalah dengan ceramah kemudian dilanjutkan dengan dialog tanya jawab.

Pemahaman keagamaan para lansia yang tinggal di panti bervariasi bergantung pada tingkat keuletan dalam belajar individu. Kebanyakan mereka memiliki pengetahuan agama berasal dari pengalaman belajar sewaktu masih di kampung halaman. Keikutsertaan dalam sholat berjamaah di masjid, nampak hanya beberapa orang saja yang aktif, sebagian besar mereka sholat di asrama tempat tinggal masing-masing, bahkan ada juga yang tidak sholat karena merasa tidak ada yang

¹⁴Proposal Bimbingan Agama Tahun 2007/2008

¹⁵Wawancara dengan A. Sunar tanggal 9 Juni 2008

¹⁶Wawancara dengan Wawan tanggal 3 Juni 2008

¹⁷Wawancara dengan Endin tanggal 27 Mei 2008

mengawasi. Peserta yang ikut pengajian berjumlah sekitar 30 s/d 35 orang, kebanyakan dari ibu-ibu. Sementara itu, ketidakhadiran sebagian yang lain menurut penuturan pengurus disebabkan oleh keengganan mereka untuk melakukan aktivitas itu.¹⁸

Sejak perpindahan PSTW Budhi Dharma dari Jl. RS Fatmawati ke Bekasi pada tahun 1992 sampai sekarang, PSTW ini tidak memiliki mushola/tempat shalat. Mushola yang ada sekarang ini awalnya adalah kolam renang. Kisah awal dari penggunaan kolam renang ini dibangun menjadi Mushalla adalah pada tahun 2005 masa kepemimpinan Sabir Gayo. Sebelum pembinaan keagamaan Islam diadakan di Mushalla, pembinaan dilakukan di wisma masing-masing sehingga setiap wisma hanya mendapat giliran 1 kali dalam sebulan. Setelah Ny. Triyatni bergabung di dalam PSTW Budhi Dharma dan ditugaskan sebagai penanggung jawab kegiatan pembimbingan keagamaan, maka kegiatan menjadi lebih terprogram yang ditempatkan di dalam Mushalla. Walaupun kegiatan ini sebenarnya diperuntukkan bagi seluruh lansia dari empat program yang ada, namun pada kenyataannya setiap kali diadakan pertemuan/pengajian yang hadir hanya sekitar 1/8 (seperdelapan) dari jumlah klien yang ada.

Prasarana yang dimiliki di antaranya adalah; alat praga visual/ buku (berisi tata cara shalat, aqidah, akhlak, ibadah, sirah nabawiyah, buku Iqra dan juz amma, Al-Qur'an dan terjemahannya, Al-Qur'an dan Tafsir. Sedangkan alat peraga audio visual seperti televisi, radio, tape recorder, speaker/toa, speaker ruangan, player, VCD dan CD tentang agama Islam.

Lansia Penganut Agama Kristen

Para lansia yang beragama Kristen juga memperoleh pembinaan keagamaan. Jumlah penganut Kristen sebanyak 19 orang dan 2 orang yang beragama Katolik. Penanggungjawab bertugas melakukan pembinaan keagamaan yang dibebankan kepada pada Seksi Rehabilitasi Sosial. Penanggungjawabnya adalah Ny. Hana Paulus, S. Sos, alumni Univ. Pattimura Ambon Jurusan Ilmu Sosial. Ia adalah PNS yang ditugaskan di PSTW Budhi Dharma Seksi Rehabilitasi Sosial. Ny. Hana Paulus

¹⁸Rangkuman dari hasil wawancara dengan Bpk Sunar dan beberapa orang Lansia tgl 27 Mei 2008

tidak memiliki dasar pengetahuan agama. Namun, karena ia adalah satu-satunya staf yang beragama Kristen, maka dia ditunjuk sebagai penanggung jawab.

Pembinaan keagamaan dilakukan 2 kali dalam satu bulan, yaitu pada setiap hari Rabu minggu ke 2 dan ke 4. Jadwal ini dibuat mengingat ada dua Pendeta yang secara bergiliran memberikan pembinaannya, yaitu Pendeta P. Hary dari Gereja Kristen Jawa (GKJ) pada setiap hari Rabu minggu ke 2 dan Pendeta Alfred dari Gereja Toraja pada setiap hari Rabu minggu ke 4. Materi yang diberikan pada setiap pembinaan meliputi renungan Al-Kitab dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Metode penyampaian melalui ceramah dan kunjungan langsung ke wisma-wisma menemui para lansia yang tidak dapat hadir di Gereja.

Sarana ibadah yang ada berupa Gereja dibangun semenjak berdirinya PSTW Budhi Dharma di Bekasi bersamaan dengan pembangunan Masjid yang ada di dalam kompleks. Gereja yang ada adalah Gereja Kristen Jawa dan Gereja Toraja.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor-faktor pendukung di antaranya adalah: a) kebijakan pimpinan selama tiga tahun terakhir yang menganggap penting pembinaan keagamaan bagi lansia; b) adanya kemauan keras dari para penanggung jawab baik untuk pembinaan keagamaan; c) kesediaan para pembina meluangkan waktu; d) tersedianya fasilitas atau ruangan yang memadai untuk melaksanakan bimbingan keagamaan.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat di antaranya; a) belum ada petugas yang betul-betul khusus menangani masalah pembinaan keagamaan; b) penanggung jawab tidak memiliki latar belakang pengetahuan agama/pendidikan agama, khususnya penanggung jawab pembinaan agama Kristen; c) banyaknya tugas-tugas yang diemban oleh para penanggung jawab selain pembinaan keagamaan khususnya penanggung jawab pembinaan keagamaan Islam sehingga program yang telah disusun sebagian tidak dapat terlaksana; d) pendamping lansia yang bertugas di asrama kurang dan belum dapat memberikan motivasi kepada para lansia pentingnya ibadah; e) pendanaan khusus untuk pembinaan keagamaan yang masih sangat minim; f) tidak ada

koordinasi antara PSTW dengan Kantor Departemen Agama/Kantor Urusan Agama; g) belum ada pedoman/pola pembinaan keagamaan yang baku; h) pemahaman dan kesadaran para lansia yang sangat minim; h) sarana yang belum memadai seperti alat-alat praga visual maupun audio visual khususnya bagi pembinaan keagamaan Kristen.

Pembinaan keagamaan di PSTW Budhi Dharma merupakan bagian tugas pokok Seksi Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial dan tidak termasuk di dalam bagian uraian tugas pejabat fungsional Pekerja Sosial.¹⁹ Tidak ada dana khusus yang dialokasikan khusus untuk pembinaan keagamaan, namun masuk di bawah Seksi Rehabilitasi Sosial. Hal tersebut termasuk kendala yang dihadapi oleh PSTW Budhi Dharma.²⁰

Analisis

Masyarakat lanjut usia adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan kelompok lainnya untuk memperoleh pelayanan sosial.²¹ Meskipun telah diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya, kondisi lanjut usia di Indonesia masih memprihatinkan karena belum memperoleh pelayanan yang maksimal. Departemen Sosial sebagai instansi yang secara langsung menangani masalah kelompok masyarakat lanjut usia melihat beberapa permasalahan yang dihadapi para lanjut usia yaitu: 1) para lansia tidak memiliki keluarga, sanak kerabat, dan lingkungan yang dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan penghidupan, 2) kesulitan hubungan antara usia lanjut dengan keluarga di tempat selama ia tinggal, 3) ketidakmampuan keuangan/ekonomi dari keluarga untuk menjamin penghidupan secara layak, (4) kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi

¹⁹Kepmenpan Nomor:Kep/03/M.PAN/I/2004 ttg Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya, Desps, 2005

²⁰Wawancara dengan Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial tanggal 9 Juni 2008. Dari hasil wawancara dengan beberapa pembina/instruktur keagamaan terungkap bahwa mereka hanya mendapatkan uang transport sebanyak Rp. 100.000,- perbulan. Kehadiran mereka 2 - 3 kali dalam satu bulan. Hal ini tentu tidak memadai dibanding dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian para pembina masih tetap merasa ada kebahagiaan tersendiri ketika mereka mendapat kepercayaan untuk memberikan bimbingannya kepada para lanjut usia yang ada di PSTW Budhi Dharma.

²¹Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 pasal 11 dan 12 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia tentang pelayanan dan pemberian jaminan kesejahteraan bagi masyarakat lanjut usia.

melalui lapangan kerja yang ada, (5) perbedaan nilai yang dianut antara para lanjut usia dengan generasi muda, (6) berkurangnya kesempatan keluarga untuk memberikan pelayanan kepada para usia lanjut.²²

Kesulitan para lansia akan sedikit berkurang jika mereka berada di panti sosial. Namun kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan panti sosial untuk para lansia sangat terbatas. Saat ini panti sosial untuk lansia yang dikelola Departemen Sosial hanya ada dua panti dan yang dikelola pemerintah daerah hanya 69 unit yang semuanya ditempati oleh 5.137 lansia. Sementara panti yang dikelola masyarakat relative lebih banyak yaitu 164 unit dengan jumlah penghuni 6.260. Daya tampung tersebut tentu sangat terbatas khususnya jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah lansia tahun 2010 yaitu 23.9 juta orang.²³

Pemenuhan kesejahteraan lanjut usia²⁴ seyogyanya mencakup bidang keagamaan, mental spiritual, kesehatan, kemudahan dalam menggunakan fasilitas umum, bantuan hukum, dan perlindungan sosial. Namun demikian, selama ini pelayanan kesejahteraan lansia, khususnya pada panti sosial yang dikelola oleh Pemerintah sebagaimana terlihat di PSTW Budi Dharma Bekasi, lebih diutamakan pada pelayanan kesehatan fisik. Hal ini terlihat dari tersedianya ruang klinik, tenaga dokter maupun perawat.

Banyak analisis mengatakan bahwa secara umum pelayanan pemerintah bagi kesejahteraan lanjut usia di berbagai bidang dirasakan masih terbatas. Sebagaimana dinyatakan oleh Rianto Adi (1991: 202) Pemerintah di negara-negara berkembang masih memberikan prioritas yang sangat rendah untuk kesejahteraan para lanjut usia karena negara-negara tersebut belum baik perekonomiannya. Sejumlah keluarga miskin di Asia tidak mampu lebih lama membantu orang tua mereka walaupun mereka memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan bagi orang tuanya. Dengan demikian, kondisi suatu negara jelas mempunyai hubungan langsung dengan kondisi warganya, dalam hal ini warga kelompok lanjut usia.

²²Rianto Adi, 1999, 202-203

²³Departemen Sosial RI, 2004

²⁴Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998.

Kondisi perekonomian negara Indonesia saat ini sangat tidak menguntungkan bagi pemberian layanan untuk para lansia. Oleh karena itu, walaupun sudah ada Undang-Undang, kesejahteraan lansia masih jauh dari kategori baik. Selama ini sumber daya dan dana yang tersedia lebih banyak ditujukan untuk pemenuhan pelayanan bidang kesehatan fisik. Sementara pemenuhan pelayanan keagamaan hampir tidak tersentuh. Pada PSTW Budi Dharma, minimnya pemenuhan layanan keagamaan terlihat antara lain dari minimnya tenaga yang khusus memberikan bimbingan keagamaan, sedikitnya dana yang disediakan untuk pelayanan keagamaan, serta tidak ada program strategis dalam rangka memberikan pelayanan keagamaan bagi para lanjut usia.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, khususnya Pasal 11 dan 12, maka seyogyanya Pemerintah memberikan perhatian yang sama bagi pemenuhan kebutuhan akan bimbingan keagamaan bagi lansia. Jika sumber dana pemerintah yang kurang memadai, maka kerjasama antar Departemen terkait, dengan masyarakat, pemerintah daerah, atau ormas keagamaan dan kemasyarakatan merupakan suatu jalan keluar yang mungkin bisa ditempuh.

Penutup

Dari uraian dan gambaran di atas, sebagai penutup penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan hukum yang mengatur tentang pelayanan keagamaan terhadap lansia di PSTW Budhi Dharma belum diimplementasikan secara optimal. Kepmensos Nomor: 4/PRS-3/KPTS/2007 dan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1998 belum memperoleh perhatian serius dari pimpinan PSTW Budhi Dharma Bekasi. Kebijakan pemerintah dalam pembinaan kehidupan beragama lansia masih bersifat penunjukan dengan surat tugas sebagai penanggung jawab pembinaan keagamaan. Kemudian secara kreatif petugas yang ditunjuk bertindak berdasarkan inisiatif sendiri, sementara itu pola-pola pembinaan kehidupan beragama lansia dari pemerintah di panti belum ada.

Keberhasilan pembinaan keagamaan di PSTW disebabkan oleh adanya faktor-faktor pendukung, di antaranya; a) kebijakan pimpinan dalam tiga tahun terakhir mendukung pembinaan keagamaan bagi

lansia tersusun lebih terprogram; b) adanya kemauan keras dari para penanggung jawab; c) kesediaan para pembina/instruktur meluangkan waktu. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah; a) belum ada petugas khusus yang menangani masalah pembinaan keagamaan; b) penanggung jawab tidak memiliki latar belakang pengetahuan agama; c) banyaknya tugas-tugas yang diemban oleh para penanggung jawab selain pembinaan keagamaan; d) pendamping lansia yang bertugas di asrama kurang dan belum dapat memberikan motivasi kepada para lansia tentang pentingnya ibadah; e) pendanaan untuk pembinaan keagamaan sangat minim; f) tidak ada koordinasi antara PSTW dengan Kantor Departemen Agama/Kantor Urusan Agama Kota Bekasi; g) belum ada buku pedoman/pola pembinaan keagamaan; h) pemahaman dan kesadaran para lansia yang sangat minim; i) prasarana yang belum memadai.

Sebagai input untuk perbaikan di masa mendatang, peneliti merekomendasikan; a) peraturan-peraturan yang telah digariskan hendaknya dapat diimplementasikan sebagai dasar pijakan mengambil kebijakan; b) pimpinan panti hendaknya dapat mengambil kebijakan yang lebih dari sekedar menjalankan tugas; c) hendaknya pemerintah/pimpinan PSTW Budhi Dharma dan Kantor Departemen Agama Kota Bekasi mengadakan koordinasi untuk membuat kebijakan bersama dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada lansia, baik yang bersifat kebijakan menyangkut pendanaan, program maupun SDM; d) pembinaan keagamaan bagi lansia adalah amanat UUD dan peraturan perundangan; e) mengangkat dan menambah petugas khusus berlatar belakang pendidikan agama yang cukup yang menangani masalah pembinaan keagamaan lansia dan petugas pendamping lansia di asrama; jika memungkinkan masalah pembinaan keagamaan lansia terstruktur dalam nomenklatur sendiri; f) Dana khusus pembinaan keagamaan perlu diprogramkan dalam RKA-KL tersendiri; g) melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kota Bekasi/ Kantor Urusan Agama; h) Menyusun buku pedoman pembinaan keagamaan berkoordinasi dengan Departemen Agama; dan i) menyediakan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka kelancaran pembinaan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kepmenpan Nomor:Kep/03/M.PAN/I/2004 ttg Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya, Depsos, 2005.
- UU Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Dihimpun Oleh: Hadi Setia tunggal , S.H. Penerbit Harvarindo, Jakarta: 1999.
- UU No. 13 Tahun 1998, pasal 9-11.
- Kep. Mensos RI. No. 15/HUK/2007.
- Keppres No. 52/2004, pasal 3.
- Pedoman Pelayanan Lanjut Usia, No.4/PRS-3/KPTS/2007.
- Puslitbang Kehidupan Beragama, Hasil Penelitian Pembinaan Keagamaan Bagi Masyarakat Lanjut.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, BP. Depdiknas, Edisi ke III, Jakarta: 2001.
- Profil PSTW Budhi Dharma.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 1998 ttg Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Proposal Bimbingan Agama Tahun 2007/2008.

Kehidupan Beragama Lansia di PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

**Bashori A. Hakim
Haidlor Ali Ahmad**

*Keduanya peneliti pada
Puslitbang Kehidupan
Keagamaan, Badan Litbang
dan Diklat Departemen
Agama*

Abstract:

Activity of religious service for the elders becomes more important mainly for their preparation prior to eternal life in the day to come/akherat later. Religious activities are provided for those people living in different societies, not in social care services which is provided by the government.

In Tresna Werdha Budi Mulia 1 Social Care Cipayung, East Jakarta, the effort of religious guidance is conducted through several planned programs. To understand how religious service is done, research regarding that subject is carried out.

The research uses qualitative method, in which data collecting technique applied is through interviews, documentary study and observation. It reveals that religious teachings and service is conducted by three professional staffs based on the social care's vision and mission. Because most of the participants believe in Islam, religious teachings applied are limited to Islamic teachings. The acceptance from elders becomes the major constraint due to age factors. It is recommended that religious teachings shall be more focused to practical religious service, like worship, dzikir and prayer, with participation from Kandepag East Jakarta.

Latar Belakang

Penduduk Indonesia –sebagaimana penduduk di negara-negara lain– dilihat dari segi usia terdapat kelompok penduduk yang tergolong lanjut usia (lansia). Di Indonesia, jumlah mereka dari tahun-ketahun cenderung meningkat. Misalnya, pada tahun 1980 jumlah mereka mencapai 7.998.543 jiwa atau 5,45 % dari seluruh jumlah penduduk; sepuluh tahun kemudian, yakni tahun 1990 meningkat menjadi 12.778.121 jiwa atau 6,29 % dan pada tahun 2000 berjumlah 17.767.709 jiwa atau 7,97 % dari jumlah penduduk. Diprediksikan pada tahun 2010 jumlah lansia akan mencapai 23,9 juta jiwa atau 9,77 % dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 28.822.879 jiwa atau 11,34 % dari jumlah penduduk (*Depsos, 2007:1*). Peningkatan itu terjadi selain karena kesejahteraan rakyat pada umumnya mengalami peningkatan, juga berkat keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), khususnya program Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) (*BKKBN, 2001:3*).

Kelompok usia lansia dilihat dari segi tempat tinggal dan kehidupan mereka sehari-hari beragam, di antaranya ada yang hidup secara mandiri dan ada yang ikut bersama anak mereka yang telah berkeluarga. Kehidupan lansia yang tergolong dalam ragam terakhir itu banyak kita jumpai dalam kehidupan keluarga di kalangan masyarakat kita. Selain itu ada pula lansia yang bertempat tinggal dan memperoleh pelayanan di panti-panti sosial, baik panti sosial milik pemerintah maupun panti sosial yang didirikan atas swadaya masyarakat atau swasta.

Ada beberapa alasan lansia bertempat tinggal dan berada di panti sosial, di antaranya yaitu karena dititipkan oleh keluarganya, karena kemauan sendiri dan bahkan ada yang karena terlantar, lalu oleh aparat dikirim ke panti sosial.

Terlepas dari faktor-faktor yang mengakibatkan keberadaan lansia di panti sosial, keberadaan panti-panti sosial itu sendiri menunjukkan adanya kepedulian pemerintah maupun masyarakat terhadap nasib para lansia, terutama dalam upaya membantu agar mereka dapat hidup layak dan sejahtera pada saat menjalani sisa-sisa hidupnya. Kepedulian sosial itu merupakan implementasi dari amanat UUD 1945 yang menyebutkan

bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (*UUD 1945, Pasal 34 Ayat 2*). Selain itu, dalam UU. No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disebutkan bahwa lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*UU.No.13 Tahun 1998, Pasal 5*). Sedangkan kebijakan pelaksanaan peningkatan sosial lansia ditetapkan secara terkoordinasi antara instansi terkait baik pemerintah maupun masyarakat (*UU.No.13 Tahun 1998, Pasal 25, Ayat 1*).

Masalah lansia pada dasarnya dapat dikaji dari berbagai aspek, termasuk aspek keagamaan. Dalam aspek keagamaan, selain pelayanan sosial keagamaan dan mental spiritual, juga tentang pembinaan agama yang merupakan bagian tugas Departemen Agama beserta jajarannya di daerah. Dengan demikian informasi berkaitan dengan perihal pembinaan keagamaan lansia yang telah dilakukan di panti sosial selama ini menjadi penting untuk diketahui Departemen Agama dalam rangka peningkatan pelayanan keagamaan kepada masyarakat pada masa mendatang dalam hal ini para lansia di panti-panti sosial.

Mengacu kepada uraian di atas maka perlu dilakukan kajian tentang pembinaan keagamaan lansia di panti sosial, yang dalam kajian ini akan dilakukan terhadap Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 di Jl. Bina Marga No.58, Cipayung, Jakarta Timur.

Permasalahan

Mencermati latarbelakang di atas, kajian ini mengangkat permasalahan berikut:

- a. Bagaimana Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 Cipayung Jakarta Timur mengimplementasikan peraturan kebijakan pemerintah tentang pelayanan dan pembinaan lansia;
- b. Bagaimana pembinaan kehidupan beragama di panti sosial tersebut dilakukan;
- c. Apa saja faktor penghambat maupun pendukung dalam upaya pembinaan kehidupan beragama lansia di panti sosial tersebut.

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Implementasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan pembinaan lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 Cipayung Jakarta Timur;
- b. Pembinaan kehidupan beragama lansia di panti sosial tersebut;
- c. Faktor-faktor penghambat maupun pendukung upaya pembinaan kehidupan beragama lansia di panti sosial tersebut.

Metodologi

Kajian ini berbentuk kualitatif, dengan sifat kajian studi kasus. Satuan kajiannya yaitu Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 Cipayung, Jakarta Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*depth interview*), pengamatan dan studi pustaka. Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dilakukan kepada sejumlah informan terdiri atas: para pengurus/pengelola panti sosial, para lansia, para pejabat terkait, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Item-item pertanyaan dalam pedoman wawancara yang memerlukan jawaban lebih rinci dari informan, dilakukan pendalaman informasi kepada informan yang bersangkutan atau informan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi lebih luas tentang permasalahan yang dikaji. Pengamatan dilakukan terhadap berbagai aktivitas lansia di panti sosial sesuai permasalahan yang dikaji, sejauh yang dapat dilakukan pengamatannya oleh peneliti/petugas lapangan. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku-buku atau berbagai jenis terbitan dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tahapan berikut: (1) Reduksi data, yakni penyeleksian dan penyederhanaan; (2) Penyajian data atau display, disusun dan dinarasi; dan (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Matthew B. Milles & A. Micael Huberman, 1992:15-18*).

Batasan Istilah

Untuk menyamakan persepsi dan operasionalisasi konsep-konsep yang digunakan dalam kajian ini, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

- a. Pembinaan: yaitu usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperoleh hasil yang lebih baik (*Depdiknas, 1991*);
- b. Kehidupan beragama: yaitu mengenai realita pemahaman, kegiatan dan pengamalan agama, baik oleh individu maupun kelompok.
- c. Lanjut usia (lansia): yaitu setiap warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, baik potensial maupun tidak potensial (*Keputusan Mensos RI, No.15/HUK/2007*) yang tinggal di panti sosial maupun yang tinggal dalam keluarga. Dalam kajian ini difokuskan lansia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 Cipayung Jakarta Timur.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pembinaan kehidupan beragama lanjut usia di panti sosial yaitu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna kepada warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan yang telah berusia 60 tahun ke atas yang bertempat tinggal di panti sosial, untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam hal kehidupan keagamaan.

Kaitan dengan Kajian Terdahulu

Kajian tentang pembinaan keagamaan terhadap lansia seperti ini pernah dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan –dulu Puslitbang Kehidupan Beragama- pada tahun 2000 melalui Penelitian Pembinaan Keagamaan Bagi Masyarakat lansia. Lokasi penelitiannya meliputi berbagai daerah, dengan mengkaji lansia yang berada di lingkungan masyarakat dan lansia yang berada di panti-panti sosial (*Tim Peneliti, Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta, 2000*).

Di antara temuan yang diperoleh melalui penelitian itu yaitu: belum adanya pedoman secara khusus tentang pembinaan kehidupan beragama bagi lansia, pembinaan pada umumnya dilakukan oleh kalangan lembaga-lembaga keagamaan termasuk dari jajaran Kantor

Departemen Agama (Kandepag), materi pembinaan meliputi aspek keimanan, ibadah wajib dan bacaan do'a/dzikir, pelaksanaan pembinaan selain menggunakan metoda ceramah, tanya-jawab dan sedikit diskusi, juga diberikan buku-buku keagamaan dan kumpulan do'a. Kemampuan lansia dalam menyerap materi pembinaan keagamaan yang semakin menurun, dirasakan sebagai salah satu faktor kendala pembinaan.

Kajian tentang pembinaan kehidupan beragama lansia yang dilakukan di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 Cipayung – Jakarta Timur ini juga akan mengungkap tentang pembinaan keagamaan lansia dan faktor-faktor penghambat maupun pendukung pelaksanaan pembinaannya. Selain itu, lebih jauh dalam kajian ini akan diungkap pula berbagai peraturan perundangan yang mungkin telah dibuat pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah baru-baru ini, berikut implementasi peraturan perundangannya oleh instansi dan lembaga terkait. Adapun fokus kajiannya, akan lebih megkonsentrasikan kajian terhadap lansia di panti sosial.

Sekilas tentang Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulial Cipayung Jakarta Timur

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 Cipayung Jakarta Timur adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta, yang berfungsi sebagai suatu tempat /sarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia yang mengalami masalah sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, ketidakmampuan secara fisik dan ekonomi untuk diberikan pembinaan pelayanan sosial serta perlindungan agar mereka dapat hidup secara wajar.

Latarbelakang dilakukannya pelayanan dan pembinaan terhadap lansia di panti sosial oleh Pemda DKI Jakarta, antara lain karena semakin tergesernya nilai-nilai pola keluarga kecil yang mengakibatkan terlantarnya sebagian lansia.

Sehubungan adanya kemajuan dan perkembangan teknologi - terutama di kota-kota besar-, keadaan tersebut menumbuhkan harapan manusia untuk memperoleh kesempatan hidup dalam usia yang lebih

panjang. Keadaan demikian dapat menggeser prinsip dan nilai pola keluarga kecil yang semula menempatkan orang tua sebagai suatu kehormatan menjadi luntur yang pada gilirannya dapat menimbulkan problem dalam keluarga. Di antara problem dimaksud misalnya banyak lansia yang terlantar. Menyikapi keadaan demikian maka Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, melalui Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta menyediakan suatu wadah/ tempat untuk pelayanan dan pembinaan lanjut usia di berbagai wilayah di DKI Jakarta. Di wilayah Jakarta Timur tempat pelayanan dan pembinaan lanjut usia itu diberi nama Panti Werdha 1 Cipayung.

Panti Werdha 1 Cipayung – Jakarta Timur dibangun pada tahun 1968, yang dikukuhkan dengan SK Gubernur KDKI Jakarta No. Ca. 11/29/1/1972. Panti tersebut dibangun di atas tanah seluas 8.883 m², terletak di Jl. Bina Marga No. 58 RT. 007/06 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dalam perkembangan selanjutnya, melalui SK Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta No. 736 tanggal 1 Mei 1996, nama panti sosial tersebut diganti menjadi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 Cipayung (Disarikan dari data *Dokumentasi Dinas Bina Mental Spiritual & Kesos, PSTW Budi Mulia 1 Cipayung Jakarta Timur, Bookle*, 2008, Jakarta).

Tujuan didirikannya PSTW Budi Mulia 1 Cipayung adalah terpenuhinya kebutuhan lanjut usia yang disantuni seperti kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan baik sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketenteraman lahir dan batin.

Visi PSTW Budi Mulia 1 Cipayung adalah: terentasnya penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya lanjut usia terlantar di DKI Jakarta dalam kehidupan normatif. Untuk merealisasikan visi di atas, maka PSTW Budi Mulia 1 Cipayung mengemban misi berikut:

- a. Mencegah, mengurangi tumbuh kembang dan meluasnya masalah kesejahteraan sosial khususnya lanjut usia terlantar.
- b. Mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar dalam kehidupan yang layak dan normatif.

- c. Melakukan pembinaan peran serta sosial bagi masyarakat dalam pelaksanaan UKS.
- d. Meningkatkan fasilitas kesejahteraan sosial.

Adapun tugas pokok PSTW Budi Mulia 1 Cipayung yaitu memberikan pelayanan dan perawatan jasmani dan rohani kepada orang lanjut usia yang terlantar agar dapat hidup secara wajar.

Pelayanan kepada Lansia

Pelayanan di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sepenuhnya dilakukan oleh para pegawai panti sosial itu sesuai bidang tugas masing-masing pegawai. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kantor PSTW Budi Mulia 1 Cipayung, jumlah pegawai yang melayani para lansia penghuni panti sosial itu sebanyak 31 orang, terdiri atas pegawai organik 13 orang dan non organik 18 orang. Selain itu, PSTW Budi Mulia 1 Cipayung memiliki tenaga voluntir pembina keagamaan berjumlah 3 orang. Dengan demikian jumlah seluruh pegawai termasuk tenaga voluntir berjumlah 34 orang.

Adapun sasaran garapan PSTW Budi Mulia 1 Cipayung adalah: a. Penduduk DKI Jakarta; b. Lanjut usia terlantar berusia minimum 60 tahun; c. Tidak mempunyai penghasilan/berdaya guna mencari nafkah bagi penghidupannya; d. Tidak ada keluarga/orang lain/lingkungan yang dapat memberikan bantuan penghidupannya; dan e. Keluarga yang benar-benar tidak mampu.

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung membuat persyaratan bagi para lansia yang dikirim oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjadi penghuni panti, sebagai berikut: a. Warga DKI Jakarta; b. Umur 60 tahun ke atas; c. Terlantar karena tidak ada atau tidak diurus oleh keluarganya; d. Tidak mampu yang disertai surat keterangan dari lurah; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Tidak mampu menolong diri sendiri; dan g. Rekomendasi dari Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial, Suku Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial setempat.

Para lansia yang diterima menjadi penghuni PSTW Budi Mulia 1 Cipayung adalah berdasarkan pengiriman dari berbagai kalangan berikut: a. Dari masyarakat; b. Dari kepolisian; c. Dari hasil penertiban aparat;

d. Dari Seksi Sosial Kecamatan Suku Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta; dan e. Dari Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Sarana fisik yang merupakan fasilitas pelayanan yang dimiliki PSTW Budi Mulia 1 Cipayung hingga saat kajian ini dilakukan meliputi: Kantor 1 buah, barak 5 buah, aula 1 buah, poliklinik 1 buah, dapur umum, mushala 1 buah, sarana olah raga, serta kendaraan operasional satu unit.

Jumlah penghuni panti sebanyak 100 orang sesuai dengan kapasitas panti, terdiri dari 26 laki-laki dan 74 perempuan. Usia mereka 60 tahun ke atas, sesuai dengan persyaratan calon penghuni. Penghuni tertua berusia 93 tahun. Di antara lansia ada sekitar 13 orang yang tergolong tidak potensial lantaran kondisi fisik mereka lemah.

Dilihat dari segi agama, sebanyak 95 orang (95 %) beragama Islam dan 5 orang (5 %) sisanya beragama Kristen.

Mereka menjadi penghuni panti melalui pengiriman dari berbagai pihak, yakni: dari masyarakat, dari kepolisian (misalnya orang terlantar yang dilaporkan atau diantarkan ke kantor polisi, termasuk dari hasil penertiban/razia aparat), dari Seksi Sosial Kecamatan Sudin Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta, serta dari Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan penuturan beberapa penghuni panti yang berhasil peneliti wawancarai (sebanyak 8 orang penghuni PSTW), mereka berasal dari daerah yang beragam. Bahkan ada yang berasal dari daerah yang relatif jauh dari Jakarta, seperti Gorontalo. Akan tetapi sebelum masuk ke PSTW, mereka telah bekerja dan tinggal di daerah Jakarta.

Dari 8 orang penghuni PSTW di atas, 7 orang di antaranya tidak memiliki anak sehingga mereka terlantar setelah usia lanjut. Sedangkan seorang penghuni PSTW yang memiliki anak tersebut tinggal di panti sosial lantaran anaknya tidak mampu mengurus dan ia tidak mau menambah beban anaknya. Karena itu maka ia lebih memilih tinggal di panti sosial.

Latar belakang pendidikan penghuni PSTW Budi Mulia 1 Cipayung pada umumnya SD dan ada di antaranya yang tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah. Profesi mereka sebelum masuk panti pada umumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Karena mereka sudah jompo, tidak mampu bekerja lagi dan kebanyakan diantara mereka tidak memiliki anak dan keluarga, maka mereka tinggal di PSTW dengan diantar oleh tetangga atau pengurus RT setempat. Adapun para penghuni panti dari pengiriman aparat kepolisian yang diperoleh melalui hasil razia/penertiban, biasanya karena mereka terlantar dan ada pula yang sebagai penyandang masalah sosial atau gelandangan.

Jumlah penghuni PSTW Budi Mulia 1 Cipayung selama ini relatif stabil. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pada waktu-waktu tertentu mengalami penambahan atau pengurangan. Dengan demikian pada suatu waktu jumlah penghuni panti bisa bertambah dan bisa berkurang. Jumlah penghuni bertambah apabila ada pengiriman, baik dari masyarakat, kepolisian, hasil razia atau kiriman dari Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta. Sebaliknya jumlah penghuni berkurang apabila ada yang meninggal dunia, diserahkan/dirujuk ke panti lain yang sejenis, atau diambil keluarganya.

Pelayanan terhadap para penghuni panti di PSTW Budi Mulia 1 Cipayung dilakukan melalui tiga proses, yakni: pendekatan awal, pelayanan dalam panti dan kemudian bimbingan.

- a. Pendekatan Awal, meliputi: orientasi dan konsultasi, identifikasi, motif dan seleksi.
- b. Pelayanan dalam panti, meliputi: tahap penerimaan, pelayanan dan pemeliharaan, meliputi penyediaan papan, sandang, pangan dan kesehatan.
- c. Bimbingan, meliputi: bimbingan sosial, bimbingan fisik dan mental, dan bimbingan keterampilan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan yang dilakukan PSTW Budi Mulia 1 Cipayung meliputi:¹

¹(Disarikan dari data *Dokumentasi Dinas Bina Mental Spiritual & Kesos, PSTW Budi Mulia 1 Cipayung Jakarta Timur, Booklet, 2008, Jakarta*).

- a. Bimbingan Rohani Islam dan Kristen (seminggu 2 kali);
- b. Olah Raga: Senam lansia (seminggu 2 kali);
- c. Bimbingan Keterampilan, meliputi: menjahit, menyulam, beternak, berkebun, hasta karya dari kain perca, budi daya ikan, masak makanan kecil;
- d. Kesenian berupa panggung gembira yang diselenggarakan setiap hari Rabu. Dalam kegiatan ini para lansia berkumpul di aula, bernyanyi sambil berjoget bersama-sama. Alat bantu yang digunakan berupa *speaker ware less*, tanpa iringan musik;
- e. Rekreasi, diadakan paling tidak setahun sekali. Karena terkendala ketiadaan anggaran, maka kegiatan rekreasi tahun ini ditiadakan. Selain itu ada kegiatan lebih bersifat rekreatif, yaitu pada momen-momen tertentu misalnya pada hari Kartini, hari Kebangkitan Nasional dan sejenisnya diadakan lomba misalnya bercerita masa perjuangan. Lomba ini bertujuan untuk melatih motorik mereka;
- f. Pelayanan kesehatan berupa klinik pemeriksaan kesehatan, dilakukan oleh puskesmas 2 minggu sekali.

Pelayanan oleh PSTW Budi Mulia 1 Cipayung kepada lansia yang direalisasikan dalam berbagai program kegiatan termasuk proses layanan maupun prosedur dan persyaratan penerimaan sebagaimana dipaparkan di atas, merupakan penjabaran dari tugas pokok yang diemban PSTW Budi Mulia 1 Cipayung. Realisasi pelayanan yang dilakukan merupakan implementasi dari peraturan perundangan seperti UUD 1945 Pasal 34 Ayat (2), UU.Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia serta peraturan lain tentang pelayanan dan pembinaan lanjut usia yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Kebijakan mengenai pelayanan dan pembinaan lansia di PSTW Budi Mulia 1 Cipayung dilakukan dan di bawah koordinasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Bintel dan Kesos, sehingga pihak Walikota Jakarta Timur tidak memiliki kewenangan untuk mengaturnya. Dengan demikian maka dapat dipahami apabila Walikota Jakarta Timur dalam hal ini Suku Dinas (Sudin) Bintel dan Kesos Jakarta Timur tidak terkait secara langsung melakukan pelayanan dan pembinaan kepada PSTW Budi Mulia 1 Cipayung karena bukan wewenangnyanya. Konsekuensi

logis dari prosedur kewenangan itu maka Sudin Bintal dan Kesos Jakarta Timur dalam Tupoksinya tidak mencanangkan pembinaan kepada panti-panti sosial. Hal itu sesuai dengan penuturan Kepala Seksi Sudin Bintal dan Kesos Walikota Jakarta Timur dan staf beliau yang menuturkan antara lain bahwa panti-panti sosial yang dimiliki / terdapat di wilayah DKI Jakarta –termasuk Jakarta Timur- merupakan Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Bintal dan Kesos Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian maka pelaksanaan pembinaannya langsung di bawah koordinasi Dinas Bintal dan Kesos Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu maka Sudin Bintal dan Kesos Walikota Jakarta Timur tidak mempunyai kewenangan secara langsung menangani panti-panti sosial di wilayah Jakarta Timur. Secara struktural pembinaan panti-panti sosial itu di bawah koordinasi Dinas Sosial DKI Jakarta. Tupoksi Sudin Bintal dan Kesos Jakarta Timur terbatas memberikan layanan kepada lembaga-lembaga sosial di bawah Suku Dinas Bintal dan Kesos Jakarta Timur, di samping pembinaan lansia yang ada dalam masyarakat. Demikian penuturan Kepala Seksi Sudin Bintal dan Kesos Jakarta Timur.

Pembinaan Kehidupan Beragama Kepada Lansia

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung memiliki 3 orang pembina keagamaan. Mereka tergolong cukup profesional di bidang bimbingan keagamaan. Dua orang dari mereka mempunyai tugas pokok sebagai tenaga guru SD dan guru SMP, sedangkan seorang lainnya berprofesi sebagai daiyah/ustadzah.

Ketiga tenaga pembina keagamaan tersebut rata-rata berusia 50 tahun. Mereka dikelompokkan sebagai tenaga volutir. Kendatipun demikian mereka masing-masing diberi honor sebesar Rp 200.000,- setiap bulan.

Pembinaan keagamaan yang diselenggarakan di PSTW ini hanya pembinaan agama Islam, karena penghuni non muslim (Kristen hanya 5 orang) dan mereka tidak semuanya dalam kondisi sehat. Adapun pembinaan keagamaan kepada 5 orang lansia beragama Kristen tersebut selama ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti kebaktian di gerejasepanjang yang bersangkutan secara fisik mampu menempuh perjalanan ke gereja. Jadi belum difasilitasi secara tersendiri oleh pihak panti.

Pembinaan keagamaan (Islam) dilakukan setiap hari Senin dan Kamis, jam 10.30-12.00. Tempat pembinaan di mushala. Setelah selesai pembinaan dilanjutkan dengan salat dzuhur berjamaah.

Jumlah peserta pembinaan agama, menurut keterangan salah seorang pengurus, sekitar 20 orang. Akan tetapi ketika peneliti melakukan pengamatan, pembinaan agama hanya diikuti 15 orang peserta perempuan. Menurut keterangan pembinaanya penghuni laki-laki sulit diajak mengikuti pembinaan agama. Kendatipun demikian, pada waktu salat jamaah ada sekitar 5 orang penghuni laki-laki yang mengikuti salat Dzuhur berjamaah. Berdasarkan pengamatan peneliti, ada 23 orang yang ikut salat Dzuhur berjamaah, terdiri dari 15 orang lansia perempuan, 5 orang lansia laki-laki dan 3 orang pengurus. Berdasarkan penuturan salah seorang pengurus, salat berjamaah setiap hari rata-rata diikuti sekitar 11 orang lansia.

Materi pembinaan terbatas mengenai tuntunan salat dan pembinaan etitude (sikap mental). Para penghuni PSTW sulit untuk diajar membaca al-Quran, karena hambatan penglihatan dan pendengaran, terutama bagi lansia tidak potensial. Di PSTW ini terdapat 13 orang lansia tidak potensial yang tinggal di barak E. Mereka terkendala oleh kondisi fisik yang sangat lemah. Mereka hanya mampu beraktifitas dalam barak, untuk mandi pun mereka harus dilayani. Selain itu juga hambatan latar belakang pendidikannya yang rendah. Disamping latar belakang sosial mereka, terutama yang berasal dari hasil razia, dari kalangan penyandang masalah sosial.

Para lansia yang berasal dari kalangan penyandang masalah sosial seperti gelandangan, sehabis ditangkap dan dibawa ke panti, mereka tidak mau diajak bicara. Untuk itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Lambat laun melalui ajakan secara halus mereka mau mandi. Mereka biasanya juga sulit disuruh tidur di atas tempat tidur. Mereka maunya tidur di mana saja sebagaimana kebiasaan mereka hidup di alam terbuka dalam dunia penyandang masalah sosial, seperti gelandangan.

Memperhatikan kondisi mereka yang sulit untuk diciptakan suasana pembinaan keagamaan melalui metoda pembelajaran yang teratur, maka para pengurus maupun para pembina keagamaan berpandangan, bahwa yang penting para lansia bisa shalat dan mau melaksanakannya

sebagai kewajiban sehari-hari. Dengan demikian program pembinaan agama tidak dirancang secara muluk-muluk dan hanya ditekankan pada materi tentang tuntunan salat dan masalah etitudo. Sekalipun demikian bukan berarti pembinaan tentang ketauhidan, akhlak dan ibadah lainnya diabaikan. Pembinaan materi keagamaan tersebut dilakukan pada saat petugas pembina keagamaan melakukan bimbingan keagamaan melalui metoda ceramah.

Sebagai ilustrasi, pada waktu peneliti melakukan pengamatan, metoda pembinaan keagamaan menggunakan metoda ceramah. Menteri ceramah berupa kisah para shahabat Rasul yang berisi akhlak dan ketauhidan, antara lain kisah Umar Ibnu Khathab menemui seorang anak gembala. Dalam ceramah itu diceriterakan, Umar menguji anak gembala tersebut dengan berpura-pura membeli kambing. Sahabat Umar menyuruh agar anak gembala itu memberitahukan kepada majikannya bahwa kambingnya ada yang dimakan serigala. Tapi anakgembala tersebut mengatakan bahwa majikan saya memang bisa dibohongi tapi Allah tidak bisa dibohongi. Atas kisah singkat itu kemudian penceramah (pembina) menyampaikan inti dari kisah tersebut dengan mengandaikan, jika pemimpin di negeri ini seperti itu maka negeri ini pasti menjadi *baldatun thayibatun wa rabbun ghafur*.

Setelah bercerita dengan muatan *akhlaq al karimah* dilanjutkan dengan ketauhidan dengan membahas sifat-sifat Allah, baik sifat wajib maupun sifat mustahil. Untuk meyakinkan kepada lansia tentang keberadaan Allah, pembina mengemukakan perumpamaan keberadaan benda-benda yang ada di sekitar, bahwa adanya benda-benda itu membuktikan ada yang membuat, yaitu Allah. Maka dengan adanya bumi, mata hari, bulan dan bintang-bintang ini membuktikan adanya Sang Pencipta, Allah SWT.

Pembinaan keagamaan kemudian diakhiri dengan penyampaian nilai-nilai sufisme, antara lain tentang kebahagiaan hakiki. "Orang yang berbahagia adalah orang yang berumur panjang dan banyak amal; sebaliknya orang yang tidak bahagia adalah orang yang umurnya pendek dan sedikit amal". Di alam kubur ada pertanyaan kubur, yang bisa menjawab kemudian ditidurkan. Dzikir sebagai kunci surga. Karena

dengan berdzikir orang tidak sempat berbuat yang tidak-tidak. Sekurangnya pada waktu berdzikir. Dan orang yang *khusnul khatimah* adalah orang yang mati dalam keadaan eling kepada Allah.

Bentuk pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada para lansia di PSTW Budi Mulia 1 Cipayung itu merupakan wujud pelayanan sesuai standar layanan minimal yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola PSTW sesuai ketersediaan SDM, sarana dan prasarana serta dana yang tersedia.

Perihal pembinaan kehidupan keagamaan lansia di PSTW itu, pihak Kantor Departemen Agama Jakarta Timur tidak dapat berbuat banyak karena alasan prosedur dan kewenangan. PSTW Budi Mulia 1 Cipayung secara structural berada di bawah koordinasi dan wewenang Pemda DKI Jakarta. Dengan demikian Kandepag Jakarta Timur tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan keagamaan di PSTW itu. Oleh karena itu maka dapat dipahami jika program-program pelayanan dan pembinaan keagamaan yang dicanangkan Kandepag Jakarta Timur selama ini tidak menjangkau pelayanan dan pembinaan kepada lansia di PSTW di atas. Pihak Kandepag Jakarta Timur -sekalipun demikian- dapat membantu peningkatan pelayanan dan pembinaan keagamaan lansia di PSTW di atas melalui koordinasi dan kesepakatan yang dibangun antara Kanwil Depag Propinsi DKI Jakarta dengan Pemda Propinsi DKI Jakarta. Untuk memperkuat landasan berpijak bagi koordinasi yang akan dibangun, akan lebih baik jika dibuatkan peraturan semacam perda yang sekaligus berfungsi sebagai payung hukum.

Untuk kegiatan operasional pelaksanaan program dan kegiatan di PSTW Budi Mulia 1 Cipayung didukung oleh dana/anggaran yang bersumber dari:

- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemda DKI Jakarta, Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta;
- ii. Bantuan dari Yayasan Darmais;
- iii. Sumbangan spontanitas dari masyarakat atau organisasi sosial yang tidak mengikat.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pembinaan Keagamaan Kepada lansia

Pembinaan keagamaan di PSTW menghadapi hambatan-hambatan antara lain, usia penghuni yang sudah tua , sehingga penglihatan, pendengaran, daya tangkap, dan ingatan mereka demikian rendah. Selain itu yang lebih terasa adalah hambatan fisik, misalnya di barak E berisi 13 orang lansia yang aktifitasnya harus dibantu orang lain, bahkan untuk mandi pun harus dimandikan. Di samping itu latar pendidikan mereka demikian rendah, tidak tamat SD bahkan ada yang tidak pernah sekolah. Lagi pula mereka pada umumnya dari kalangan para pekerja rendahan misalnya bekas pembantu rumah tangga.

Mereka yang berasal dari hasil razia, pada umumnya mengalami depresi berat. Mereka membutuhkan waktu sekitar seminggu baru bisa diajak bicara. Mereka yang berasal dari kalangan penyandang masalah sosial (PMS), sulit untuk dibiasakan kepada hal-hal yang baik seperti mandi secara rutin dan tidur di tempat tidur.

Kondisi para penghuni panti demikian itu membuat pembinaan agama tidak bisa maksimal. Sehingga pembinaan agama yang utama adalah mendidik mereka agar bisa dan mau melakukan salat lima waktu. Selebihnya secara rutin, pembinaan keagamaan diarahkan pada pembinaan sikap mental agar mereka berperilaku baik, tidak suka bohong dan berakhlak yang baik. Oleh karena itu bentuk kegiatannya banyak yang berupa ceramah dengan muatan akhlakul karimah.

Terkait dengan hambatan pembinaan keagamaan kepada para lansia penghuni panti, salah seorang Pembina keagamaan mengatakan "sebenarnya ini kan sekedar menunggu mereka untuk masuk pesantren Pondok rangon" Yang dimaksudkan oleh Pembina adalah tempat pemakaman umum (TPU) Pondok Rangon.

Adapun di antara faktor pendukung pelayanan pembinaan keagamaan di PSTW di atas adalah tersedianya dana rutin pembinaan sekalipun relative terbatas, adanya tenaga voluntir pembimbing keagamaan lansia yang relatif profesional, adanya tenaga panti dengan jumlah yang memadai serta tersedianya sarana dan prasarana kegiatan bimbingan keagamaan terutama untuk para lansia beragama Islam.

Sekalipun keberadaan tiga orang tenaga pembimbing keagamaan (Islam) untuk sementara dianggap cukup memadai, namun pihak PSTW tidak menolak jika pihak Departemen Agama Jakarta Timur dapat memberikan bantuan tenaga pembimbing keagamaan termasuk tenaga pembimbing agama Kristen dalam rangka meningkatkan pelayanan bimbingan keagamaan kepada para lansia di PSTW Budi Mulia 1 Cipayung, Jakarta Timur.

Penutup

Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) sebagai salah satu lembaga pelayanan sosial bagi masyarakat lanjut usia, diharapkan dapat memberikan kontribusi semaksimal mungkin bagi peningkatan taraf kesejahteraan kepada para lanjut usia yang dilayani. Terlebih seiring dengan meningkatnya jumlah lanjut usia di berbagai daerah dan bertambahnya kompleksitas permasalahan yang mereka hadapi, maka PSTW dituntut untuk lebih mempersiapkan diri agar mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Terlepas dari persoalan-persoalan demikian, berdasarkan deskripsi di atas dapat diambil beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan

- a. PSTW Budi Mulia 1 Cipayung, Jakarta Timur dalam mengimplementasikan peraturan perundangan terkait dengan pelayanan dan pembinaan lansia, melakukan pelayanan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok yang dijabarkan dalam aspek-aspek layanan antara lain: sasaran garapan, persyaratan dan prosedur penerimaan, kepenghungan, proses layanan serta program kegiatan. Untuk pelaksanaan pelayanan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang relatif cukup memadai, di samping adanya sejumlah pegawai maupun dana rutin yang terbatas.
- b. Pelayanan dan pembinaan kehidupan beragama secara formal dilakukan oleh tiga orang tenaga pembimbing yang tergolong profesional sekalipun selaku tenaga voluntir. Pelayanan bimb-

ingan dan pembinaan keagamaan yang dilakukan baru terbatas kepada lansia beragama Islam yang jumlahnya mayoritas (95 %) di PSTW tersebut. Materi bimbingan dan pembinaan keagamaan yang dilakukan lebih mengutamakan tuntunan salat dan pembinaan sikap mental, dengan frekuensi pembinaan rata-rata dua kali seminggu. Materi tentang penguatan iman, akhlak dan lainnya dilakukan menggunakan metoda ceramah. Bimbingan dan pembinaan keagamaan diikuti oleh rata-rata 15 s/d 20 lansia. Bimbingan untuk lansia beragama Kristen untuk sementara belum dilakukan, mengingat jumlah mereka relatif sangat sedikit dan belum tersedianya sarana peribadatan bagi umat Kristiani. Pihak Kandepag Jakarta Timur sehubungan tidak adanya kewenangan dan belum adanya payung hukum, maka tidak dapat berbuat banyak dalam keikutsertaan membantu memberikan pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada lansia di PSTW di atas. Sementara itu bantuan bimbingan keagamaan kepada lansia –termasuk lansia beragama Kristen- dari Kandepag Jakarta Timur akan sangat membantu PSTW Budi Mulia 1 Cipayung dalam upaya peningkatan pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada para lansia yang dikelola.

- c. Di antara faktor penghambat yang dirasakan PSTW Budi Mulia 1 Cipayung dalam upaya pembinaan kehidupan keagamaan para lansia adalah usia para penghuni yang sudah tua yang mengakibatkan kurangnya kemampuan fisik dan daya ingat, menjadi kendala bagi pembinaan keagamaan mereka, di samping latarbelakang pendidikan mereka yang rendah. Selain itu terganggunya sikap mental sebagian mereka terutama para lansia dari kalangan penyandang masalah sosial, menjadikan pembinaan keagamaan kepada mereka tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Rekomendasi

- a. Mengingat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki para lansia baik akibat faktor umur maupun kondisi mental, maka dalam melakukan pembinaan dan bimbingan keagamaan hendaknya lebih diarahkan selain memberikan motivasi untuk rajin salat, juga diberikan motivasi untuk memperbanyak ibadah lainnya

seperti berdoa, wirid, bertasbih dan ibadah-ibadah ringan lainnya. Untuk itu kiranya pihak pengelola PSTW – melalui para tenaga pembimbing keagamaan- dapat memperbanyak bimbingan mengenai bacaan-bacaan doa, dzikir/wirid, baca shalawat, tasbih dan sebagainya.

- b. Dalam upaya peningkatan pelayanan bimbingan dan pembinaan keagamaan kepada berbagai unsur masyarakat –termasuk para lansia- kiranya pihak Kandepag Jakarta Timur diharapkan dapat memberikan bantuan layanan bimbingan dan pembinaan keagamaan yang diperlukan oleh pihak pengelola PSTW Budi Mulia 1 Cipayung, seperti tenaga pembimbing agama termasuk agama Kristen. Untuk merealisasikan bantuan bimbingan dan pembinaan keagamaan, kiranya dapat dilakukan koordinasi lintas sektoral dengan Dinas Bintal dan Kesos DKI Jakarta. Untuk memperkokoh landasaan berpijak koordinasi yang dilakukan, seyogyanya Pemda setempat membuat perda sebagai payung hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abikusno MD, Nugroho, (Peny.), *Pedoman Rencana Aksi Nasional untuk Kesejahteraan Lanjut usia*. Depsos RI-YEL-UNFPA-HetpAge Internasional, 2003.
- Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, *Profil Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW)*. Jakarta 2007.
- , *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, Jakarta, 2006.
- Dinas Bina Mental Spiritual & Kesejahteraan Sosial, *Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 Cipayung (Booklet)*, Jakarta, 2008.
- Direktorat Pengembangan Ketahanan Keluarga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Panduan Program Bina Keluarga lansia (BKL) Percontohan*. Jakarta, 2006.

Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial (Journal of Studies and Information on Sosial Welfare Issues) Vol.8, No. 4, Desember 2003.

Keputusan Komisi Nasional Lanjut Usia Nomor: 03/KNL/VIII/2005 tentang Program Umum Komisi Nasional Lanjut Usia dan Program Kerja Komisi Nasional Lanjut Usia Tahun 2005-2006.

Komisi Nasional Lanjut Usia, *Pedoman Koordinasi Komisi Nasional Lanjut Usia dengan Lembaga Internasional*, Jakarta, 2006.

-----, *Kondisi Sosial-Ekonomi Lanjut Usia di Indonesia*. Jakarta 2006.

-----, *Kumpulan Kesepakatan Internasional Bidang Lanjut Usia*. Jakarta, 2007.

Marsono, *UUD 1945 Dengan Perubahan-Perubahannya 1999-2002*, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2002.

Peneliti, Tim, Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Beragama, *Penelitian Pembinaan Keagamaan bagi Masyarakat Lansia*, Jakarta, 2000.

Kehidupan Beragama Lanjut Usia di Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar, Jakarta

Titik Suwariyati

*Peneliti pada Puslitbang
Kehidupan Keagamaan,
Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama.*

Abstract:

This research intends to reveal the implementation of constitution related to the elderly welfare within the religious sector. Furthermore, it intends to understand the pattern and supporting factors including obstacles in religious life guidance for the elderly. This research is conducted at Tresna Werdha Budhi Mulia Social Care West Jakarta by case study and applies a qualitative approach. It indicates that certain constitution regarding to the elderly has been implemented, even though without any particular guidance pattern. Supporting factors of the guidance is the attention from the houses' directors, while the obstacles are the condition of the elders which has experienced various elder conditions that lead to physical and mental disadvantage.

Keywords: *implementation, elder welfare, guidance pattern.*

Latar Belakang

Salah satu implikasi dari keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya usia harapan hidup. Jika pada tahun 1980 usia hidup masyarakat Indonesia adalah 52,2 tahun, maka pada tahun 1990 meningkat menjadi 59,8 tahun, pada tahun 2000 meningkat menjadi 64, 5 tahun, dan pada tahun 2020 diperkirakan akan menjadi 71,1 tahun. Hal ini menyebabkan jumlah

penduduk lanjut usia di Indonesia akan semakin meningkat. Fenomena seperti ini patut disyukuri karena pada umumnya bagi masyarakat Indonesia, orangtua dinilai mempunyai banyak pengalaman, bijak dan arif serta selalu dimohon doanya oleh para anak, cucu dan kerabatnya. Namun di sisi lain, permasalahan yang dihadapi para lansia ini akan semakin komplek seiring dengan menurunnya kemampuan fisik, sosial maupun kesehatannya.

Menyadari akan keberadaan lansia yang harus tetap terjamin kesejahteraan-annya, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Kemudian pada tahun 2005 dibentuk Komnas lansia yang bertugas meningkatkan kesejahteraan sosial lansia (Keppres 52 Tahun 2004). Di samping kesejahteraan fisik maupun sosialnya, tidak bisa diabaikan adalah kesejahteraan rohaninya dalam arti kebutuhan keagamaannya harus diperhatikan pula.

Di masyarakat, keberadaan para lansia ini tidak selalu berkumpul dengan keluarga intinya, bersatu dengan keluarga besarnya. Namun tidak sedikit para lansia yang sudah tidak punya keluarga lagi, atau keluarganya sudah tidak mempedulikan lagi atau berbagai sebab lainnya sehingga lansia ini harus tinggal di panti yang disebut Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW). Di DKI Jakarta disebut Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia yang jumlahnya ada 4, yaitu PSTW Budi Mulia 1 Cipayung, PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng, PSTW Budi Mulia 3 Ciracas, dan PSTW Budi Mulia 4 Margaguna (SK Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta). Sedangkan dalam pasal 32 surat keputusan tersebut disebutkan bahwa Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar (sebagai sasaran penelitian) adalah unit layanan PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng dalam pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Dalam panti para lansia akan diberikan pelayanan yaitu pemenuhan kebutuhan fisik, bimbingan sosial, bimbingan fisik dan kesehatan, bimbingan psikososial, bimbingan mental-spiritual dan kerohanian, bimbingan ketrampilan, dan bimbingan rekreasi dan hiburan. Hal ini terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 4/PRS-

3/KPTS/2007 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Panti Bab III huruf D. Pelayanan keagamaan di PSTW ini ditegaskan lagi dalam SK Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 163 Tahun 2002 pada Bab VI pasal 27 ayat (2).

Untuk itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan lansia di bidang keagamaan, 2) bagaimana pola-pola pembinaan kehidupan beragama lansia di panti sosial oleh pemerintah dan swasta, dan 3) apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan kehidupan beragama lanjut usia di panti sosial.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan lansia di bidang keagamaan, 2) mengetahui pola-pola pembinaan kehidupan beragama lansia di panti sosial oleh pemerintah dan swasta, dan 3) mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan kehidupan beragama lanjut usia di panti sosial.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif sehingga data terkumpul dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen dan observasi lapangan. Sasaran penelitian ini adalah di Sasana Tresna Werdha Budi Mulia berlokasi di Jelambar Jaya Li No. 10 Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat yang dikelola oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Gambaran Umum Kotamadya Jakarta Barat

Kotamadya Jakarta Barat terletak antara 106° 22' 42" BT sampai 106° 58' 18" dan 50° 19' 12" LS sampai 60° 23' 54" LS. Permukaan tanahnya relatif datar, terletak sekitar 7 m di atas permukaan laut dan luas wilayahnya 128,19 km². batas wilayah kotamadya Jakarta Barat adalah sebelah utara berbatasan dengan Jakarta Utara, sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Pusat, sebelah selatan berbatasan dengan Banten, di sebelah barat berbatasan dengan Tangerang. Keadaan iklim Jakarta Barat relatif panas. Curah hujan selama tahun 2006 berkapasitas 813,9 mm. Jumlah hari hujan pada tahun sama adalah 61 hari, sehingga

rata-rata curah hujan harian 2,2 mm/hari. Curah hujan bulanan yang terjadi pada bulan Maret (168 mm). Rata-rata curah hujan harian paling tinggi terjadi pada bulan Desember (14 hari) dan curah hujan yang paling tinggi terjadi pada bulan Februari dan Maret (5,9 mm/hari).

Kotamadya Jakarta Barat terbagi menjadi 8 kecamatan, 56 kelurahan, 578 RW dan 6,383 RT serta 446.484 kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk kota Jakarta Barat pada tahun 2006 menurut data dalam Buku Jakarta Barat Dalam Angka Tahun 2007 sebanyak 1.565.947 jiwa yang terdiri dari 792.324 jiwa laki-laki dan 773.620 jiwa perempuan. Dilihat dari agamanya, maka penduduk yang beragama Islam 1.157.671 jiwa, Protestan 155.740 jiwa, Katolik 92.359 jiwa, Hindu 33.662 jiwa, Buddha 126.515 jiwa, dan Khonghucu belum tercatat

Jakarta yang secara kultural memiliki budaya dan bahasa yang unik hasil perpaduan dari berbagai suku bangsa di Indonesia terutama dari Jawa, Sunda, Arab, Bali, dan Melayu telah melahirkan bahasa dan dialek Betawi. Secara gramatikal dialek Betawi merupakan salah satu logat dari bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dikembangkan. Menurut Ridwan Saidi (salah satu anggota Dewan Pakar Lembaga Kebudayaan Betawi sambil mengutip pendapat Bern Nothover (1995), mencatat bahwa apa yang dikenal sekarang ini sebagai bahasa Betawi adalah bahasa Melayu dialek Nusa Kelapa yang sudah dipergunakan di Jakarta sejak abad ke-10 (Babad Tanah Betawi, 2002).

Sifat campur-aduk dalam dialek Betawi adalah cerminan dari kebudayaan Betawi secara umum, yang merupakan hasil perkawinan berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara maupun kebudayaan asing. Dalam bidang kesenian, misalnya, orang Betawi memiliki seni Gambang Kromong yang berasal dari musik Cina, Rebana berakar dari tradisi musik Arab, Keroncong Tugu berlatar belakang Portugis-Arab dan Tanjidor yang berlatar belakang ke-Belanda-an.

Sebagai ibukota negara dan kota internasional, Jakarta menjadi tumpuan orang darimana saja untuk menjari penghidupan di kota ini. Di satu sisi kondisi ini memicu pembangunan kota Jakarta, tetapi di sisi lain, orang yang tidak siap dengan kemampuannya akan kesulitan untuk mencari pekerjaan dan inilah yang menimbulkan problem sosial yang

sangat kompleks, seperti banyaknya pengangguran, peristiwa kriminal, gelandangan, pengemis dan lainnya. Salah satu dari semuanya itu adalah lansia yang di dalam hidupnya sudah tidak mempunyai kerabat lagi, sehingga perlu disantuni. Maka dengan keinginan agar Jakarta dapat menjadi kota yang nyaman, salah satu program pemerintah DKI Jakarta adalah melakukan pelayanan di panti yang dikelola oleh pemerintah.

Profil Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar Jakarta Barat

Sasana Tresna Werdha Budi Mulia berlokasi di Jelambar Jaya Li No. 10 Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat. Pada tahun 1990 pemerintah DKI Jakarta membangun Panti Sosial 01 Jelambar yang menangani para Tuna Wisma. Namun dengan surat keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 736 tertanggal 01 Mei 1996 nama Panti berubah menjadi Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Mulia 05 Jelambar dan dipergunakan untuk menampung para lansia. Kemudian pada tahun 2002 dengan SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 163 tahun 2002 tertanggal 13 November 2002 nama Panti berubah menjadi Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar. Pergantian nama 'panti' menjadi 'sasana' berdasarkan pada daya tampung yang hanya sampai 75 orang. Namun saat ini jumlah lansia yang ditampung adalah 80 orang. Dalam pelaksanaan operasionalnya, kegiatan sasana ini berpedoman pada kebijakan-kebijakan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 Cengkareng.

Sebagaimana lembaga pemerintah yang langsung melayani masyarakat, Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar mempunyai visi adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya lanjut usia terlantar DKI Jakarta terentaskan dalam kehidupan yang layak dan normatif, sedangkan misinya adalah mencegah, mengurangi tumbuh kembang meluasnya masalah kesejahteraan sosial khususnya lanjut usia terlantar. Dengan visi dan misi ini diharapkan masalah lansia terlantar dapat tertangani dan dapat mendapat pelayanan sebagaimana mestinya sehingga Jakarta sebagai ibukota negara dapat terwujud sebagai kota yang sejahtera dan berbudaya sebagaimana visi dan misi pemerintah DKI Jakarta.

Tugas dan fungsi Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan pendekatan awal meliputi

penjangkauan observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi; 2. Melaksanakan penerimaan meliputi registrasi, persyaratan administrasi dan penempatan dalam Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar; 3. Melaksanakan asesmen meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi; 4. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan fisik dan kesehatan; 5. Melaksanakan terapi sosial meliputi bimbingan perorangan, kelompok dan masyarakat; 6. Melaksanakan bimbingan mental, sosial dan keagamaan; 7. Melaksanakan bimbingan pelatihan ketrampilan, pengisian waktu luang; 8. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penyaluran kembali kepada keluarga dan rujukan ke lembaga sosial lainnya; 9. Melaksanakan bina lanjut meliputi monitoring, konsultasi, asistensi dan pemantapan; 10. Melaksanakan pengurusan pemulasaraan jenazah dan pemakaman; dan 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Panti/Sasana.

Sedangkan Program dan Kegiatan Pelayanan adalah: 1. Identifikasi, seleksi, motivasi dan penerimaan; 2. Penyantunan dan perawatan; 3. Bimbingan sosial; 4. Bimbingan mental/agama yaitu agama Islam dan Kristen; 5. Bimbingan fisik; 6. Tatap muka/curhat; 7. Pelayanan pemeriksaan kesehatan; 8. Rujukan ke rumah sakit; 9. Rujukan ke Panti Usada Mulia (PUM) Cengkareng; 10. Bimbingan ketrampilan; 11. Penyerahan dari masyarakat; 12. Penyaluran kembali kepada keluarga/masyarakat; dan 13. Pemulasaraan jenazah.

Anggaran dan sumber dana Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar diperoleh dari APBD Propinsi DKI Jakarta, Yayasan Dharmais dan donatur/peran serta masyarakat yang tidak mengikat.

Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar terletak di tengah pemukiman padat di Kelurahan Jelambar. Jika musim hujan daerah ini terkena banjir karena berdekatan dengan Kali Angke, namun Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar sendiri hanya terkena banjir sampai ke halaman saja. Jika musim kemarau Kali Angke mengeluarkan bau yang sangat mengganggu pernafasan, sehingga lokasi demikian sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk sebuah panti yang menyantuni para lansia.

Sarana dan prasarana Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar adalah luas lahan sasana ini 2.141 m² dengan luas bangunan 1.387,56 m²

yang dipergunakan untuk kantor, barak WBS, sal, aula, dapur, ruang makan, mushalla, poliklinik, rumah dinas 1 buah. Barak di sasana ini diberi nama-nama seperti Wisma Bisma, Wisma Nakula Sadewa, Wisma Sinta, Wisma Kunti. Sasana ini juga dilengkapi dengan 1 mobil operasional dalam keadaan masih baik. Di samping itu, masih ada halaman yang cukup luas sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya untuk menitipkan/memarkirkan mobilnya jika sedang tidak dipergunakan. Dengan sendirinya mereka memberikan sekedar uang kepada panti.

Sumber daya manusia terdiri dari PNS sejumlah 5 orang (3 laki-laki dan 2 perempuan) dan Pramu Sosial 10 orang (6 laki-laki dan 4 perempuan) yaitu petugas kebersihan, satpam, tukang kebun dan taman, tukang masak, tukang cuci. Tugas pramu sosial ini mulai dari menyediakan makan, memandikan lansia yang tidak bisa mandi sendiri, membersihkan barak. Menyadari tugas yang sangat berat ini, maka untuk keadilan tugas-tugas itu dijadwal secara bergilir. Menurut Kepala Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar, bapak Djaka Kunandjaja, SH, MM, mereka yang honorer telah diusulkan menjadi PNS.

Daya tampung sasana ini sebenarnya 75 orang terdiri dari laki-laki maupun perempuan, namun sekarang ini penghuni panti berjumlah 80 orang. Jika dilihat dari cara masuknya, maka penghuni Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar terdiri dari 4 kategori. Pertama yaitu para lansia yang diserahkan dari instansi sosial baik pemerintah maupun swasta. Kedua, penyerahan dari polisi, ketiga penyerahan dari rumah sakit dan penyerahan dari masyarakat atau keluarga karena kondisi sosial ekonominya sangat terbatas/miskin.

Lansia yang diserahkan dari instansi sosial adalah hasil razia yang dilakukan oleh Trantib, dan ini yang paling banyak. Ketika dilakukan razia oleh petugas Trantib, maka yang terjaring adalah terdapat anak jalanan, preman, PSK, gelandangan maupun pengemis baik yang masih anak-anak, remaja, dewasa maupun para lansia. Mereka ini kemudian dikumpulkan di Panti Sosial Bina Insan Bangundaya Kedoya Jakarta Barat. Disinilah mereka dipilah-pilah sesuai dengan kriteria, misalnya PSK ditampung di panti rehabilitasi di Cengkareng untuk dilakukan pembinaan, demikian pula dengan anak-anak gelandangan. Sedangkan yang telah lanjut usia antara lain ditampung di Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar ini, kalau di sasana ini sudah tidak menampung

atau kapasitasnya sudah penuh maka dialihkan ke PSTW lain seperti di Ciracas atau yang lainnya.

Untuk dapat menjadi penghuni Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar ini harus memenuhi syarat yaitu lanjut usia terlantar, usia minimal 60 tahun, tidak mengalami gangguan jiwa, tidak menderita penyakit menular, mampu mengurus diri sendiri dan penduduk Propinsi DKI Jakarta.

Salah satu penghuni panti adalah ibu Sutiah yang berusia 65 tahun. Ibu Sutiah menjadi penghuni panti karena atas inisiatif sendiri dalam arti ia datang ke panti dan mengemukakan niatnya untuk tinggal di panti dengan alasan sudah tidak punya saudara. Waktu itu ia dalam keadaan sakit strook ringan sehingga tidak ada yang merawatnya. Oleh pihak panti diterima setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi sosial ekonominya dan ada surat keterangan dari Lurah dimana ia bertempat tinggal.

Pembinaan Kehidupan Beragama Lanjut Usia

Jumlah penghuni Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar adalah 80 orang yang berumur rata-rata 70 sampai 83 tahun. Jika dilihat dari agamanya, maka yang beragama Islam sebanyak 60 orang, Protestan 7 orang, dan Buddha 13 orang. Pembinaan rohani bagi penghuni panti dilakukan pada setiap hari Selasa dan Kamis jam 10.00 sampai 11.30. bagi yang beragama Protestan setiap hari Minggu mengikuti kebaktian di gereja dijemput oleh pengurus gereja, sedangkan bagi yang beragama Buddha selama ini belum ada pembinaan keagamaannya.

Kelompok pengajian lansia di sasana ini dinamakan Al-Istiqamah. Pengajian ini dipimpin oleh ustadz Abdul Hakim, beliau adalah tenaga pramu sosial/honorer panti yang bertugas sebagai satpam. Walaupun sebagai satpam, namun pak Hakim yang beretnis Betawi adalah alumni sebuah pondok pesantren di Jombang dan sekarang sedang menyelesaikan kuliah S1-nya di Fakultas Tarbiyah Universitas Al-Aqidah Kayu Manis Jakarta semester VI. Di samping itu dia juga aktif di Majelis Dzikir "Kembangan" di lingkungan tempat tinggalnya.

Dalam memberikan pembinaan keagamaan kepada para lansia, pak Hakim sudah menyiapkan jadwal, misalnya Selasa materi yang

diberikan adalah tauhid, aqidah dan dzikir. Hari Kamis diberikan materi fiqih dan syariah. Namun karena kondisi lansia yang memang sudah tua, pendidikannya-pun rendah bahkan banyak yang buta huruf, maka materi yang diberikan hanya doa-doa yang mudah dihafal yang diucapkan setiap saat, misalnya alhamdulillah ketika bersyukur, astaghfirullah, innalillahi dan sebagainya.

Salah satu gambaran pembinaan keagamaan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Juni 2008. Mulai jam 10.00 pengurus sasana sudah mengajak para penghuni untuk berkumpul di aula sasana -walaupun ada masjid Baiturrahim yang terletak di sebelah kanan kantor, namun kondisi para lansia kadang-kadang masih ada yang ngompol, sehingga menghindari masjid dari najis-. Di aula sudah disiapkan tikar yang telah dibentangkan dan sederetan kursi. Tikar untuk lansia yang masih kuat duduk di bawah, sedangkan kursi bagi mereka yang sudah tidak bisa duduk di bawah. Tempat antara laki-laki dan perempuan dipisah.

Pada jam 10.15 barulah para lansia berkumpul, masuklah ustadz Hakim langsung duduk di tempat yang telah disediakan yaitu di tengah di depan jamaah. Jamaah yang hadir sebanyak 24 orang terdiri dari 6 laki-laki dan 18 perempuan. Namun ada pula beberapa lansia yang mendengarkan di luar aula, ada yang duduk di kursi roda, ada yang berbaring di tempat tidurnya. Pengajian ini memang menggunakan pengeras suara sehingga suaranya bisa didengarkan di luar ruangan. Pengajian dimulai jam 10.50 dengan membaca *basmallah* dan mengucapkan puji syukur dan membaca salawat kepada Nabi dengan bahasa Arab seperti layaknya pengajian-pengajian biasa. Membaca salawat bersama-sama dengan jamaah, bacaannya adalah :

يا رب بالمصطفى اقص مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.

اللهم افتح لنا حكمتك وانصر لنا رحمتك

اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

Kemudian membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan jamaah. Setelah itu dilanjutkan dengan mengulang materi yang diberikan Minggu yang lalu yaitu 7 (tujuh) kebiasaan hari-hari yang harus selalu diamalkan

oleh bapak ibu seperti: 1. membaca “basmalah” setiap akan memulai kegiatan; 2. membaca “hamdalah” setiap mengakhiri pekerjaan; 3. Banyak berzikir sepanjang siang dan malam; 4. Mengucapkan “istigfar” bila melakukan kesalahan/kekhilafan; 5. Bertawakal kepada Allah setelah berusaha; 6. Mengucapkan “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un” kalau ditimpa musibah; dan 7. Mengucapkan “insya Allah” bila berjanji.

Tambahan materi pada pertemuan saat itu adalah tentang: 1. bertasbih, karena semua makhluk Allah pada dasarnya senenatiasa bertasbih memuji Allah dengan bahasa dan caranya masing-masing. Ustadznya Hakim mencontohkan dengan ayam, yang selalu bertasbih dengan berkokok; 2. banyak bersalawat kepada nabi; 3. banyak salat tahajud dan bangun malam; dan 4. banyak berpuasa sunah.

Setelah dirasa materi yang diberikan cukup, kemudian dibuka dengan tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan dari jamaah misalnya ibu Sutiem yang menanyakan jika berdoa saat shalat tahajut sampai menangis, apakah shalatnya jadi batal. Ibu Nani menanyakan bagaimana cara melakukan shalat jika tidak bisa berdiri, dan masih ada beberapa pertanyaan lain. Semua pertanyaan dijawab dengan gaya yang santai, bercanda tetapi terjawab pertanyaannya. Metode seperti ini diharapkan dapat membuat jamaah menerima materi dengan suasana yang menyenangkan. Sebelum ditutup, para jamaah diajak mengucapkan motto para lansia di sasana ini yaitu: *Muda Berkarya, Tua Berguna, Besok Kita Ke Surga. Amin*. Pengajian selesai pada jam 11.30 ditutup dengan membaca hamdallah dan bersalaman antara jamaah laki-laki dengan jamaah laki-laki dan jamaah perempuan dengan jamaah perempuan. Masing-masing jamaah kembali ke kamarnya. Bagi lansia yang masih ingin menambah pengetahuan agamanya, mereka akan ikut pengajian ibu-ibu lingkungan sasana yang setiap hari Kamis sore mengadakan pengajian di masjid ke Baiturrahman di lingkungan sasana. Pengajian ini dipimpin oleh ibu Hj. Ruminah.

Berkaitan dengan pelayanan bagi lansia di sasana ini, ketika ditanyakan kepada pengurus panti tentang kontribusi dari KUA Kec, Kandepag atau Kanwil Agama, ternyata tidak ada. Sebenarnya mereka mengharapkan hal itu, mengingat yang sekarang ini kebetulan ada pramu sosial yang dianggap mampu untuk mengisi pengajian bagi para lansia, dan jika misalnya ustadz Hakim pada suatu saat dipindahkan tugasnya,

untuk mencari gantinya akan kesulitan. Hal yang sama juga ditanyakan kepada Kasie Penais di Kadepag Jakarta Barat. Beliau menyatakan bahwa di Penais memang ada penyuluh agama. Untuk satu kecamatan ditugaskan 2 orang penyuluh agama, namun selama ini mereka belum pernah menyuluh di Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar. Alasan pertama adalah dengan 2 orang penyuluh agama untuk satu kecamatan yang penduduknya sangat padat, sudah merasa kewalahan sehingga untuk menyuluh di sasana belum terprogramkan sama sekali. Kedua, pemerintah DKI Jakarta dalam strukturnya ada Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial sudah dapat melayani kebutuhan keagamaan masyarakat Jakarta, sehingga tidak pernah mengajak Kandepag dalam kegiatan keagamaan.

Kesimpulan

1. Di Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar telah terjadwal kegiatan keagamaan bagi para lansia yaitu setiap hari Selasa dan Kamis jam 10.00 sampai jam 11.00 dengan metode yang sangat sederhana seperti materi berupa doa-doa pendek, surat-surat pendek, bagaimana shalat dilaksanakan bagi para lansia yang karena usianya tidak bisa berdiri lagi, bagaimana cara berpuasa dan sebagainya. Kegiatan keagamaan ini merupakan wujud implementasi perundangan-undangan yang ada dari Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lansia. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 4/PRS-3/KPTS/2007 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Panti Bab III huruf D, SK Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 163 Tahun 2002 pada Bab VI pasal 27 ayat (2) yang kemudian dijabarkan dalam Tugas dan fungsi Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar pada poin 6 yaitu melaksanakan bimbingan mental, sosial dan keagamaan, serta dalam Program dan Kegiatan Pelayanan poin 4 yaitu bimbingan mental/agama yaitu agama Islam dan Kristen.
2. Belum nampak pola-pola pembinaan kehidupan beragama lansia di Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar selama ini, namun bagaimana-pun kondisinya pembinaan kehidupan bagi para lansia berlangsung secara rutin dengan memaksimalnya kemampuan yang ada. Selain pembinaan yang dilakukan di sasana, para peng-

huni sasana diberikan keleluasaan untuk menambah keimanannya melalui pengajian yang dilakukan di masjid Baiturrahman atau dari siaran dakwah di televisi.

3. Pembinaan kehidupan beragama lansia di Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar yang selama ini berlangsung tidak terlepas dari dukungan pimpinan yang memberikan kepercayaan kepada ustadz Hakim yang status kepegawaiannya adalah pramu sosial, ikut mempersiapkan para lansia menjelang dipanggil Allah SWT memberikan semangat ustadz Hakim untuk selalu membimbing para lansia. Sedangkan faktor penghambat yang dirasakan selama ini adalah dasar pengetahuan agama para lansia yang sangat kurang atau bahkan tidak ada sama sekali ditambah dengan tingkat pendidikan yang juga rendah, daya tangkap yang sudah sangat berkurang. Selain itu, tidak ada ustadz lain yang menggantikan jika ustadz Hakim sedang berhalangan, serta perlengkapan ruangan yang sudah sangat lama sehingga perlu diperbaharui.

Rekomendasi

1. Kepada Pimpinan Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Jelambar perlu mengusulkan kepada Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial untuk mengangkat pegawai yang spesifikasinya berkaitan dengan pembinaan kehidupan beragama lansia. Selama ini kegiatan keagamaan yang menonjol adalah pengajian, namun sebenarnya harus juga dilakukan pelayanan kepada lansia yang sudah tidak potensial lagi yang sudah tidak bisa kemana-mana atau yang di ruang isolasi. Untuk mereka ini perlu dituntun dengan membisikkan -misalnya- asma Allah. Sedangkan untuk lansia beragama Buddha sebaiknya juga dilakukan pembinaan keagamaannya, untuk itu bisa meminta bantuan kepada tokoh agama Buddha dengan menghubungi pengurus WALUBI setempat.
2. Kepada Kandepag atau KUA dapat sesekali mengirimkan penyuluh agama-nya untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama bagi lansia, paling tidak dirintis suatu kerjasama dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jakarta dalam Angka Tahun 2007
- Badan Pusat Statistik Jakarta Barat dalam Angka Tahun 2007
- Departemen Agama RI, *Laporan Penelitian lansia tahun 2005*
- Depsos RI. Undang-undang RI No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Jakarta, 2006.
- _____, *Pelayanan Sosial Lanjut Usia*, Liflet, Jakarta 2006;
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996
- Marsosno, UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002, CV. Eko Jaya, Jakarta 2002.
- Maelong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Mulyana, Dedy, *Metodologi Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2004.
- Sasana Tresna Werdha Budi Mulia. Laporan 2007
- _____, Program Kegiatan Sasana 2007
- Surakhmad, Winarno, *Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Tarsito, Bandung, 1998.
- Keputusan Mensos RI No. 4/PRSS-3/KPTS/2007 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Panti, Maret 2007
- Keputusan Presiden RI No. 52 tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia, 22 Juni 2004.
- Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, 8 Oktober 2004

Kehidupan Beragama Lanjut Usia di Panti Penyantunan Lanjut Usia Budi Agung, Kupang

Umar R. Soeroer

*Peneliti pada Puslitbang
Kehidupan Keagamaan,
Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama.*

Abstract:

This research is to understand to what extent is the implementation of constitution regarding to elder welfare within the religious sector according to regulation/UU no.13 th.1998. Guidance pattern, various supporting factors, and problems in religious life guidance for the elders are subjects that need to be analyzed. This case study is conducted in Kupang Eastern Nusa Tenggara/NTT and applies a qualitative approach. It indicates that regulation regarding to the elderly has been performed though less optimally. Some guidance supporting factors include support from the local government and various facilities. The problems involve the lack of social workers.

Keyword: *elder welfare, religious guidance*

Latar Belakang Penelitian

Manusia berupaya memenuhi kebutuhan hidup yang layak, baik dalam aspek fisik materil maupun mental spiritual. Semakin terpenuhi kebutuhan tersebut semakin sejahtera dan berpengaruh terhadap bertambahnya usia harapan hidup, sehingga memperbesar jumlah penduduk lanjut usia (lansia).

Usia lansia di Indonesia dari jumlahnya mengalami peningkatan. Pada tahun 1980

berjumlah sekitar 7.998.543 jiwa (5,45%) dan seluruh jumlah penduduk, sepuluh tahun kemudian (1990) menjadi 12.778.121 jiwa (6,29%) dan pada tahun 2000 menjadi 17.767.709 jiwa (7,97%). Diperkirakan pada tahun 2010 mencapai 23,9 juta jiwa (9,77%) dan pada tahun 2020 akan mencapai 28.822.879 jiwa (11,34%). (Depsos, 2007:1). Peningkatan tersebut selain karena umumnya kesejahteraan rakyat mengalami peningkatan, juga keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), khususnya Program Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). (BKKBN, 2001) dengan program dua anak cukup. (BKKBN, Leaflet).

Masalah lansia dikaji dari beberapa aspek, salah satunya dari aspek sosial yaitu pemberdayaan lansia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya untuk melakukan peningkatan kesejahteraan lansia meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, memperoleh kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, serta pelayanan kesempatan kerja secara khusus bagi lansia potensial, pendidikan dan pelatihan dan bantuan sosial. Kemudian bagi lansia tidak potensial memperoleh perlindungan sosial (UU No.13 Tahun 1998 pasal 9-11). Sesuai dengan amanat UU, masalah pembinaan agama merupakan tugas dan fungsi Departemen Agama beserta jajarannya di daerah.

Para lansia umumnya ada yang mandiri dan hidup bersama anak-anak dan sanak kerabatnya karena mereka menyadari akan tanggung jawab secara moral kemanusiaan dan telah memperoleh pendidikan akhlak (*birrul walidain*) sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Namun, perlu disadari ada juga lansia yang memperoleh pelayanan di panti-panti sosial. Banyak faktor penyebab lansia ke panti sosial, di antaranya karena terlantar, kemauan sendiri, dan dititipkan oleh keluarganya. Dalam penelitian ini sebagai prioritas awal penelitian difokuskan pada lansia panti sosial. Berdasarkan Amanat dalam UUD 1945 menyebutkan "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan" (Pasal 34 ayat 2) Dalam Undang-undang No.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia disebutkan bahwa "Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (Pasal 5). Kebijakan pelaksanaan peningkatan-peningkatan

sosial lansia tetap secara terkoordinasi antara instansi terkait baik pemerintah maupun masyarakat (Pasal 25 ayat 1). Disamping itu pemerintah juga telah membentuk Komnas lansia pada tahun 2005 dengan tugas peningkatan kesejahteraan sosial lansia (Keppres No. 52 Tahun 2004 pasal 3).

Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Salah satunya adalah bidang pelayanan keagamaan (mental spiritual). (Kep. Mensos RI No. 15/HUK/2007. sebagai tindak lanjut Kep Mensos tersebut maka disusunlah pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia bagi Panti (No.4/PRS-3/KPTS/2007) yang berisi tentang pola-pola pembinaan/ pembimbingan lanjut usia di panti sosial. Adapun pola pembinaan/pembimbingan yang dimaksud dalam pedoman tersebut berupa pembinaan mental spiritual dan kerohanian. Bagi lansia muslim, pembinaan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, peragaan dan diskusi, bimbingan ibadah sehari-hari, pengajian baca Al-Quran (Pedoman pelayanan lanjut usia hal 23-24 2007). Pedoman tersebut dalam rangka meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan ibadah, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran iman, tanggung jawab moral dan pengembangan kepribadian serta mempertebal ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dari paparan latar belakang di atas, Puslitbang Kehidupan Keagamaan sebagai salah satu bagian unit kerja di Departemen Agama dan selaku Lembaga penelitian di bidang keagamaan merasa perlu melakukan kajian masalah lansia ini, khususnya dalam hal pembinaan keagamaan yang ada di panti sosial tersebut. Dalam rangka melihat kehidupan dan pembinaan keagamaan di panti sosial, kiranya penelitian ini menarik untuk mengungkapkan beberapa hal yang sudah atau belum ada berkenaan dengan pola-pola keagamaan di panti tersebut.

Masalah Penelitian

Masalah atau pertanyaan penelitian dapat dirumuskan; a) Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan lanjut usia di bidang keagamaan?; b) Bagaimana kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah (Depsos dan Dinsos, Depag dan Kanwil/Kandepag) dalam pembinaan kehidupan beragama lanjut usia di panti sosial?; c) Bagaimana pola-pola pembinaan kehidupan

beragama lansia di panti sosial oleh pemerintah setempat?: d) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan lanjut usia di panti sosial?

Lokasi penelitian ini memilih enam wilayah propinsi yang terdapat panti sosial bagi lansia, yang diselenggarakan pemerintah dan swasta. Salah satu provinsi di antaranya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sifat studi kasus adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*whonelees*) dari obyek yang diteliti, dalam arti data yang dikumpulkan dan dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi (*holistik*) (Jacob Vredenberg, 1980:30)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara mendalam (*dept interview*) dan pengamatan langsung (Jacob Vredenberg, 1980:42). Di samping itu dilakukan telaah dari buku-buku dan laporan-laporan hasil penelitian yang relevan, serta dokumen-dokumen di panti-panti sosial.

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini melalui 3 (tiga) tahap yang terdiri dari: 1) Reduksi data (seleksi dan penyederhanaan), 2) Penyajian Data (*display*) (disusun dan naratif) dan 3) Penarikan Kesimpulan/verifikasi (Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, 1992; 15-18). Selanjutnya diambil rekomendasi hasil penelitian.

Kerangka Pemikiran

Upaya Pembangunan bangsa selain ditemukan hambatan dan tantangan juga telah menunjukkan keberhasilan kondisi masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup mengalami peningkatan sehingga semakin bertambah jumlah lanjut usia. Sekalipun ada di antaranya yang masih produktif dan berperan aktif dalam pembangunan, tetapi karena faktor usia banyak menghadapi keterbatasan, sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosial dan keagamaannya. Hakikat peningkatan kesejahteraan sosial lansia ialah pelestarian nilai-nilai agama dan budaya bangsa.

Pelestarian nilai-nilai agama dan budaya dapat dilakukan melalui pembinaan kehidupan beragama bagi lansia . Pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan

berhasilguna untuk memperoleh hasil yang baik (Depdiknas, 1991). Yang dimaksud dengan pola adalah: a. Bentuk atau struktur yang tetap, b. Sistem dan cara kerja (dalam pemerintahan). (Kamus Basar Bahasa Indonesia BP). Depdiknas, Edisi ke III, Jakarta 2001, hal 885) Sedangkan pola yang dimaksudkan dalam kajian ini meliputi beberapa aspek yaitu: 1) Aspek kelembagaan 2) Aspek ketenagaan 3) Aspek materi 4) Aspek metode dan 5) Aspek manajemen. Adapun pembinaan yang terkait mencakup beberapa hal antara lain kebijakan, kordinasi, penyuluhan dan bimbingan, pemberian bantuan, perizinan dan pengawasan. Kehidupan beragama ialah mengenai realita pemahaman kegiatan dan pengalaman agama, baik oleh individu maupun kelompok.

Usia lansia ialah setiap warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 60 tahun keatas, baik potensial maupun tidak potensial (Kep. Mensos RI, No.15/HUK/2007:5), yang tinggal di panti sosial maupun tinggal dalam keluarga. Dalam studi kasus ini difokuskan pada lansia di panti sosial. Aspek pembinaan yang diteliti meliputi: petugas pembinaan, materi pembinaan, sarana pembinaan, biaya pembinaan serta kendala dan dorongan.

Aspek yang diungkap dalam studi ini meliputi 6 (enam) unsur dalam pembinaan kehidupan beragama, yaitu: pembina (jumlah dan profil: usia, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain), lansia (jumlah dan profil: usia, pendidikan, alasan masuk panti and lain-lain), materi pembinaan (akidah/teologi, peribadatan,/kebaktian, akhlak/moral), metode pembinaan (ceramah, tanya jawab, praktek dan lain-lain), aspek pembinaan (pelaksanaan, keberhasilan, dan hambatan), serta gambaran umum pengalaman sesuai ajaran agama masing-masing. Aspek lain yang dikembangkan dalam penelitian ini ialah melihat sejauh mana implementasi peraturan perundang-undangan tentang lansia, sera kebijakan pemerintah daerah tentang peningkatan kesejahteraan lansia sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Kota Kupang sering dijuluki sebagai Kota Karang, karena daerah ini termasuk daerah yang kering. Musim kemarau terjadi antara bulai Mei sampai dengan bulan Nopember dan sering mengalami kerisis air bersih. Kota Kupang hanya dilalui oleh beberapa aliran sungai yang pada musim

hujan baru ada airnya. Sungai-sungai tersebut adalah sungai Dendeng yang bermuara di pantai LLBK (Teddys Bar); sungai Liliba yang bermuara di pantai Oesapa dan sungai Merdeka yang bermuara di pantai Oeba.

Kehidupan Keagamaan

Kondisi pemeluk agama di Kota Kupang bervariasi, dan mayoritas beragama Kristen. Hal ini tak lepas dari pengaruh penjajahan Belanda dan Portugis sejak abad ke -15. Populasi pemeluk agama di Kota Kupang adalah sebagai berikut: Kristen 61,83%, Katolik 22,87%, Islam 14,17%, Hindu 0,95%, Budha 0,13% dan agama lainnya sebanyak 0,05%¹. Sedangkan rumah ibadat di Kota Kupang yang ada yaitu Masjid sebanyak 42 buah, Gereja Kristen 176 buah, Gereja Katolik sebanyak 23 buah, Pura sebanyak 4 buah dan Kelenteng satu buah.

Rohaniawan terdiri dari : Kristen: Pendeta 199 orang, Gur.Par 1751, Pnt. 3351, Dkn 1675; Katolik: Uskup 1, Pastor 34, Bruder 22, Suster 214 orang; Islam: Ulama 3, Imam 35, Muballigh 149; Hindu: Pandita 10 orang. Penyuluh agama Fungsional dari Katolik sebanyak 2 orang, Kristen sebanyak 5 orang dan Islam sebanyak 6 orang. Sementara itu jumlah penyuluh agama honorer untuk agama Katolik berjumlah 64 orang, Kristen sebanyak 60 orang dan pemeluk Islam sebanyak 26 orang serta pemeluk Hindu sebanyak 5 orang².

Panti Penyantunan Lanjut Usia Budi Agung Kupang

Panti Penyantunan Lanjut Usia Budi Agung Kupang dibangun pada tahun 1968 oleh Pemerintah Pusat (Departemen Sosial Republik Indonesia) sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Panti didirikan dengan maksud untuk memberikan pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama dari keluarga miskin dan tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang dapat merawatnya. Pada tahun 2000 setelah Departemen Sosial dilikuidasi yang diiringi dengan pelaksanaan otonomi daerah, menjadi **Panti Penyantunan Lanjut Usia Budi Agung Kupang**, termasuk panti pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Panti yang semula bernama Panti Sosial

¹Data keagamaan di Kecamatan Maulafa bagi agama Hindu dan Budha tidak tersedia dalam laporan yang dikutip dalam *Kota Kupang dalam Angka tahun 2007*.

²Laporan Tahunan Kandepag Kota Kupang Tahun 2007

Tresna Wreda (PSTW) Budi Agung Kupang, kemudian menjadi salah satu Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, Panti Pengembangan dan Penyantunan Sosial di lingkup Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kapasitas tampung pada awal berdirinya di tahun 1968 hanya dapat menampung sebanyak 50 orang “penerima manfaat”. Sementara yang disantuni masih sangat terbatas hanya berjumlah 7 orang. Pada tahun 2007 kapasitas tampung menjadi 110 orang. Tapi kapasitas isi sebagai anggota wisma berjumlah 80 orang. Ke 80 orang sebagai penerima manfaat, menerima santunan, dan menggunakan sarana dan prasarana dari pemda melalui pengelola panti.

Dalam rangka meningkatkan hasil pelaksanaan tugas-tugas Dinas sebagai perangkat daerah, maka Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan SK Nomor 5 Tahun 2001 tentang: Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 11 Juni 2001. Salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) daerah tersebut adalah: UPTD Panti Pengembangan dan Penyantunan Sosial Dinas Sosial Propinsi Nusa Tenggara Timur yang susunan organisasinya terdiri dari : a) Sub bagian Tata Usaha; dan b) Seksi-seksi. Seksi-seksi dimaksud terdiri atas seksi Asuhan Anak Riang Kupang, seksi Asuhan Anak Taruna Harapan Lembata, seksi Asuhan Anak Ora et Labora Waikabubak, seksi Penyantunan Lanjut Usia Budi Agung Kupang dan seksi Penyantunan Lanjut Usia Paduwaw Maumere.

Seksi Penyantunan Lanjut Usia Budi menangani masalah sosial Lanjut Usia yang terlantar di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disebabkan oleh kemiskinan, baik kondisi sosial ekonomi lanjut usia dan keluarganya maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Faktor lain yang menyebabkan keterlantaran lanjut usia adalah kondisi geografis yang kurang menguntungkan sehingga lanjut usia dan keluarganya tidak dapat mengakses sistem-sistem sumber penghidupan serta masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam merawat lanjut usia. Faktor-faktor penyebab tersebut akhirnya menempatkan lanjut usia pada posisi kurang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak mampu melaksanakan peran-peran maupun upaya penanganan masalah sosial lanjut usia.

Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lanjut Usia Terlantar di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2006 berjumlah 75.784 orang dan termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial rangkingnya tertinggi pada urutan ke tiga setelah keluarga fakir miskin dan anak terlantar³

Pemda mengelola dua panti, yaitu Panti Penyantunan Lanjut Usia Budi Agung berlokasi di Kupang dan satunya bernama Panti Penyantunan Lanjut Usia Panduwaw berlokasi di Maumere Flores. Kedua panti tersebut dalam operasionalnya menggunakan Anggaran Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Visi, Misi, Tugas dan Fungsi

Visi dari panti ini adalah Kesejahteraan Sosial yang adil oleh dan untuk semua masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sedangkan misinya adalah meningkatkan pelayanan sosial bagi lanjut usia baik fisik, mental, spritual dan sosial, kesejahteraan sosial yang adil oleh dan untuk semua masyarakat nusa tenggara timur, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan mengembangkan pelayanan kesejahteraan sosial dengan semangat dan nilai-nilai kesejahteraan sosial.

Tugas yang diemban Panti Penyandang Lanjut Usia Budi Agung Kupang, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2001, adalah: memberikan perawatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan fungsinya adalah, identifikasi dan registrasi, pembinaan dan bimbingan sosial, motivasi, observasi, seleksi, home visit serta penerimaan penerima manfaat, konsultasi, pengungkapan masalah dan pemahaman serta penyusunan rencana rehabilitasi, pelayanan, penampungan/pengasramaan dan perawatan, bimbingan fisik dan mental (rohani), bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat, bimbingan keterampilan kerja/usaha dan bimbingan dinamika kelompok dan konseling/rekreasi.

³Laporan Standar Pelayanan pada Seksi Penyantunan Lanjut Usia Budi Agung Kupang, Tahun 2007.

Program dan Kegiatan Pelayanan

Program yang dilaksanakan Panti Penyantunan lanjut Usia Budi Agung Kupang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para lansia yang terdiri dari; kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, kebutuhan sosial, kebutuhan rasa aman, kebutuhan aktualisasi diri dan kebutuhan sehari-hari.⁴

Kebutuhan fisik meliputi kebutuhan tempat tinggal dan sarannya, seperti; tempat tidur, kasur, bantal, sandang/pakaian, makanan dan minum tiga kali dalam sehari dengan menu makanan yang bergizi diatur sesuai dengan jadwal. Kemudian juga olah raga bersama 2 kali seminggu di pimpin oleh guru olah raga pegawai panti. Juga pelayanan kesehatan dilakukan tiap hari Rabu oleh Dokter Panti. Bila penyakit lansia tidak bisa ditangani oleh dokter panti, maka dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit Umum dengan biaya ditanggung oleh Panti. Lansia menderita penyakit kronis ditempatkan diisolasi di lingkungan panti.

Kebutuhan Rohani diberikan sesuai dengan agama yang dianutnya. Penganut Kristen dan Katolik diberikan tempat ibadat pagi (Oikumene) tiga kali dalam seminggu, sedang ibadat sore bagi Kristen dan Katolik bersamaan diberikan 2 kali dalam seminggu pada waktu dan tempat yang sama. Panti tidak menentukan gereja-gereja mana, namun memberikan kebebasan kepada para lansia untuk melakukan kebaktian.

Bagi umat Islam diberi kesempatan dan waktu yang sama dengan penganut agama Kristen dan Katolik, tempatnya dilakukan pada sebuah ruang khusus yang dibina oleh Ustadz Drs.H. Djuwidin Thaher, dari Badan Syariah Masjid Darussalam Sikumanah. Pembina agama Islam lainnya adalah Mukhtar Lubis, S. Sos, M.Si bertugas sejak tahun 2007. Peringatan hari-hari besar keagamaan, diselenggarakan sesuai dengan agenda pelayanan.

Kebutuhan sosial meliputi: a) konseling, yang bertujuan memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga semangat hidup warga panti akan menyala lagi. Konseling dilakukan dua kali seminggu setiap hari Senin dan Rabu; b) terapi dan dinamika kelompok dilakukan 3 kali

⁴Sesuai dengan Arah Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Program Pembangunan Kesejahteraan Penyandang Masalah Sosial. Program ini diprioritaskan pada Kegiatan dan Peningkatan Pelayanan Panti-panti Sosial untuk kebutuhan lanjut usia.

seminggu, yaitu hari Senin, Rabu dan Sabtu. Kegiatan tersebut meliputi bimbingan: sosial, mental, kesehatan, fisik, keterampilan dan rekreasi. Rekreasi 2 kali dalam setahun dan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional masuk dalam kegiatan ini.

Pemenuhan kebutuhan rasa aman ini dimaksudkan agar setiap saat para penghuni panti merasa aman, dilindungi, dipantau dan diawasi keberadaannya di panti oleh petugas yang disiapkan secara bergantian selama 24 jam;

Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dimaksudkan untuk memberikan bimbingan bagi anggota panti untuk menampilkan kemampuan dengan pembekalan dasar-dasar keterampilan, seperti merajut, menyulam, menganyam, merangkai kembang, menyanyi, memasak, beternak ayam, tukang kayu, teknik elektro, terapi kesehatan dan lain-lai. Lansia yang memiliki keahlian mengajarkan pengetahuannya kepada sesama anggota panti. Dan kegiatan ini juga dipandu oleh Petugas.

Bantuan kebutuhan sehari-hari diberikan kepada seluruh anggota panti berupa Sabun cuci Wing 1 dos, sabun mandi 3 buah, Rinso 12 sachet, Hand body 1 botol, pepsodent 1 tube, minyak rambut 1 botol dan sampho 12 sachet.

Sarana dan Prasarana Panti

Dalam rangka menunjang roda kegiatan pelayanan Panti, maka Panti dilengkapi dengan sarana dan prasarana, yang merupakan aset Panti, mulai dari penyediaan fisik gedung, sarana transportasi dan mebelair, yang setiap tahun di lengkapi berdasarkan skala prioritas dari anggaran yang tersedia. Sarana dan prasarana adalah gedung, kantor 1 unit, wisma 11 unit, aula 1 unit, poliklinik 1 unit, ruang keterampilan 1 unit, dapur umum 1 unit, gudang 1 unit, garasi mobil 1 unit rumah petugas 3 unit, ruang isolasi 1 unit. sarana transportasi terdiri dari kendaraan roda empat 2 buah, opsional dan ambulance, kendaraan roda dua 1 buah, tempat tidur 80 buah, kasur 80 buah, meja makan 22 buah, kursi/bangku 22 buah, lemari makan 55 buah, lemari pakaian 11 buah, rak piring 11 buah, sofa 11 set, televisi 11 buah. Sedangkan peralatan

kantor meliputi meja kerja 50 buah, kursi kerja 50 buah, kursi fernikel 7 buah, kursi pelastik 5 buah, lemari kayu 1 buah, filing kabinet 1 buah dan komputer 4 unit.⁵

Pembiayaan

Panti Penyantunan Lanjut Usia Budi Agung Kupang memperoleh sumber pembiayaan dana dekonsentrasi (APBN) melalui Departemen Sosial. Sejak tahun 2001 pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi panti sumber dana utamanya berasal dari dana Alokasi Umum dan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Besarnya dukungan pembiayaan panti pada tahun 2000 sebesar Rp 169.305.000, tahun 2001 sebesar Rp 288.566.500, tahun 2002 sebesar Rp 350.780.000, tahun 2003 sebesar Rp 486.608.000, tahun 2004 sebesar Rp 458.023.000, tahun 2005 sebesar Rp 1.054.609.000, tahun 2006 sebesar Rp 914.220.000, tahun 2007 sebesar Rp 1.075.866.750 dan pada tahun 2008 sebesar Rp 1.252.910.900.⁶

Penerima Manfaat

Penerima manfaat lanjut usia Panti Penyantunan Budi Agung Kupang pada tahun 2008 memperoleh pelayanan dirinci menurut daerah asal adalah; Kota Kupang berjumlah 22 orang, Kabupaten Kupang berjumlah 47 orang, Kabupaten Ngada berjumlah 2 orang, Kabupaten Maluku Tengah berjumlah 1 orang, Kabupaten Timur Tengah Utara berjumlah 4 orang, Kabupaten Belu berjumlah 2 orang dan Kabupaten Alor berjumlah 2 orang. Jumlah keseluruhan adalah 80 orang.⁷ Sedangkan penerima manfaat menurut agama adalah; Islam berjumlah 2 orang, Katolik berjumlah 11 orang, Kristen berjumlah 67 orang. Sedangkan penganut Hindu, Budha dan Khonghucu di panti ini tidak ada.

Jumlah penerima manfaat menurut kelompok usia pada tahun 2008 adalah usia antara 55-59 tahun berjumlah sebanyak 2 orang, antara 60-64 tahun sebanyak 9 orang, antara 65-69 tahun berjumlah sebanyak 10 orang, antara 70-74 tahun berjumlah sebanyak 17 orang, antara 75-79 tahun berjumlah sebanyak 25 orang, antara 80-84 tahun berjumlah sebanyak 8

⁵Sumber: Laporan PPLUBAK, 2007 .

⁶Ibid.

⁷Ibid.

orang, antara 85-89 tahun berjumlah sebanyak 7 orang, antara 90-94 tahun berjumlah sebanyak 2 orang. Jumlah keseluruhan adalah 80 orang.

Dari data tersebut di atas terlihat penghuni wisma/panti hanya dua orang berusia antara usia 55-59 tahun, lainnya di atas 60 tahun. Dan yang paling banyak adalah lansia yang berusia antara 75 tahun sampai dengan usia 79 tahun, sebanyak 25 orang di antaranya 8 orang laki-laki, dan 17 orang Perempuan. Sementara Perempuan yang berusia antara 90-94 tahun adalah dua orang. Jumlah keseluruhan anggota Panti sebanyak 80 orang terdiri atas Laki-laki sebanyak 37 orang dan perempuan sebanyak 43 orang.

Jumlah penerima manfaat menurut tingkat pendidikan tahun 2008 adalah buta huruf/aksara sebanyak 44 orang, tamat Sekolah Rakyat sebanyak 6, tidak tamat Sekolah Rakyat sebanyak 25, tamat SLTA (SMP) sebanyak 2, dan tidak, tamat SLTA (SMP) sebanyak 3. Jumlah keseluruhan sebanyak 80 orang.⁸

Penghuni wisma yang akrab disebut dengan lansia sebagian besar berasal dari desa, yang tingkat pendidikannya sangat rendah, bahkan 55% sebagai Buta Huruf/Aksara. Jadi keberadaannya di wisma/panti disamping mendapatkan pelayanan kesehatan, olah raga, fisik juga mendapatkan pendidikan pengenalan huruf aksara, belajar membaca, dan praktek berbicara sebagai alat komunikasi di antara penghuni dan pengurus, sehingga mereka dapat menerima materi pembinaan sosial kemasyarakatan dan pembinaan mental spiritual keagamaan. Bagi lansia yang mengalami penyakit kronis, mereka ditempatkan di ruang Isolasi, dan dirawat secara intensif oleh Dokter dan Perawat Panti. Bila mereka telah sembuh barulah dikembalikan kepada wisma tempat mereka tinggal.

Penghuni Panti PLUBAK yang meninggalkan panti adalah mereka yang meninggal dunia dan terminasi atas permintaan sendiri atau mereka dikeluarkan karena membuat pelanggaran berat dan telah diberi peringatan/nasehat sampai tiga kali. Akhirnya dengan terpaksa Pengurus Panti mengembalikan kepada keluarganya, karena dapat berakibat buruk pada penghuni Panti lainnya. Dan mereka di kembalikan secara kekeluargaan.

⁸Sumber : Standar Pelayanan PLUBAK

Proses Penerimaan menjadi Penghuni Panti⁹

Proses penerimaan menjadi penghuni Panti, melalui tahapan panjang, seperti berikut: a) *Tahap pra-intake*, yaitu Pendekatan awal melalui penyuluhan tentang sosialisasi permasalahan sosial lanjut usia dan memotivasi calon klien, keluarga dan masyarakat. Kemudian diseleksi, dilakukan oleh PSM atau PSK, Dinsos Kabupaten atau Kotamadya dan petugas Fungsional. Pada tahap intake ini, dilakukan kerjasama dengan Dinsos kabupaten/kodya, aparat desa, Petugas UPTD PPPS dan Orsos, Masyarakat dan bidang Kesejahteraan Sosial; b) *Tahap Penerimaan Pelayanan*: secara berurutan dilakukan registrasi/pendataan, pengungkapan dan pemahaman masalah, pengelompokan masalah dan penempatan. Pada tahap ini dilakukan kerjasama dengan petugas panti, petugas registrasi dan pekerja sosial fungsional UPTD PPPS; c) *Tahap pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia*, yaitu tahap pemberian jaminan kebutuhan sandang, papan, pangan & olahraga, pembinaan fisik dan mental, pembinaan rohani, pembinaan pelayanan kesehatan, pembinaan keterampilan dan pembinaan sosial. Dalam tahap ini dilakukan kerjasama dengan Dinsos Provinsi Nusa Tenggara Timur, UPTD PPPS, Panti Penyantunan Lanjut Usia, LSM, Gereja atau Masjid, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas setempat; d) *Tahap penghentian pelayanan*, dilakukan pada klien bila Meninggal dunia, diurus oleh keluarga atau diserahkan kepada Panti, dikembalikan kepada keluarga karena permintaan sendiri atau ada masalah. Pada tahap ini dilakukan kerjasama dengan Dinsos Provinsi NTT, UPTD PPPS, Panti Penyantunan Lanjut Usia, Desa/Kelurahan setempat, Keluarga dan Masyarakat, LSM, Gereja atau Masjid, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas.

Jika para lansia telah resmi menjadi bagian keluarga besar di panti, maka Dalam Kegiatan Pembinaan Pelayanan Harian dan Mingguan, dilakukan kegiatan sesuai dengan jadwal berikut:

⁹Sumber dari Laporan UPTD PPPS

Tabel 1

**Jadwal Kegiatan Pembinaan Pelayanan Harian Anggota
PPLUBAK Tahun 2008**

Waktu	Kegiatan	Tempat	Keterangan
-05.00	Bangun pagi	Wisma	
05.00-06.00	Mandi dan persiapan diri	Wisma	
06.00-07.00	Makan pagi	Wisma	
07.00-07.30	Persiapan ibadat	Wisma	Minggu jadwal Misa di Gereja masing2
07.30-08.30	Ibadat pagi	Ruang keterampilan	Kecuali hari Jumat dan Minggu
08.30-11.30	Keterampilan individu, keterampilan kelompok dan Konseling	Wisma	Menyesuaikan dan memanfaatkan waktu luang. Namun kendalanya elum ada ruang khusus
11.30-13.00	Makan siang	Wisma	
13.00-15.00	Istirahat	Wisma	
15.00-18.00	Keterampilan individu dan kelompok, konseling, dinamika kelompok, ibadat dan Kegiatan lainnya	Wisma, ruang keterampilan, tempat ibadat	
18.00-19.00	Makan malam	Wisma	
19.00-19.30	Doa malam	Wisma	
19.30-21.00	Hiburan/ Nonton TV	Wisma	
21.00-21.15	Doa individu/pribadi	Wisma	
21.15-05.00	Istirahat	Wisma	

Sumber: Standar Pelayanan PPLUBAK, Tahun 2007

Tabel: 2

**Jadwal Kegiatan Pembinaan Pelayanan Mingguan Anggota
PPLUBAK Tahun 2008**

Hari	Uraian Kegiatan	Tempat	Keterangan
Senin	Pemenuhan kebutuh se-hari2 ibadat sabda agama katolik pelayanan kesehatan, terapi, dinamika kelompok dan konseling	Wisma dan Ruang	Pukul 6.00-selesai Setiap hari Menurut kebutuhan antara 07.30-09.00 &1 12.30-13.15
Selasa	Pemenuhan kebutuhan se-hari2, ibadat pagi, olah raga	Wisma, ruang keterampilan dan halaman	07.30-09.00 15.30-selesai
Rabu	Pemenuhan kebutuahn sehari2, terapi, dinamika kelompok, konseling dan pelayanan medis	Ruang, Keterampilan, wisma dan Poliklinik	07.30-09.00 09.00-10.30 12.30-13.15 13.30-15.00
Kamis	Pemenuhan keutuhan se-hari2, ibadat pagi	Wisma &R. Keterampilan	Oikumene
Jum'at	Pemenuhan kebutuhan se-hari2 & olah raga	Wisma & halaman	06.30-selesai
Sabtu	Pemenuhan kebutuhan se-hari2, ibadat pagi, terapi dan dinamika kelompok	Wisma&R.keterampilan.	06.30-selesai 16.00-17.00 17.00-selesi
Minggu	pemenuhan kebutuhan se-hari2, ibadat pagi, rekreasi individu kelompok, atau rekreasi umum, kunjungan keluarga	Wisma, R. Keteramp. sesuai kebutuhan	06.30-selesai menurut kebutuhan

Sumber: PPLUBAK, Tahun 2007

Pembinaan Kehidupan Beragama

Panti Budi Agung, salah satu seksi dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Pengembangan dan Penyantunan Sosial Lingkup Dinas Sosial Provinsi NTT, namanya Seksi Penyantunan Lanjut Usia Budi Agung, Kupang. Adapun personil yang mengurus dan membina panti tersebut terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 19 orang dan pegawai Honorer sebanyak 15 orang dengan latar belakang pendidikan D3, sekolah kejuruan, SLTA, SLTP dan Sekolah Dasar.

Berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 1998 pasal 9-11, bahwa salah satu upaya untuk peningkatan kesejahteraan sosial lansia, mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu pelayanan keagamaan dan mental spritual, kesehatan, mendapatkan kemudahan layanan dan bantuan hukum, dan layanan lainnya. Dalam aspek keagamaan, selain pelayanan sosial keagamaan dan mental spiritual yang dimuat dalam UU tersebut juga masalah pembinaan agama merupakan bagian tugas Departemen Agama beserta jajarannya di daerah.

Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya, salah satunya adalah bidang pelayanan keagamaan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2007, kemudian ditindak lanjuti dengan Pedoman Pelayanan Sosial lanjut Usia bagi Panti, No.4/PRS-3/KPTS/2007, yang berisi tentang pola-pola pembinaan/pembimbingan yang dimaksud dalam pedoman tersebut berupa bimbingan mental spiritual dan kerohanian dengan menggunakan metode ceramah, peragaan dan diskusi, bimbingan ibadah sehari-hari, pengajian dll. Pedoman tersebut dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan ibadah, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran iman, tanggung jawab moral dan pengembangan kepribadian serta mempertebal ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pembinaan keagamaan dari Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, maupun dari Kandepag Kota Kupang belum dilakukan kerja sama secara instansional. Menurut Drs.H. Usman Ebba Kabagsek Kanwil Depag mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada surat permintaan dari Panti tersebut untuk melakukan kerjasama dalam hal pembinaan keagamaan. Tapi pemberian santunan berkenaan dengan hari-hari besar keagamaan telah dilakukan. Demikian juga Drs. Ope Rafael, MM Kepala Kandepag Kota Kupang, mengatakan bahwa selama ini belum melakukan pembinaan keagamaan pada panti lanjut usia tersebut. Dan baru sebatas memberikan santunan natura bertepatan peringatan hari besar keagamaan. Kemudian informasi itu diperkuat oleh Jeanne A. Mengga, SM, Kepala Seksi PPLUBAK (Kepala Panti) mengatakan bahwa sampai saat ini Panti belum pernah mengajukan surat permintaan tenaga dalam hal pembinaan keagamaan baik di Kanwil Depag Provinsi NTT, maupun kepada Kepala Kandepag Kota Kupang.

Dan pembinaan keagamaan bagi lansia di Panti, ditangani oleh lembaga keagamaan swasta, gereja, susteran dan badan syariah.

Pembinaan keagamaan yang berlangsung di Panti Penyantunan Lanjut Usia Budi Agung Kupang (PPLUBAK), adalah pelayanan keagamaan yang dilaksanakan oleh Karyawan/Petugas Panti sendiri yang telah memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan keagamaan, selain dari petugas internal Panti, juga menggunakan tenaga profesional yang berasal dari lembaga-lembaga keagamaan, atas permintaan dari Pengurus Panti. Lembaga keagamaan tersebut adalah: Gereja Masehi Injili di Timor, Jemaat Paulus Kupang (Kristen); Sedangkan dari Gereja Katolik adalah Pimpinan Biara SSPS (Suster-suster Abdi Roh Kudus) Merdeka, dan Kelompok Paroki. Sementara pembinaan agama Islam dibina oleh Badan Syariah Masjid Darussalam, Sikumana, dan seorang karyawan Panti.

Anggota Panti PLUBAK yang menganut agama Kristen sebanyak 85%, maka pembinaan agamanya pun dilaksanakan secara terjadwal baik yang dilaksanakan oleh internal Panti, maupun dilaksanakan oleh Pengurus Gereja Masehi Injili di Timor, Jemaat Paulus, Kupang. Kebaktian/ibadat pagi dilaksanakan 3 kali dalam seminggu, yaitu gabungan umat Kristen dan Katolik atau Oikumene, pada pukul 07.30-08.30. Petugas yang berasal dari Panti adalah Pendeta Johannes Tameon, berasal dari Timor. Mereka telah mengabdikan diri di UPTD Sudinsos Provinsi NTT sejak tahun 2004, dan kini menjadi pembina keagamaan tetap di Panti lansia sejak tahun 2007.

Materi yang disampaikan dalam pembinaan keagamaan berkaitan dengan penguatan iman agar kontinue. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya-jawab, dilanjutkan dengan praktek. Juga diterapkan peraktek memimpin doa, latihan membawakan ceramah secara bergantian tampil kedepan.

Sarana penunjang berupa alat bantu dalam kebaktian, seperti organ tunggal, gamelan, buku-buku/Al-Kitab dan kidung jemaat. Menghadapi lansia dalam kebaktian memerlukan kesabaran dan ketabahan. Karena namanya saja lansia, semua serba kekurangan. Kekurangan dalam pendengaran, penglihatan, sering pelupa dan sering emosi. Jadi pembina harus berbicara yang keras, dan berulang-ulang kali menerangkannya.

Materi yang sudah diajarkan hari ini, minggu depan sudah lupa. Jadi pelajaran yang diberikan itu direkam dalam kaset, kemudian diputar di wisma masing-masing, biar mereka dapat menyimak kembali pelajaran tersebut.

Menurut Pdt. G. Ratuwalu, S.Th pimpinan Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Paulus Kupang, pembina yang ditugaskan memberikan pengembalaan di Panti telah diatur secara bergantian 3 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Selasa, Kamis dan hari Sabtu. Materinya disesuaikan dengan kondisi anggota Panti yang pada umumnya sepuh, dan lanjut usia.

Anggota jemaat Katolik yang dibina dalam Panti sebanyak 12,5%. Panti melakukan kerjasama dengan Pimpinan Biara SSPS (Suster-suster Abdi Roh Kudus) Merdeka, dan Kelompok Paroki. Pelayanan kelompok Katolik yang diselenggarakan di Panti oleh Suster Helga setiap hari Senin sore. Sementara dari Biara SSPS Merdeka dibawakan oleh Suster Yenita Mereniana Luruk, yang bertugas dua kali dalam sebulan yaitu setiap minggu I dan minggu III. Materi yang diberikan, lebih banyak berkaitan dengan doa keselamatan, mendekatkan diri pada Tuhan berdasarkan anjuran alkitab. Dan senantiasa sabar dan bersemangat serta rela menerima keadaan di usia lansia ini.

Metode yang dipakai adalah ceramah dan tanya jawab. Menghadapi jemaat lansia memerlukan penanganan yang sabar, tidak boleh emosi, dan materi-materi yang diberikan selalu berulang-ulang. Mereka gampang lupa materi yang baru diberikan, dan suara pembina/guru harus keras dan bahasa yang mudah dicerna serta mudah dipahami. Sementara dari lingkungan Panti pembinaan keagamaan disampaikan oleh Pendeta Johannes Tameon, berasal dari Timor. Sedang pembina keagamaan yang berasal di luar panti adalah Yan Makunimau (75) berasal dari suku Rote. Materi yang disampaikan dua kali dalam sebulan pada minggu I dan minggu ke III di depan anggota Panti, berkaitan dengan Firman Allah yang berhubungan dengan kehidupan lansia. Keadaan lansia selalu diarahkan kepada masalah keimanan, banyak berdoa agar diberi kesabaran, kedamaian, diberi kesembuhan dari penyakitnya

Pembinaan Keagamaan di Lingkungan Umat Islam

Pada awalnya pembinaan keagamaan di lingkungan Panti, disatukan dengan semua penganut agama (Kristen, Katolik dan Islam) karena penganut agama Islam hanya 2 (dua) orang atau 2,5%, sementara penganut agama Katolik 12,5% dan Kristen 85%. Ketika pimpinan UPTD dijabat oleh Ahmad Sahlan, maka mulailah dipisahkan pembinaan keagamaannya. Masing-masing kelompok agama dibina oleh perwakilan agama yang bersangkutan menurut ajaran agamanya masing-masing.

Para penghuni panti penganut Islam dibina oleh Drs.H. Djumidin Tacher (63 tahun), asal dari Alor. Selama ini ia aktif sebagai Pengurus Badan Syariah Masjid Darussalam Sikumana, Kota Kupang. Pembina lainnya adalah Mukhtar Lubis, S.Sos, M.Si. Materi pembinaan berkaitan dengan kegiatan sehari-hari misalnya bersuci (*thaharah*), cara berwudhu yang benar, pengenalan huruf Al-Qur'an, bacaan shalat, masalah keimanan, rukun iman, rukun Islam dan sifat-sifat Allah dan Rasul. Materi pembinaan yang disampaikan adalah materi yang mudah dipahami. Metode penyampaiannya adalah ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab.

Sungguh suatu perkembangan yang cukup menggembirakan, mereka melaksanakan perintah agama, yakni kebaktian di gereja bagi umat Kristen dan mengerjakan shalat berjemaah bagi muslim berangkat karena kesadaran individu.

Penutup

Dari paparan di atas, dapat diperoleh beberapa kesimpulan berikut; di antaranya: a) Implementasi peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan lanjut usia di bidang keagamaan sesuai dengan UU No.13 Tahun 1998 pasal 9-11, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan lansia mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, memperoleh kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, serta secara khusus bagi lansia potensial ditambahkan dengan pelayanan kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial dan secara khusus bagi lansia tidak potensial ditambah dengan perlindungan sosial. Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan, namun belum

berjalan secara komprehensif. Demikian juga dengan lahirnya Komnas Lansia pada tahun 2005 dengan tugas peningkatan kesejahteraan sosial lansia yang diatur dalam Keppres No. 52 Tahun 2004 pasal 3, sampai saat ini belum terbentuk Komda Lansia dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pembinaan keagamaan telah dilakukan berdasarkan Kep. Mensos RI No. 15/HUK/2007 sebagai tindak lanjut Kep Mensos tersebut maka disusunlah pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia bagi Panti (No.4/PRS-3/KPTS/2007) yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dalam pembinaan keagamaan, dengan memanfaatkan tenaga-tenaga internal Panti, bekerjasama dengan lembaga keagamaan yang terkait di luar dari Kanwil Departemen Agama dan Kandepag Kota Kupang; b) Kebijakan Pemerintah Pusat (Depsos) dan Pemda di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berkaitan dengan Pembinaan Keagamaan lansia di Panti, belum berjalan secara maksimal. Dan hanya dilaksanakan oleh aparat internal Panti bekerjasama dengan Lembaga keagamaan di luar Panti. Sedang kebijakan Kanwil Depag dan Kandepag Kota Kupang, dalam pembinaan keagamaan, belum dilaksanakan sebagaimana mestinya; c). Pembinaan keagamaan yang dilaksanakan pemerintah baik yang dilakukan Dinsos maupun Depag belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sementara pembinaan keagamaan oleh pihak swasta dilakukan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor dan Jemaat Paulus Kupang dari Kelompok jemaat Kristen. Kemudian dari Susteran Merdeka dan Paroki dari Kelompok jemaat Katolik; serta dari Badan Syariah Darussalam Sikumana telah berjalan secara profesional dan terjadwal sesuai dengan kebutuhan.

Faktor pendukung pelaksanaan pembinaan agama di panti ini di antaranya; a) Adanya dukungan dari pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa penyedia dana rutin; b) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti kunjungan dan rekreasi; c) Partisipasi keluarga dan masyarakat dalam berbagai kegiatan panti; d) Adanya dukungan dari instansi terkait serta organisasi keagamaan; e) Adanya bimbingan serta arahan dari UPTD Panti Pengembangan dan Penyantunan Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;

f) Kerjasama yang baik dari seluruh karyawan/wati Panti Penyantunan lanjut Usia Budi Agung Kupang dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan terhadap lanjut usia.

Sedangkan faktor-faktor penghambatnya adalah: a) Kurangnya tenaga “pekerja sosial” dan tenaga yang memiliki kualitas SDM yang dapat menunjang pertumbuhan Panti ke depan; b) Kekurangan sarana dan prasarana tersebut sebanyak untuk keperluan 31 orang menjadi kendala pengurus Panti; c) Belum diadakannya pelatihan bagi Petugas Panti baik tenaga tetap maupun yang bersatatus honorer; d) Kurangnya sosialisasi melalui jalur agama yang dilakukan di Gereja, Masjid, Pura, dan di Klenteng pemahaman mengenai “Panti”, adapandangan bahwa masuk panti itu adalah “aib” bagi keluarga; e) Belum ada mobil operasional untuk menjemput penghuni baru yang tinggalnya di pedesaan, kurangnya kursi roda.

Sebagai masukan untuk penyelenggaraan pembinaan keagamaan di Panti ini, hendaklah dilakukan: a) Penyusunan peraturan yang baku untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana Departemen Agama RI dan Departemen Sosial RI dalam bentuk Surat Keputusan Bersama; b) Menjalini kerjasama dalam bidang penelitian antara Departemen Sosial dan Departemen Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Kupang. *Kupang Dalam Angka 2007*, Kupang 2007
- Departemen Agama RI, *Laporan Penelitian lansia tahun 2005*
- Departemen Sosial RI, *Kepres Mensos RI No. 4/PRS-3/KPTS/2007, Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam Panti*, Jakarta, 2007;
- _____, *Laporan Penanganan Masalah Issu wanita Penghibur Oleh Pemerintah RI Kerjasama dengan Asian Wome’s Fund*, Ijakarta, 2006
- _____, *Info Societa*, Edisi Juni 2007, Jakarta 2007
- _____, *Pelayanan Sosial Lanjut Usia*, Liflet, Jakarta 2006;

Hidajat, Z.M, Drs, *Masyarakat Dan Kebudayaan Suku-suku Bangsa di Nusa Tenggara Timur*, Penerbit Tarsito , 1984;

Gereja masehi Injili Di Timor Jemaat Paulus Kupang, *Warta Jemaat, Edisi Minggu 4 Mei 2008*;

UPTD Panti Pengembangan dan Penyantunan Sosial Kupang, *Laporan tahunan Panti Penyantunan lanjut Usia Budi Agung, Kupang, 2007, Kupang, 2007*;

_____, *Standar Pelayanan pada Seksi Penyantunan lanjut Usia Budi Agung Kupang, Kupang, 2007*;

_____, *Laporan Tahunan UPTD PPPS, Tahun 2006, Kupan, 2006*;

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Sekilas Profil Panti Penyantunan Lanjut Usia Budi Agung Kupang, Kupang, 2007*;

_____, *Peraturan daerah Provinsi NTT Nomor 5 tahun 2001, Tentang Pembentukan Orgaisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang 2001*;

_____, *Dinas Sosial dalam Angka Tahun 2006, Kupang 2006*;

Inten Soeweno: Sosok Pejuang Kaum Lansia

Reslawati

*Peneliti pada Puslitbang
Kehidupan Keagamaan,
Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama.*

Inten Soeweno (64 tahun) adalah Ketua Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas lansia). Ia istri seorang mantan Pangkostrad, mempunyai dua orang putra dan satu orang putri, juga memiliki lima cucu laki-laki dan empat cucu perempuan. Ia adalah lulusan sarjana Ilmu Administrasi Niaga (*Bussiness of Administration*) serta pernah mengenyam pendidikan pascasarjana meskipun tidak selesai. Ia memiliki karakter yang tegas dan disiplin. Hal ini berkat didikan ayahnya yang seorang dokter sekaligus jenderal. Inten menggeluti pekerjaan sosial semenjak muda. Hal itu berawal dari pengalaman pribadinya ketika merawat orangtua, suami, dan mertuanya hingga akhir hayat mereka, yang seakan mentakdirkannya untuk menjadi pejuang bagi mereka yang berusia lanjut. Oleh karena pengalaman itu, ia sering terlibat dan aktif di berbagai organisasi sosial.

Sebelum aktif di Komnas lansia, ia berkecimpung di organisasi sosial bernama Yayasan Kesejahteraan Sosial Teratai, bahkan berlanjut hingga sekarang. Di yayasan itu ia menangani banyak pekerjaan sosial yang di antaranya adalah mengurus korban penyalahgunaan narkoba khusus wanita di

pusat rehabilitasi. Namun sangat disayangkan, program ini kemudian ditutup karena kekurangan jumlah klien, padahal angka penyalahgunaan narkoba hingga saat ini masih cukup tinggi. Selain menangani korban penyalahgunaan narkoba, Yayasan Teratai juga menangani masalah lanjut usia dengan program bernama Pusaka (Pusat Santunan dalam Keluarga lansia) yang memiliki cabang di berbagai kota, yakni tiga buah di Jakarta dan satu buah di Yogyakarta. Pada umumnya tiap Pusaka menangani 50 klien, tapi khusus Pusaka di Yogyakarta menangani hingga 70 klien.

Sebelum berkiprah di Komnas lansia, Ibu Inten juga pernah menjabat sebagai Ketua I Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) yang merupakan organisasi non-pemerintah/LSM. Organisasi ini adalah payung dari berbagai organisasi yang menangani lanjut usia.

Pada tahun 2005, melalui surat Keputusan Presiden, ia diangkat menjadi Ketua II Komnas lansia RI. Dua tugas pokok Komnas lansia, yaitu membantu Presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan UPKS (Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial lansia) dan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Presiden dalam mengambil kebijakan tentang UPKS lansia seperti pengkajian undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan-kebijakan lainnya.

Susunan kepengurusan Komnas lansia terdiri dari 14 perwakilan dari instansi pemerintah, non pemerintah, akademisi, dan pengusaha. Periode pertama kepengurusan Komnas lansia dimulai pada tahun 2004 hingga 2008 sedangkan periode kedua dimulai pada tahun 2008 hingga 2012. Selain Komnas lansia ada juga Komisi Lanjut Usia Daerah (Komda) Propinsi yang berjumlah 35 Komda dari 33 propinsi serta sejumlah Komda Kabupaten/Kota. Pembentukan Komda ini dilaksanakan berdasarkan Kepmen Depdagri No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komda dan Pemberdayaan lansia.

Seiring terjadinya revolusi demografis maka sudah saatnya penanganan permasalahan lansia di Indonesia harus ditangani sedini mungkin. Berdasarkan data dari WHO, proporsi penduduk dunia yang berusia lebih dari 60 tahun tumbuh lebih cepat dibandingkan kelompok usia lain. Hal ini terjadi akibat adanya *post war baby boom* yang terjadi pada

tahun 1960-1970-an. Antara tahun 1970-2025 diperkirakan penambahan penduduk dunia antara 694 juta jiwa (22%). Tahun 2002 terdapat hampir 400 juta lansia di negara berkembang. Pada tahun 2050 diperkirakan jumlah usia lansia sebesar 1,3 milyar. Oleh karenanya, lansia, yang juga merupakan sumber daya manusia, perlu dioptimalkan penanganannya agar dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan sehingga dapat menua secara aktif (*active ageing*).

Mantan Menteri Sosial periode tahun 1993-1998 ini juga sering melakukan komunikasi dengan menteri atau pejabat terkait mengenai permasalahan yang berhubungan dengan lansia. Ia mengungkapkan bahwa cukup banyak undang-undang, keputusan presiden, dan keputusan menteri yang mendukung masalah kelansiaan yang berdayaguna untuk mensejahterakan lansia Indonesia. Namun, sayangnya, sosialisasi perundang-undangan tersebut belum optimal di kalangan masyarakat. Apresiasi masyarakat terhadap permasalahan lansia pun masih sangat minim. Masyarakat masih menganggap bahwa lansia itu sebaiknya di rumah saja dan tidak melakukan banyak kegiatan. Penafsiran seperti itu, menurutnya, perlu diubah karena lansia sebaiknya beraktifitas agar tidak mengalami penurunan fisik dan metabolisme, serta tidak mengalami kepikunan.

Berdasarkan data dari Susenas, kondisi lansia terlantar di Indonesia pada tahun 2006 berjumlah lebih dari 2.700.000 jiwa (15,28 %) sedangkan yang rawan terlantar berjumlah lebih dari 4.700.000 jiwa (26,63%). Di sisi lain, jumlah lansia yang tidak terlantar sebanyak 10.292.000 jiwa (58,88%). Data yang diperoleh dari BPS, usia harapan hidup lansia di Indonesia pada tahun 2010 adalah 67,4 tahun sebanyak 23.992.552 jiwa (99,7%) yang tersebar di berbagai tempat yaitu daerah perkotaan sebanyak 12.380.000 jiwa (9,58 %) dan daerah pedesaan sebanyak 15.612.000 jiwa (9,97 %) sedangkan lansia yang berusia 80 tahun sebanyak 1.444.530 jiwa. Dengan data-data tersebut, beliau ingin mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam pemberdayaan lansia Indonesia dengan cara memberikan santunan, diberikan keterampilan yang sesuai kemampuan agar lansia dapat menua secara aktif (*active ageing*). Salahsatu yang dapat dijadikan contoh adalah metode Pusaka. Para lansia berkumpul untuk diberikan

pendidikan dan pengetahuan tentang hidup layak dan sehat, bagaimana memilih makanan sehat, berpikir sehat, dan berolahraga. Metode Pusaka ini diharapkan dapat tersebar hingga ke seluruh Indonesia. Memang di daerah lain telah ada juga hal serupa meskipun namanya berbeda, yaitu Karang lansia dan Paguyuban lansia. Selain metode Pusaka, Ibu Inten juga mengharapkan agar ada panduan sederhana untuk seluruh lansia baik di kota maupun di desa agar mereka dapat berkumpul dan melakukan kegiatan produktif bersama.

Atas dasar pengalaman pribadi itulah, Ia sangat yakin dan percaya dapat mengemban amanah menjadi ketua di berbagai organisasi sosial terutama yang berhubungan dengan lansia. Baginya, menjadi tua itu bukan suatu musibah tapi itu sesuatu yang alami. Harus dipahami bahwa setiap orang akan menjadi tua dan untuk menjadi tua secara aktif (*active ageing*) tidak bisa instan. Ada empat hal yang harus dilalui yaitu persiapan diri, sehat jiwa dan raga, memilih dan menyeleksi asupan yang masuk ke tubuh. Sebab, dalam tubuh yang sehat terdapat raga yang sehat juga. Dengan demikian, seseorang yang dapat menerima pertambahan umurnya berarti ia adalah orang yang *legowo*.

Visi dan misi kehidupan Ibu Inten adalah mengajarkan dan berbagi tentang kebaikan, prestasi, kemampuan (finansial dan berpikir) yang dia miliki kepada orang lain. Di antara berbagai itu, ia seringkali beramal seperti dengan memberikan sumbangan berupa pemberian sembako, pengobatan massal, dan hiburan bagi para lansia. Berdasarkan ajaran agama yang dia yakini, apa yang sudah dilakukannya tidak perlu menerima balasan dari orang lain. Sebab baginya, perbuatan baik cukup diketahui oleh dirinya dan Allah SWT.

Tidak banyak pihak yang mengetahui jika secara pribadi Ia sering memberikan santunan setiap bulan kepada para lansia yang ada di Desa Sidomulyo Bantul, Yogyakarta. Hal itu adalah wujud dari empati dan rasa tanggung jawabnya untuk memperhatikan para lansia. Ibu Inten menyadari bahwa ia tidak dapat melakukan seluruh kegiatannya secara sendiri, meski ia tidak ingin bergantung pada orang lain. Ia berpendapat bahwa, jika kita merawat orang tua, *Insyallah* anak-anak yang akan merawat kita. Banyak yang bertanya, Ibu Inten yang seorang mantan

menteri, mengapa mau berdedikasi tinggi untuk mengurus para lansia? Baginya, memang sudah sepatutnya harus ada seseorang yang mau mengurus para lansia. "Jika bukan kita, lalu siapa lagi?", ungkapnya. Ibu Inten yang juga ketua IKP (Ikatan Keluarga Pejuang) janda dari Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata (TMPN) ini setiap satu tahun sekali melakukan silaturahmi dengan anggota IKP TMPN yang hadir 600 orang dan memberikan santunan sembako bagi karyawan TMPN dalam berbagai kesempatan.

Menurutnya, jika menjadi lansia, maka jadilah lansia yang *active Ageing*. Ia pun sedapat mungkin mengerjakan semua kegiatan dan memenuhi kebutuhannya sendiri, karena Ia tidak ingin menjadi beban dan menyusahkan orang lain. Untuk tidak merepotkan orang lain, kita harus mempersiapkan mental, jiwa, dan raga. Di lingkungan pengajian dan arisan pun Ia sering membagi pengalamannya. Lansia sebaiknya menjaga kesehatan dengan berolahraga teratur, menjaga penampilan agar tampil menarik dan rapi.

Peningkatan kesejahteraan lansia yang dilakukan oleh Komnas lansia tidak dilakukan secara operasional namun dilakukan secara konseptual, yaitu dengan cara memberikan masukan kepada Presiden tentang upaya peningkatan kesejahteraan lansia, melakukan audiensi dengan menteri terkait terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan, melakukan sosialisasi, dan mengajak pimpinan daerah propinsi/kota/kabupaten untuk peduli terhadap warga lansia.

Ibu Inten pun berpendapat bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan lansia harus ada *awareness* (kesadaran) dan tindakan kepedulian masyarakat, pemerintah, pengusaha, akademisi, dan LSM terhadap lansia. Namun, tantangan terberat yang dialami dalam menangani permasalahan lansia adalah adanya keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, Ia tetap optimis terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap lansia seperti yang terjadi di negara lain yaitu Singapura, Korea, dan Jepang. Lansia di negara lain pun dihormati dan diberdayakan. Namun hal itu belum terjadi di Indonesia dengan alasan masih banyak angkatan kerja produktif yang belum terserap di lapangan pekerjaan.

Melihat hal tersebut, beliau berpendapat bahwa lansia di Indonesia belum semuanya sejahtera dan kepedulian masyarakat terhadap lansia belum besar. Meskipun pemerintah sudah mengapresiasi dengan melibatkan dua belas departemen dalam penanganan lansia, namun ternyata hasilnya belum optimal. Akan tetapi, hal positif yang sangat membahagiakan adalah adanya undang-undang tentang lansia dan terbentuknya beberapa LSM yang menangani lansia. Harapannya adalah tercapainya kesejahteraan lansia. Lansia diberi tempat sesuai sebutannya yaitu *senior citizen* (warga senior), dan dihormati sesuai dengan norma hidup masyarakat Indonesia. Sebab jika tidak ada para lansia, maka kita pun tidak ada. Demikian sekilas pemikiran Ibu Inten Soeweno, sosok pejuang para kaum lansia.

Setelah Pensiun

Wakhid Sugiyarto

*Peneliti pada Puslitbang
Kehidupan Keagamaan,
Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama.*

Judul : Setelah Pensiun

Penulis : Achmad Subianto

Penerbit : RBI Research

Cetakan : Cetakan Kedua

Tebal : xx + 300 halaman

Kata pensiun telah menjadi sebuah kata sakral dan ditakuti oleh banyak orang, terutama bagi mereka yang tidak siap menghadapinya. Banyak orang terkena sindrom pensiun dari pekerjaan atau jabatan, baik dari perusahaan swasta maupun instansi Pemerintah, yang sebelumnya memberikan berbagai kemudahan dan keistimewaan dalam banyak hal baginya. Ketidaksiapan ini biasanya disebabkan oleh keraguan menghadapi kenyataan yang begitu jauh berbeda dengan ketika ia bekerja mengabdikan kepada perusahaan dan Pemerintah, yakni banyak yang tidak mengetahui apa yang dapat dilakukan setelah pensiun agar tetap produktif dan berpenghasilan.

Banyak orang yang tiba-tiba langsung menjadi tua dan fisiknya lemah begitu pensiun, bahkan tidak jarang terkena *stroke* ringan sampai berat, karena tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi pasca pensiun. Apalagi jika ternyata mereka masih

harus berhadapan dengan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang belum selesai, yaitu membiayai anak-anak untuk tetap harus sekolah. Kondisi psikis ini berbeda dengan orang yang biasa mandiri, wirausahawan dan wiraswsatawan, karena bagi mereka bekerja tidak ada pensiunnya. Selagi fisik masih kuat, maka ia akan terus bekerja sambil mengabdikan diri kepada Tuhan.

Untuk mengatasi masa pensiun, penulis buku ini dengan sangat baik menjelaskan seluk beluk birokrasi, Pegawai Negeri Sipil, ketimpangan kesejahteraan pegawai di kalangan PNS biasa dengan BUMN, termasuk jabatan-jabatan yang banyak diincar orang, teori-teori yang menjelaskan tentang bagaimana sebaiknya kesejahteraan sosial bagi pensiunan yang memenuhi standar hidup layak. Bahkan sampai kepada bagaimana pegawai itu memiliki rasa percaya diri menghadapi pensiun. Banyak orang memberikan sambutan tertulis untuk penerbitan buku ini. Hal itu sebagai bukti bahwa buku ini sangat penting untuk dibaca, dipahami, dan diperjuangkan untuk diimplementasikan dalam sistem kepegawaian di Indonesia.

Pengalaman penulis buku ini sebagai Dirut PT Garuda Indonesia Airways (GIA) yang sukses melakukan penataan birokrasi PT GIA, telah membawa karyawan PT GIA dari pegawai terendah sampai yang tertinggi menjadi jauh lebih sejahtera dan lebih percaya diri menghadapi masa pensiun. Padahal sebelumnya pensiunan PT GIA ada yang hanya menerima Rp 2.500 rupiah perbulan, suatu jumlah yang benar-benar tidak masuk akal sehat, bagaimana pensiunan hanya mendapatkan dana pensiun seharga sebungkus nasi kucing per bulan, yang akhirnya menyebabkan demo besar-besaran di PT GIA. Sekarang mereka boleh lega karena dari yang masih aktif sampai purnakarya telah menikmati kesejahteraan yang sangat jauh dibandingkan dengan PNS. Sukses membenahi birokrasi PT GIA itu menghantarkan beliau untuk diperpanjang masa kerjanya hingga dua periode kepemimpinan, meskipun kemudian bekerja di tempat yang lain, yaitu PT Taspen. Oleh karena itu, hampir-hampir buku ini merupakan pengalaman, kilas balik dan renungannya sebagai abdi negara tulen dalam upaya ikut memberi solusi bagi persoalan yang dihadapi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama setelah purna tugas, sehingga tidak terjadi lagi selagi manis dipakai dan setelah sepah dibuang, ibarat tebu.

Birokrasi yang sebagian besar adalah pegawai Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan organisasi Pemerintahan yang mampu menjadi pemersatu dan sokoguru negara, sebab dalam kondisi apapun peran Pemerintahan harus tetap jalan dan dijalankan oleh mereka yang masih peduli pada pelayanan masyarakat. Mereka mendapat gaji yang terkadang tidak manusiawi dan jauh dari kebutuhan riil sebuah keluarga sejahtera. Mereka inilah kemudian pada saatnya mengalami purna tugas atau pensiun.

Model perhatian pada pensiunan ini berbeda-beda dari masa ke masa. Kerajaan-kerajaan di Jawa memberi tanah *perdikan* atau *bengkok* kepada mereka yang telah berjasa pada kerajaan, persis seperti yang dilakukan oleh Yulius Caesar yang memberi tanah-tanah luas di wilayah jajahannya kepada mereka yang berjasa dan memasuki masa pensiun. Sementara itu, PNS sebagai bagian dari birokrasi mulai sistemik diawali sejak Napoleon Bonaparte yaitu pemberian *reward* yang didasarkan pada profesionalitas seseorang. Apakah di Indonesia juga seperti era Napoleon itu? Kiranya buku ini bisa menjadi bahan introspeksi bersama bahwa di Indonesia gaji pegawai berkemampuan biasa dengan pegawai yang ahli tidak berbeda, yang rajin dan yang malas sama saja. Perbedaan penghasilan yang ada hanyalah karena perlakuan istimewa yang sifatnya juga tidak jelas ukurannya, siapa yang dekat dengan pusat kekuasaan dia mendapat peluang paling besar dan lebih banyak membawa pulang uang sebagai penghasilan tetap, yang jauh dari lingkaran kekuasaan harus puas dengan gaji yang didapatkannya setiap bulan.

Untuk kasus Indonesia, birokrasi modern diperkenalkan oleh Belanda ketika berkuasa di Indonesia yang dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia hingga hari ini. Pada masa Belanda berkuasa, pegawai Pemerintah sebagai kelompok yang menempati posisi elit di masyarakat, baik itu Belanda sendiri maupun kaum pribumi yang menjadi pegawai rendahan Pemerintah Belanda. Pada masa perang kemerdekaan pegawai Pemerintah itu pecah menjadi dua, yaitu yang tetap bekerja sebagai pegawai dan sebagian ikut turun ke medan perang bersama rakyat mengusir penjajah. Pergolakan di antara pegawai Pemerintah pun terjadi, yang turun ke medan laga mengatakan pegawai Pemerintah sebagai pengkhianat dan yang pegawai sendiri mengatakan pelayanan masyarakat seperti apapun kondisi dan bentuknya harus jalan. Setelah

perang usaiupun pergolakan terus terjadi, karena yang pulang dari medan perang ingin masuk lagi menjadi pegawai, sementara posisi itu sudah diisi oleh orang lain. Pemerintah, sebagai penguasa dalam posisi buah simalakama, karena pegawai yang tidak turut perang ke medan laga rata-rata memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang turut perang. Pemerintahpun harus rasional, maka pilihanpun jatuh kepada mereka yang memiliki kemampuan dalam melakukan tugas pelayanan masyarakat, karena idealisme dan kejujuran saja tidak cukup untuk melakukan tugas.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tulang punggung negara dan seluk beluknya, termasuk kesejahteraan purnatugas secara materiil, telah dijelaskan dengan sangat baik oleh sang penulis, Achmad Subianto, dalam buku ini. Bahkan penjelasannya dilengkapi dengan peraturan-peraturan tentang pegawai negeri dan pensiunannya dari masa ke masa. Dijelaskan pula, adanya upaya memanfaatkan PNS untuk kepentingan politik pun tidak terhindarkan sejak Indonesia merdeka hingga akhir tahun 90-an, yaitu sejak jaman awal kemerdekaan, masa kabinet parlementer, masa kabinet terpimpin (Nasakom) dan sampai Orde Baru yang berakhir pada tahun 1998.

Pemaksaan politik terhadap PNS oleh berbagai partai yang tidak berkuasa maupun yang berkuasa telah menempatkan posisi PNS tidak netral, sehingga membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak adil. Pada masa Orde Baru, misalnya, daerah tertentu yang berbasis politik partai yang kalah, maka hampir dipastikan terbengkalai pembangunannya dan pelayanan masyarakatnya sangat buruk, dan sebaliknya. Pembinaan terhadap kondisi dan rekrutmen PNS-pun tidak lepas dari kepentingan politik itu. Dari masa ke masa sejak Indonesia merdeka, PNS menjadi kantong suara yang mengamankan sang penguasa dan merekapun tidak dapat menolak karena tekanan Pemerintah. PNS akhirnya merasakan kelegaan sejak tahun 1998, ketika mereka dipaksa harus netral oleh rakyat dan tidak boleh menjadi anggota partai manapun, sehingga dapat melayani masyarakat secara maksimal. Oleh karena itu, buku ini menjadi sangat penting untuk dibaca, dipahami dan diperjuangkan untuk diimplementasikan oleh mereka yang saat ini masih PNS aktif. Apakah sistem kepegawaian, kesejahteraan, dan jaminan sosial untuk hari tua (pensiun) sudah seperti yang diinginkannya. Apakah potongan

terhadap gaji pegawai setiap bulan itu tidak bisa disamakan dengan premi asuransi, sehingga juga dapat berlaku seperti asuransi. Kalau potongan itu dianggap tidak memadai untuk premi asuransi, apakah tidak sebaiknya potongan itu dinaikkan tetapi tidak mengurangi uang yang dibawa pulang oleh PNS dan seterusnya. Jadi, dengan membaca buku ini, kiranya berbagai inovasi dalam upaya kesejahteraan PNS dan purna tugas begitu sangat terbuka. Bagaimana sebaiknya hal ini bisa diperjuangkan menjadi kenyataan, sehingga PNS tidak disamakan dengan tebu, manis dihisap sepeh dibuang.

Penulis pun menjelaskan hasil studi bandingnya di beberapa negara ASEAN dan akhirnya keluarlah buku ini dengan segala kekurangan dan kelebihan. Ini belum berakhir, baru sebuah awal yang baik setelah Orde Baru, tergantung para penerusnya untuk menyelesaikan program-program kesejahteraan sosial bagi para PNS dan purnatugas. Pintu telah dibuka, inovasipun telah digelar untuk memperbaiki persoalan kesejahteraan PNS dan purnatugas ini menjadi lebih baik. Achmad Subianto pun sudah berusaha keras untuk melakukan pembenahan dalam PT Taspen agar PNS purnatugas dapat menikmati masa pensiunnya di usia lansia dengan percaya diri dan tidak terkena sindrom pegawai atau jabatan.

Dari otokritik dalam buku ini, kita menjadi tahu bahwa ternyata begitu banyak hak-hak kepatutan pegawai yang masih perlu pembenahan. Taspen yang didirikan sebagai asuransi PNS purnatugas ternyata terkendala sedemikian rupa, seperti dana yang semestinya bisa dikembangkan untuk meningkatkan profesionalitas sebagai badan asuransi belum dapat jalan, karena dananya ada di Pemerintah. Pemerintah mengimbuai perusahaan-perusahaan swasta memberi THR, asuransi tenaga kerja, lembur dan sebagainya, sebaiknya juga diberlakukan dengan baik kepada PNS dan purnatugas.

Taspen sebagai institusi pengelola kesejahteraan purnatugas, memiliki misi meningkatkan kesejahteraan peserta (PNS dan pegawai BUMN); meningkatkan pelayanan dan menumbuhkembangkan kepercayaan peserta, bahwa perusahaan berkemampuan dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya, PT Taspen berusaha agar semua PNS purnatugas dapat tetap sejahtera, meskipun sampai hari ini belum sesuai harapan. Untuk mencapai tujuan

itu, PT Taspen telah melakukan studi banding ke beberapa negara ASEAN, dan hasilnya begitu mengejutkan karena perhatian Pemerintah terhadap PNS dan yang purnatugas ternyata masih jauh dari harapan dan memiliki dana pensiunan paling kecil, lebih kecil dari Filipina, Malaysia, apalagi dengan Singapura (lihat hal 97-115). Dari studi banding itulah, kemudian PT Taspen di bawah kemudi Achmad Subianto berusaha menyusun sistem baru yang lebih mampu mensejahterakan PNS purnatugas. Namun, lagi-lagi sistem baru yang dibangun harus berhadapan kenyataan yang sulit ditembus, yaitu belum konsisten dalam menjalankan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNS ini.

Pemerintah mengupayakan perusahaan swasta untuk ikut membayar iuran pegawai sebagai bagian dari tunjangan hari tua, sementara Pemerintah malah memotong gaji pegawai untuk dana pensiun. Jadi dalam hal ini Pemerintah tidak membayar iuran dana pensiun atau tunjangan hari tua. Oleh karena itu, pegawai yang dipecat tidak hormat nasibnya jauh lebih buruk, karena tidak mendapatkan apa-apa.

Dalam buku ini dijelaskan pula bahwa dana pensiun yang mungkin jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi sesungguhnya dapat menjadi cadangan keuangan nasional pada saat krisis ekonomi. Dengan dana pensiun jika digabung PNS dan pegawai swasta, maka cadangan keuangan itu dapat menyelamatkan ekonomi Indonesia secara bersama-sama.

Secara keseluruhan, Achmad Subianto telah menjelaskan dengan sangat baik mengenai problematika yang dihadapi PNS sejak Indonesia merdeka hingga hari ini, PNS aktif hingga purnatugas, peran yang harus diemban PT Taspen, dan berbagai usulan yang sangat layak untuk diapresiasi oleh Pemerintah, mengingat usulannya didasarkan pada pengalaman suksesnya dalam membenahi birokrasi PT GIA dan pegawainya setelah purna tugas, sehingga para pensiunan PT GIA dapat merasakan kehidupan yang layak dan sejahtera secara materiil setelah pensiun.

Namun demikian, yang namanya sistem tetap ada kelemahannya atau kekurangannya dalam mencapai tujuan, apalagi tujuan itu adalah kesejahteraan manusia. Bukankah kesejahteraan itu tidak hanya

diselesaikan dengan terpenuhinya kesejahteraan lahiriah saja. Dengan kata lain, manusia tidak cukup dengan memenuhi kebutuhan jasmani saja, tetapi juga kehidupan rohani. Untuk kebutuhan yang terakhir ini, tampaknya penulis tidak mengungkapnya, bagaimana pembinaan dengan pelayanan sosial dan keagamaan bagi pensiunan atau purnatugas yang juga disebut lanjut usia. []